



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022



" SEMOGA HARI ESOK LEBIH BAIK DARI HARI INI "



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telp. 0545- 4043944 Fax. 0545- 4043943 Kode Pos 75575

SENDAWAR

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kutai Barat untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki untuk menyusun LKJIP selajutnya :

1. Penyusunan LKJIP disusun berdasarkan Permenpan RB 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Penjelasan capaian target kinerja dari Indikator kinerja yang ada dijelaskan secara komprehensif berdasarkan ketentuan yang ada.

Sendawar, 29 Maret 2023

INSPEKTUR DAERAH,



R.B.BELY Dj.W.SE.,MM.,CFrA.,CGCAE
NIP.19650624 198603 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur terpanjat kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kutai Barat tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan sarana pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan bersama seluruh perangkat daerah selama tahun 2022 sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026. Wujud akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan tidak saja mempertanggungjawabkan hasil akhir dan manfaat dari terlaksananya program dan kegiatan yang dirasakan oleh masyarakat, namun pada hal yang lebih mendasar yaitu apakah program dan kegiatan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta berdampak pada perubahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara substansif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang ada dalam LKjIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai

Barat. Materi LKjIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program, dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk Tahun 2021-2026. LKjIP juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat dijadikan sebagai bahan koreksi guna meningkatkan kinerja pemerintah pada masa mendatang.

Berbagai keberhasilan terhadap pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat tidak terlepas dari hasil kerja keras semua pihak yang terlibat di dalamnya yaitu Aparatur Pemerintah di semua jenjang pemerintahan, pihak swasta dan masyarakat tentunya, baik dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan maupun pengawasannya yang dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, yang telah turut membantu dalam penyelesaian laporan ini, semoga laporan kinerja ini bermanfaat dan dapat menjadi umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat Kutai Barat yang kita cintai.

 **Sendawar, 27 Maret 2023**
BUPATI KUTAI BARAT

FX LAPAN, SH, MH.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam perencanaan strategik melalui pelaporan yang dilaksanakan secara periodik. Dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 yang disahkan pada tanggal 25 Oktober 2021, terdapat 9 sasaran strategis dan 23 Indikator Kinerja Utama.

Tahun 2022 adalah tahun Kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026.

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen *outcome oriented* yang dijadikan sebagai instrument dalam mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, transparan dan responsif terhadap aspirasi publik. Implementasi SAKIP di Kabupaten Kutai Barat merupakan suatu keharusan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai media kontrol, boster dan alat ukur penilaian kualitas kinerja untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam perspektif yang lebih luas SAKIP juga

berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat kepada publik dalam merefleksikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Barat Tahun 2021 - 2026.

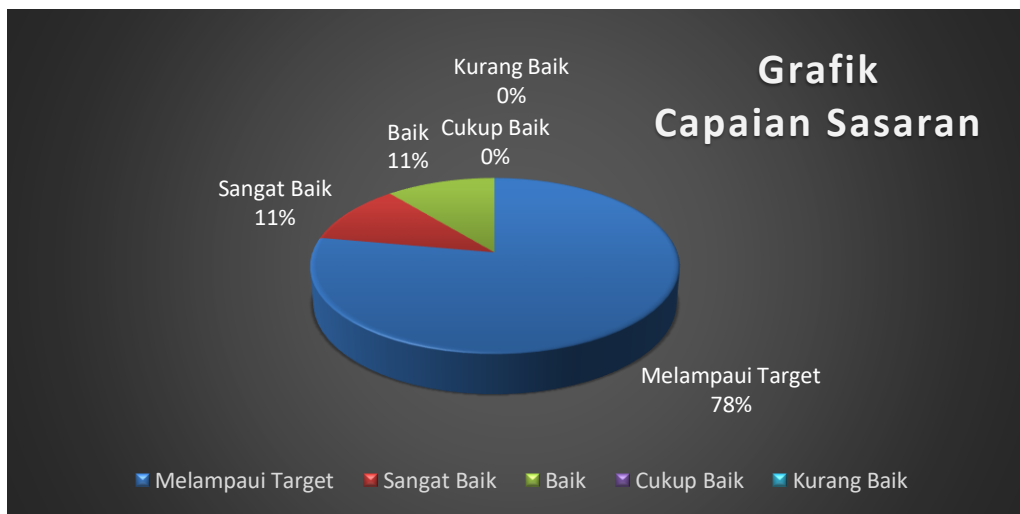
Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam tahun pertama RPJMD 2021 – 2026 ini diukur dengan membandingkan antara Rencana Kinerja (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (*Performance Result*) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya Kesenjangan Kinerja (*Porformance Gap*) antara rencana kinerja dan realisasinya serta tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa mendatang. Metode pengukuran ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis terhadap pencapaian 9 sasaran strategis, dihitung sebagai realisasi kinerja tahunan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022. Dalam mengukur capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis tersebut, dibantu dengan dukungan indikator-indikator kinerja setingkat *outcome* yang sebagian besar diambil dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian diperoleh hasil akumulatif dari 9 sasaran strategis dan 23 IKU yang ditetapkan dengan nilai pencapaian akumulatif sebesar **106,45 %** atau termasuk dalam kategori **"MELAMPAUI TARGET (MT)"**. Adapun hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 secara spesifik dijelaskan sebagai berikut :

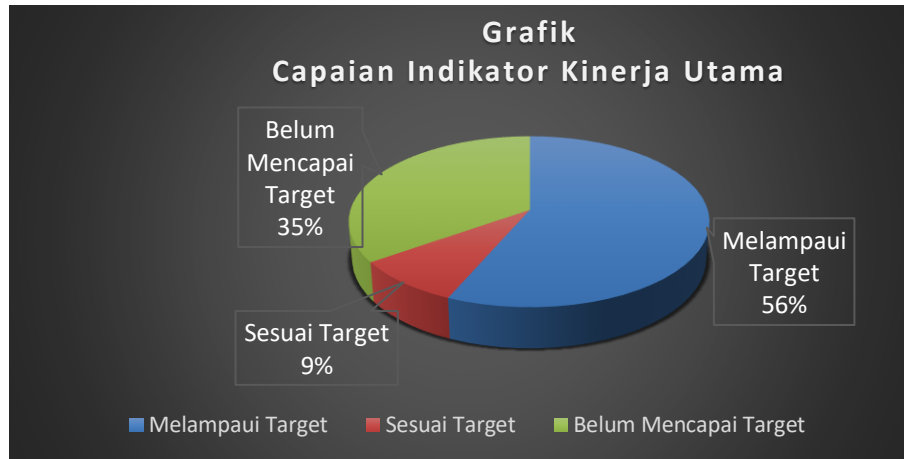
1. Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tahun keempat RPJMD 2021 – 2026 menganalisa dan mengukur 9 sasaran

dengan 23 indikator kinerja sasaran dengan realisasi sebagai berikut:

- a. Sebanyak 7 sasaran atau sebesar 77,78 % dengan Capaian Kinerja Melampaui Target.
- b. Sebanyak 1 sasaran atau sebesar 11,11 % dengan Capaian Kinerja Sangat Baik.
- c. Sebanyak 1 Sasaran atau 11,11% dengan capaian Kinerja Baik



2. Interpretasi kategori pengukuran indikator kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Sebanyak 13 Indikator Kinerja Utama atau 56,52 % dengan kategori Melampaui Target.
 - b. Sebanyak 2 Indikator Kinerja Utama atau 8,70 % dengan kategori Mencapai Target.
 - c. Sebanyak 8 Indikator Kinerja Utama atau 34,78 % dengan kategori Belum Mencapai Target.



3. Kategori dan nilai capaian pada pengukuran 9 Sasaran sebagai berikut :

a. Sasaran dengan kategori Melampaui Target (MT), (nilai diatas 100)

1. Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap perekonomian daerah, dengan capaian 139,05%;
2. Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru, dengan capaian 100,11 %;
3. Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat Kutai Barat, dengan capaian 127,56 %
4. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, dengan capaian 102,19 %;
5. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, dengan capaian 100,06 %
6. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah dengan capaian 102,99 %
7. Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan dengan Capaian 111,09 %

b. Sasaran dengan kategori Sangat Baik (SB), (nilai 85,00 - 100)

1. Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup, dengan capaian 99,33 %

c. Sasaran dengan kategori Baik (B), (nilai 70,00 – 84,99)

1. Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Insfrastruktur Dasar, dengan capaian 75,47 %

Selanjutnya dilihat dari sisi Akuntabilitas Kinerja Keuangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Kabupaten Kutai Barat setelah perubahan APBD 2022 yang ditargetkan berjumlah Rp. 2.666.243.589.708,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.759.277.049.254,21 atau naik sebesar 12,32 %.
2. Total Anggaran Belanja yang ditargetkan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.171.727.827.870,00 Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.348.182.915.987,76 atau persentase penyerapan belanja sebesar 74,03 %.
3. Pada Belanja operasi yang ditargetkan sebesar Rp. 1.912.229.230.574,00 terealisasi Rp. 1.462.185.343.006,76 atau 76,46 %.
4. Belanja Modal ditargetkan sebesar Rp 805.220.708.122,00 terealisasi sebesar 511.213.955.568,00 atau 63,49 %.
5. Belanja Tidak Terduga ditargetkan sebesar Rp. 90.570.049.000,00 terealisasi Rp. 13.599.618.693,00 atau 15,02 %
6. Belanja Transfer ditargetkan Rp. 363.707.840.174,00,00 realisasi Rp. 361.183.998.720,00 atau 99,31%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM.....	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN	4
D. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT	16
E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	43
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	45
2.1 RENCANA STRATEGIS	45
2.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021	54
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	55
2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	57
2.5 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021	59
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	47
3.1 REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI	
SAKIP TAHUN 2022.....	61
3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	65
3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISA KINERJA SASARAN	
STRATEGIS	71
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	76
ANALISIS CAPAIAN SASARAN	
SASARAN 1	80

SASARAN 2	101
SASARAN 3	113
SASARAN 4	119
SASARAN 5	129
SASARAN 6	139
SASARAN 7	144
SASARAN 8	178
SASARAN 9	190
3.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA....	200
3.6 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	203
BAB IV PENUTUP	206
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah.....	6
Tabel 1.2 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Kampung	18
Table 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	20
Tabel 1.4 Luas Wilayah, Jumlah KK, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan.....	20
Tabel 1.5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2019-2022	23
Tabel 1.6 PDRB Atas Dasar arga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah).....	24
Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2022 (Persen).....	28
Tabel 1.8 Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022	32
Tabel 1.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018-2022	33
Tabel 1.10 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabuupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022.....	34
Tabel 1.11 Rincian Jumlah Pegawai/ASN dan Non ASN/PTT.....	40
Tabel 1.12 Rincian Jumlah Pegawai/ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 Berdasarkan Golongan Ruang dan Gender	40
Tabel 1.13 Rincian Jumlah Eselon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2022	41
Tabel 1.14 Rincian Jumlah Pegawai/ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 Berdasarkan Pendidikan.....	41

Tabel 1.15 Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 Berdasarkan Pendidikan.....	42
Tabel 1.16 Data Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Tenaga Kependidikan (GURU) Tahun 2022	42
Tabel 1.17 Data Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Tenaga ADM Penyelenggaraan Kependidikan Tahun 2022.....	43
Tabel 2.1 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah	47
Tabel 2.2 Janji Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	49
Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026	52
Tabel 2.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026	56
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021	58
Tabel 2.6 Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021	59
Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Per Indikator Sasaran Tahun 2021	60
Tabel 3.1 Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022..	62
Tabel 3.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja Indikator Dalam Skala Pengukuran Ordinal	67
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 2022.....	67
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022.....	68
Tabel 3.5 Jumlah Indikator Per Sasaran	72
Tabel 3.6 Rekapitulasi Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 2022	73

Tabel 3.7 Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022	74
Tabel 3.8 Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2022	76
Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 2022	77
Tabel 3.10 Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022	78
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Meningkatnya Peran Sektor Unggulan Daerah Terhadap Perekonomian (PDRB) Tahun 2022	81
Tabel 3.12 Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	83
Tabel 3.13 Nilai DRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	85
Tabel 3.14 Jumlah Cakupan Penyediaan Sarana Pertanian	87
Tabel 3.15 Jumlah Cakupan Penyediaan Prasarana Pertanian	87
Tabel 3.16 Data Perkembangan Populasi Ternak	88
Tabel 3.17 Produksi Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018- 2022	91
Tabel 3.18 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Usaha dan Kecamatan Tahun 2022	92
Tabel 3.19 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Usaha dan Kecamatan Tahun 2022	93
Tabel 3.20 Jumlah Wisatawan Kutai Barat 2017-2022	97
Tabel 3.21 Jumlah Tempat Wisata, Pengunjung dan Rata-Rata Tarif Masuk.....	97
Tabel 3.22 Realisasi Kinerja Sasaran 1 Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD.....	100

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal Baru	101
Tabel 3.24 Data Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2022	104
Tabel 3.25 Pencari Kerja, Lowongan dan Penempatan Menurut Kelompok Pendidikan Tahun 2022.....	105
Tabel 3.26 Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil.....	106
Tabel 3.27 Realisasi Kinerja Sasaran 2 Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD.....	112
Tabel 3.28 Capaian Kinerja Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat Kutai Barat.....	113
Tabel 3.29 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah).....	116
Tabel 3.30 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Persen).....	117
Tabel 3.31 Realisasi Kinerja Sasaran 3 Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD.....	118
Tabel 3.32 Capaian Kinerja Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup	119
Tabel 3.33 Realisasi Kinerja Sasaran 4 Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD.....	128
Tabel 3.34 Capaian Kinerja Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat Tahun 2022.....	129
Tabel 3.35 Perkembangan Capaian Rata-rata Lama Sekolah	131
Tabel 3.36 Perkembangan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat.....	133
Tabel 3.37 Realisasi Kinerja Sasaran 5 Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD	138
Tabel 3.38 Capaian Kinerja Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat Tahun 2022	139

Tabel 3.39 Perkembangan Capaian Usia Harapan Hidup	140
Tabel 3.40 Realisasi Kinerja Sasaran 6 Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD	143
Tabel 3.41 Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	144
Tabel 3.42 Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat Daerah	146
Tabel 3.43 Saran dan Rekomendasi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	147
Tabel 3.44 Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.....	151
Tabel 3.45 Nilai AKIP Kabupaten Kutai Barat Dari 2018-2022	154
Tabel 3.46 Rincian Penilaian Evaluasi Periode 2018-2022 AKIP Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.....	154
Tabel 3.47 Hasil Audit BPK Terhadap Pemeriksaan Keuangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017-2021	158
Tabel 3.48 Tabel Nilai Evaluasi LPPD (EKPPD) 2017-2020.....	162
Tabel 3.49 Nilai LPPD Kabupaten Kutai Barat Dari 2017-2020.....	163
Tabel 3.50 Progres Perkembangan Kampung Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2022.....	167
Tabel 3.51 Progres Perkembangan Kampung Per Kecamatan.....	167
Tabel 3.52 IPG Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022	173
Tabel 3.53 Realisasi Indikator IPG	174
Tabel 3.54 Realisasi Kinerja Sasaran 7 Dibandingkan Target Akhir RPJMD.....	176
Tabel 3.55 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar dari 3 Indikator Kinerja	178
Tabel 3.56 Cakupan Layanan Air Minum Sistem Perpipaan Perunit Pengolah (WTP, IKK)	180

Tabel 3.57 Data Yang Terfasilitasi SAB.....	181
Tabel 3.58 Perkembangan Realisasi Dari Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak.....	182
Tabel 3.59 Rasio Elektrifikasi Kabupaten Kutai Barat.....	184
Tabel 3.60 Perkembangan Realisasi Dari Indikator Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	186
Tabel 3.61 Data Luas Kawasan Permukiman Kumuh dan Jumlah RTLH	186
Tabel 3.62 Data Jumlah Rumah.....	187
Tabel 3.63 Data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni.....	188
Tabel 3.64 Realisasi Kinerja Sasaran 8 Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD.....	189
Tabel 3.65 Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Masyarakat	190
Tabel 3.66 Panjang Jalan di Kabupaten Kutai Barat Menurut Status Tahun 2022	192
Tabel 3.67 Rekapitulasi Kondisi Jalan Di Kabupaten.....	193
Tabel 3.68 Perkembangan Realisasi Dari Indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Kutai Barat Dalam Kondisi Mantap	193
Tabel 3.69 Rekap Data Kekuatan Signal Tahun 2019-2022.....	196
Tabel 3.70 Perkembangan Realisasi Dari Indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Kutai Barat	197
Tabel 3.71 Realisasi Kinerja Sasaran 9 Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD.....	199
Tabel 3.72 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	201
Tabel 3.73 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Program dan Kegiatan.....	204

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Kutai Barat Setelah Pemekaran Berdasarkan Topografi	17
Grafik 1.2 Persentase PDRB Kabupaten Kutai Barat Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2022.....	26
Grafik 1.3 Persentase PDRB Kabupaten Kutai Barat Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2022.....	27
Grafik 1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Barat	29
Grafik 1.5 PDRB Per Kapita Kutai Barat.....	31
Grafik 1.6 Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku .	32
Grafik 1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Barat.....	34
Grafik 1.8 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	35
Grafik 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	71
Grafik 3.2 Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja.....	75
Grafik 3.3 Perbandingan PDRB Sektor Pertanian.....	84
Grafik 3.4 Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Arti Luas.....	86
Grafik 3.5 Produksi Perikanan Kabupaten Kutai Barat	92
Grafik 3.6 PDRB Sektor Pariwisata (Persen)	96
Grafik 3.7 PDRB Sektor Pariwisata (Juta Rupiah)	96
Grafik 3.8 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka	103
Grafik 3.9 Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil	107
Grafik 3.10 Perkembangan PDRB Perkapita.....	114
Grafik 3.11 Perkembangan Capaian Rata-rata Lama Sekolah.....	131
Grafik 3.12 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah	133
Grafik 3.13 Jumlah Sekolah di Kabupaten Kutai Barat	135

Grafik 3.14 Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional	141
Grafik 3.15 Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020-2022	151
Grafik 3.16 Hasil Akip Kabupaten Kutai Barat	154
Grafik 3.17 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun 2017-2020	163
Grafik 3.18 Realisasi Indikator IPG Kabupaten Kutai Barat	174
Grafik 3.19 Perkembangan Realisasi Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak.....	182
Grafik 3.20 Rasio Elektrifikasi Kabupaten Kutai Barat	184
Grafik 3.21 Perkembangan Realisasi Indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Kutai Barat Dalam Kondisi Mantap	194
Grafik 3.22 Perkembangan Realisasi Indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi	197

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Kutai Barat	16
---------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan Pemerintahan daerah yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang pada intinya mengharuskan Pemerintah Kabupaten beserta perangkatnya untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atau menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** sebagai laporan yang merupakan kewajiban pelaporan pelaksanaan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun

anggaran. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Sebagai penjabaran dari Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Pemerintah membuat petunjuk teknis (juknis) Sistem AKIP berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 ini disusun sehubungan dengan komponen dari Sistem AKIP yakni pelaporan kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Penyusunan LKjIP Tahun 2022 Kabupaten Kutai Barat berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian LKjIP Kabupaten Kutai Barat menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi dan Kepada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) yang telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2022 yaitu RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026.

B. DASAR HUKUM

Pelaksanaan Penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 dilandasi oleh beberapa ketentuan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5395);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permenpan No 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikiator Kinerja Utama (IKU)
10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 221);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 Nomor 22, Tambahan Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 21);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)” kepada Presiden. Dengan demikian maka penyusunan LKjIP ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara periodik, diukur dengan seperangkat

indikator kinerja non-keuangan (*performance indicator*) dan menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden yang proses penyusunannya telah dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Tujuan

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan masyarakat).
- Sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Organisasi Pemerintah serta meminimalkan peluang terciptanya korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah.
- Sebagai alat kendali dan sarana untuk menilai kinerja sehingga dapat mendorong terwujudnya *good governance* yang memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah serta partisipasi masyarakat.

3. Permasalahan Pembangunan

3.1 Permasalahan Umum

Setiap daerah pasti menghadapi berbagai permasalahan dalam pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah bersifat dinamis, baik yang disebabkan faktor internal maupun eksternal, terlebih daerah yang tergolong masih baru seperti Kabupaten Kutai Barat. Permasalahan umum yang masih dihadapi oleh Kabupaten Kutai Barat dalam pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan antara lain:

Tabel 1.1
PEMETAAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2020, LPE Kab. Kutai Barat berada pada posisi -2,92.	Kondisi pandemi ini menyebabkan lesunya ekonomi masyarakat.	Masifnya penyebaran kasus Covid-19 di Kutai Barat dengan kasus terkonfirmasi sejumlah 7.033 jiwa (Agustus 2021) dan 235 jiwa meninggal. Untuk menekan penyebaran tersebut, diberlakukan pembatasan kegiatan dan pergerakan masyarakat.
		Sektor ekonomi penopang utama PDRB seperti sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan -3,67%.	Harga Komoditi pertambangan dan penggalian yang terpengaruh oleh kondisi ekonomi dunia.
		Sektor pertanian dalam arti luas yang pada tahun 2020 juga menunjukkan pertumbuhan negative sebesar -1,99%.	Peremajaan perkebunan masih kurang optimal karena tingginya biaya peremajaan. Ketersediaan benih unggul masih kurang. agroindustri Sumber Daya Lokal di Kabupaten Kutai Barat Belum mampu dikelola secara sinergis, inovatif berdaya saing nasional. Belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas. Belum optimalnya dukungan sarana prasarana dalam pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas.
		Belum optimalnya kontribusi sektor Perdagangan dan jasa.	Masih tingginya ketergantungan terhadap komoditi strategis dari luar daerah. Masih minimnya pelaku UMKM yang diberdayakan. Sektor pariwisata belum terkelola secara optimal, sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata masing kurang.
		Belum optimalnya kontribusi sektor.	lingkungan perairan sebagai media Sumber daya perikanan Mengalami penurunan Kualitas. Budidaya perikanan keramba dan kolam belum optimal.
2	Angka Kemiskinan menunjukkan trend meningkat sejak 5 tahun terakhir. Di tahun 2020, angka kemiskinan sebesar 9,29% urutan tertinggi ke-3 setelah	Masih tingginya angka pengangguran. Tahun 2019 sebesar 5,08% dan meningkat 0,22% dari tahun 2018. Tahun 2020, belum ada data di BPS.	Lulusan masih belum sesuai dengan kebutuhan tempat kerja. Pencari kerja didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan maksimal SLTA. Angkatan kerja sebagian besar berasal dari perdesaan. Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja. Belum berkembangnya sarana dan prasarana pelatihan Balai Latihan Kerja yang dapat membekali keterampilan

	Mahakam Ulu dan Kutai Timur. <i>Sumber: BPS Kaltim.</i>		penduduk sebelum bekerja.
		Sebagian besar penduduk masih menggantungkan penghasilan usahanya di sub-sektor pertanian dengan nilai tambah yang relatif kecil.	Penyuluh PPL kerja belum maksimal untuk pertanian. Kurangannya inovasi di bidang pertanian dan perkebunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.
		Ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini di tunjukkan dari Indeks Gini yang meningkat selama 3 tahun terakhir Tahun 2020 sebesar 0,338 meningkat 0,004 dari tahun 2019.	Pusat-pusat perekonomian masih berada dekat dari lingkup ibu kota kabupaten. Masih kurangnya akses pasar pelaku ekonomi, terutama pelaku ekonomi ditingkat pedesaan.
			Menurunnya pengeluaran perkapita penduduk Kutai Barat. Tahun 2020 menempati urutan terendah ke-2 se-Provinsi Kalimantan Timur (9.712 Ribu Rp / Kapita / Tahun). * <i>Sumber: BPS Kaltim.</i>
3	Pemenuhan kebutuhan primer Masyarakat (Air Minum, Sanitasi, listrik, rumah layak huni serta akses jalan dan jembatan dan telekomunikasi) belum optimal.	Masih terdapat 6,26% rumah tangga di Kutai Barat yang pada tahun 2020 belum memiliki Listrik. (<i>Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2020</i>).	Kondisi geografis Kutai Barat yang mengakibatkan sulitnya penyaluran listrik (terutama listrik negara) ke daerah-daerah pelosok.
		Belum optimalnya penuntasan jalan konektivitas yang menghubungkan antar kampung serta sistem drainase di kawasan Perkotaan Sendawar.	Dari 1.286,97 Km jalan yang menjadi tanggungjawab kabupaten di tahun 2020, jalan mantap sebesar 55,7%. Selain ruas jalan konektivitas, infrastruktur Kawasan permukiman juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Belum optimalnya keterhubungan jaringan jalan yang menghubungkan antar kampung.
		Belum optimalnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum.	Masih terdapat permukiman kumuh dengan luasan 1045,63 Ha dan terdapat rumah tidak layak huni sejumlah 10.652 Unit. Biaya operasional PDAM masih tinggi untuk biaya produksi (untuk bahan kimia), dan memerlukan sumber air baku lain selain sungai Mahakam. Jaringan pipa distribusi primer, sekunder, tersier dan sambungan rumah belum mencakup seluruh wilayah dalam cakupan layanan PDAM. Akses air minum layak baru mencapai 67,37% melalui jaringan perpipaan (PDAM) dan Non PDAM serta 4,82% melalui Jaringan non perpipaan. Masih terdapat 27,81% yang belum memperoleh akses terhadap air minum layak. Akses terhadap layanan pengelolaan air limbah layak sebesar 77,1%, akses Belum Layak 5,92% dan masih melakukan BABS (tanpa akses)15,44%. Sedangkan akses Aman Air Limbah baru mencapai 1,54%.

			<p>(Sumber: website Monev STBM 2020, diolah).</p> <p>Capaian Pengelolaan Persampahan masih rendah. Capaian penanganan sampah sebesar 51,5% (dalam wilayah Perkotaan Sendawar dan sekitarnya), sedangkan capaian pengurangan sampah masih 0%. Pengelolaan sampah masih terpusat di TPA, belum ada aktivitas pengurangan dan pemilahan sampah mulai dari titik lokasi timbulnya sampah.</p> <p>Masih rendahnya luas lahan pertanian yang mendapat layanan irigasi. Rasio jaringan irigasi 9.127 m terhadap luas lahan budidaya pertanian 2.570 Ha pada tahun 2020 sebesar 3,55.</p> <p>Lokasi pembangunan prasarana irigasi belum terkoneksi langsung dengan lahan pertanian.</p> <p>Belum tersedianya database (peta lahan pertanian, daerah irigasi dan sawah beririgasi).</p>
		Masih adanya desa/titik area blank spot.	<p>Kurang optimalnya koordinasi sektor pertanian dan sektor sumber daya air.</p> <p>Kewenangan untuk menambah tower dan BTS bukan berada di tangan Pemerintah daerah.</p>
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kutai Barat masih rendah. Tahun 2020, menduduki peringkat terendah ke-2 se Kalimantan Timur (71,19). *Sumber: BPS Kaltim.	Masih rendahnya usia harapan hidup. Pada tahun 2020 menempati urutan ke-6 se-Provinsi Kalimantan Timur (72,86). *Sumber: BPS Kaltim.	<p>Kualitas Jaringan telekomunikasi di beberapa area perlu ditingkatkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus Stunting/gizi buruk masih tinggi. 2. Jumlah Kasus Penyakit Menular Masih tinggi. 3. Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabet, ODGJ) masih ada dan cenderung meningkat. 4. Masih kurangnya Tenaga Kesehatan terutama pada faskes dikampungkampung dan terbatasnya dokter-dokter spesialis. 5. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kesehatan, terutama ketersediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan di Rumah sakit dan faskes faskes tingkat kampung. 6. Prilaku sosial masyarakat yang masih menggunakan sungai sebagai tempat untuk BAB dan pembuangan limbah rumah tangga. 7. Penduduk di sekitar sungai yang masih menjadikan air sungai sebagai sumber air bersih, sehingga menimbulkan berbagai penyakit. 8. Sistem Pelayanan Rumah Sakit yang belum maksimal, terutama ketersediaan ruang perawatan medis, ICU dan sarana kesehatan rumah sakit lainnya termasuk Sistem Informasi Pelayanan Rumah Sakit. 9. Kurangnya sarana sanitasi dan air bersih rumah tangga, yang

		menyebabkan tingginya kasus penyakit yang diakibatkan dari faktor kebersihan.
		10. Permasalahan lingkungan hidup seperti kesadaran masyarakat terkait kebersihan dan pengelolaan limbah dan sampah yang belum optimal.
	Rata-rata lama sekolah masih sangat rendah. Tahun 2020 menempati urutan ke 3 terendah se Provinsi Kalimantan timur (8,47). *Sumber : BPS Kaltim.	1. Sarana dan prasarana pendidikan masih sangat terbatas, termasuk di dalamnya ketersediaan guru. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas proses belajar-mengajar.
		2. Pasokan listrik yang tidak mencukupi ikut mengganggu proses belajar dan mengajar.
		3. Belum meratanya tenaga pendidik diikuti dengan masih rendahnya tingkat sertifikasi tenaga kependidikan.
		4. Pengembangan nilai, keragaman, dan kekayaan adat budaya masih belum tertangani secara optimal dan sistematis.
		5. Faktor ekonomi ikut mempengaruhi kemauan anak-anak usia sekolah untuk belajar. Lebih banyak anak-anak usia sekolah ikut membantu orang tuanya Bekerja.

Sumber : RPJMD Kab. Kutai Barat 2021-2026

3.2 Permasalahan Khusus (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan).

1. Urusan Pendidikan

- Angka putus sekolah tinggi pada jenjang SMA dan SMK karena faktor ekonomi dan akses (geografis, sarana transportasi).
- Rendahnya kualitas pendidikan mengacu pada hasil UAS SD dan SMP.
- Banyak guru yang belum berpendidikan S1 dan guru PTT yang berlatar belakang pendidikan non-keguruan.
- Sarana Pendukung Kurang (lab, buku, alat peraga dan lain-lain).

2. Urusan Kesehatan

- Rasio pelayanan Rumah Sakit yang belum merata.
- Ketersediaan tenaga kesehatan yang belum memenuhi standar nasional.
- Kekosongan obat, proses lelang baru dimulai pada bulan juni.
- Jumlah tenaga kesehatan pada pustu terlatih masih kurang

(terlatih APN, MTBS, BBLR, SDIDTK, dsb).

- Jumlah pengelola program promkes masih kurang.
- Sebagian pengelola program promkes di PKM belum mengetahui uraian tugas sebagai penyuluh.
- Kondisi gedung Rumah Sakit banyak yang tidak sesuai persyaratan.
- Masih ada peralatan canggih yang belum beroperasi karena SDM belum Bersertifikasi
- Pervalensi penyakit tidak menular yang terus meningkat.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Konektivitas di daerah tertinggal dan antar kawasan masih terbatas.
- Aksesibilitas antar kampung, kecamatan dan pusat kegiatan ekonomi belum maksimal.
- Alih fungsi lahan tinggi dan konversi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- Belum efektifnya penataan ruang sebagai alat untuk mengembangkan wilayah yang dapat mengakomodasikan kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, lintas pelaku pembangunan dan lintas sumber pembiayaan.
- Cakupan layanan infrastruktur dasar untuk air minum dan air limbah dan perumahan permukiman belum 100% memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Penyediaan layanan air minum layak dan layanan sanitasi untuk air limbah dan persampahan (sesuai target SPM berdasarkan Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota) serta listrik bagi masyarakat belum dapat berjalan secara optimal.
- Sistem irigasi pertanian belum dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Pemerintah Daerah sudah membangun system irigasi. Data menunjukkan DAK Penugasan selama tahun 2017, 2018 dan 2019 selalu ada pembangunan atau pemeliharaan jaringan irigasi, akan tetapi

belum dapat dioptimalkan penggunaan oleh masyarakat dikarenakan ada beberapa titik area pertanian/perkebunan/sawah yang jauh dari jaringan irigasi sehingga perlu ada sinkronisasi/pembaharuan data arean pertanian/perkebunan/persawahan.

4. Urusan Perencanaan dan Pembangunan

- Sinkronisasi perencanaan pembangunan belum terlaksana secara optimal.
- Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah masih lemah.
- Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD masih belum berjalan beriringan.
- Kegiatan penelitian yang berkaitan dengan pembangunan dan inovasi daerah masih belum berkembang.
- Kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah masih sangat terbatas.

5. Urusan Perumahan dan Permukiman

- Masih terdapat penduduk yang bertempat tinggal di hunian tidak layak.
- Pembenahan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni masih belum berjalan optimal.
- Masih terjadi backlog perumahan.

6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Angka kriminalitas yang cukup tinggi.
- Jumlah demonstrasi yang anarkis masih cukup tinggi.
- Angka penyalahgunaan narkoba yang cukup besar.

7. Urusan Sosial

- Belum optimalnya Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

8. Urusan Ketenagakerjaan

- Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka.
- Masih tingginya angka pengangguran terdidik.

- Masih rendahnya kualitas tenaga kerja
- Belum optimalnya fungsi sarana hubungan industrial.

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Capaian IPG dan IDG yang belum optimal.
- Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang belum optimal.

10. Urusan Pangan

- Belum optimalnya pemerataan pemanfaatan hasil produksi pangan pada musim panen dan paceklik.
- Belum optimalnya nilai PPH (Pola Pangan Harapan) masyarakat Kutai Barat.
- Masih terdapat desa rawan pangan Kutai Barat
- Rendahnya pengawasan pangan yang beredar.

11. Urusan Pertanahan

- Belum semua bidang tanah memiliki kepastian hukum.
- Masih terjadinya sengketa dan konflik pertanahan.

12. Urusan Lingkungan Hidup

- Permasalahan alih fungsi lahan yang memicu konflik sosial (hutan menjadi perkebunan dan pertambangan).
- Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam memelihara Kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan masih tingginya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam.
- Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah.
- Belum tercapainya gungsi kawasan lindung secara optimal.

13. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Kepemilikan dokumen kependudukan (terutama akta kelahiran, akta kematian dan akta perkawinan) oleh penduduk terutama pada keluarga miskin masih rendah.

14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program-program pemberdayaan masyarakat.
- Kapasitas dan peran kelembagaan pemberdayaan masyarakat

masih relatif rendah.

15. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Ketahanan Keluarga. Rapuhnya ketahanan penyebab berbagai permasalahan keluarga seperti kasus perceraian dan KDRT.
- Distribusi penduduk yang tidak merata.

16. Urusan Perhubungan

- Belum adanya pelabuhan besar untuk angkutan air.
- Belum adanya terminal tipe B/C yang representatif.

17. Urusan Komunikasi & Informatika

- Kurangnya integrasi berbagai interface pelayanan publik.

18. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Rendahnya daya saing koperasi dibanding pelaku usaha non koperasi.
- Rendahnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia.
- Masih adanya koperasi yang tidak aktif.
- Masih belum optimalnya kontribusi UKM dalam perekonomian daerah.
- Daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah lebih rendah dibanding barang luar.
- Inovasi produksi, proses masih kurang.
- Kemitraan dengan lembaga keuangan dalam pembiayaan belum terwujud.

19. Urusan Penanaman Modal

- Rendahnya Investasi baik PMA maupun PMDN.
- Penyebaran investasi antar kecamatan yang tidak merata.

20. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- Minimnya sarana olahraga.
- Belum optimalnya layanan pendidikan keolahragaan.
- Belum optimalnya pembudayaan olahraga.
- Belum optimalnya pengembangan kapasitas/pemberdayaan kaum muda yang berkontribusi pada pembangunan.

21. Urusan Statistik

- Penyediaan data untuk analisis belum memadai.

22. Urusan Kebudayaan

- Masih banyaknya cagar budaya dan warisan budaya yang belum tertangani secara optimal.
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya.
- Minat masyarakat untuk berkunjung ke museum masih rendah karena daya tarik dan promosi yang kurang serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya museum.
- Belum optimalnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, bahasa, seni dan tradisi luhur.

23. Urusan Perpustakaan

- Rendahnya minat baca masyarakat.
- Belum optimalnya pinjam silang antar perpustakaan.

24. Urusan Kearsipan

- Penyelenggaraan kearsipan dan pemanfaatan arsip yang belum optimal.

25. Urusan Persandiaan

- Jumlah sandiman yang belum optimal (ketersediaan SDM sandi yang berkualifikasi terbatas).

26. Urusan Perikanan

- Masih tingginya illegal Fishing (penggunaan Racun, Setrum).
- Belum ada pelabuhan ikan dan penampungan.
- Belum optimalnya kapasitas SDM dan kelembagaan perikanan.
- Penyediaan kebutuhan ikan di Kutai Barat masih banyak dipasok dari luar daerah.
- Konsumsi ikan di masyarakat Kutai Barat relatif rendah dibanding tingkat nasional.

27. Urusan Pariwisata

- Kurangnya Produk Wisata Berkelas Dunia.
- Pengeluaran wisatawan masih rendah.
- Lama tinggal wisatawan yang masih rendah.
- Objek daya tarik wisata belum optimal dikembangkan.

- Sarana prasarana pendukung pariwisata masih terbatas.
- Belum memiliki ikon wisata yang mampu bersaing dengan Kabupaten lain.
- Kesiapan masyarakat sebagai tuan rumah masih perlu ditingkatkan.

28. Urusan Pertanian

- Keterbatasan Kapasitas SDM Pertanian.
- Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) belum optimal.
- Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
- Produksi dan produktivitas pertanian masih rendah.
- Sektor pertanian belum terkait dengan industri pengolahan.
- Tenaga penyuluh pertanian masih terbatas.
- Dukungan subsistem agribisnis masih belum tersedia (penyediaan bibit, budidaya, pemasaran dan permodalan).

29. Urusan Kehutanan

- Masih terdapat lahan kritis di kawasan hutan.
- Masih terjadi kerusakan hutan.
- Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan lain yang tidak berizin.

30. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- Belum optimalnya penyediaan listrik di Kampung.
- Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan.
- Belum optimalnya konversi energi.

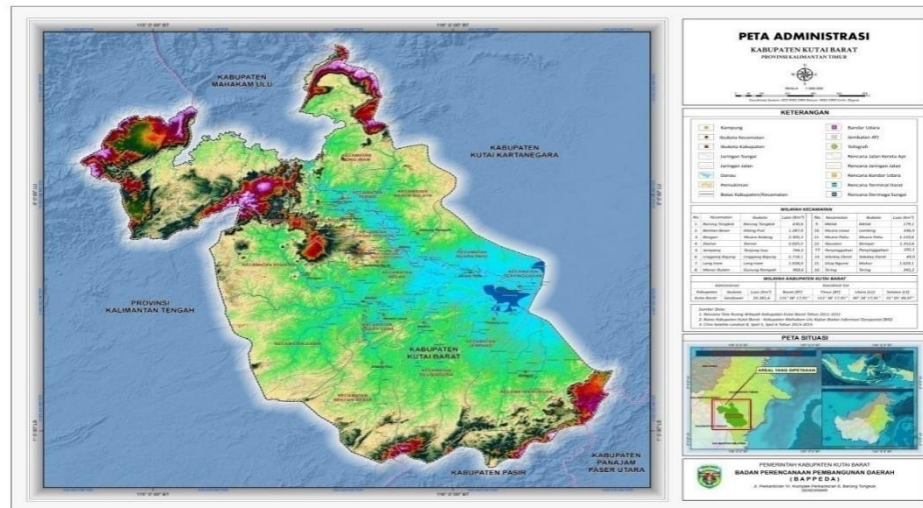
31. Urusan Perdagangan

- Persaingan usaha sektor perdagangan sangat kompetitif, dan memarginalisasi pelaku skala kecil.
- Masih rendahnya nilai ekspor.
- Jejaring pasar keluar wilayah Kabupaten belum terbentuk.
- Kerjasama dengan berbagai stakeholder masih kurang.

D. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

1. Kondisi Geografi

Gambar 1.1
PETA KABUPATEN KUTAI BARAT



Sumber : Bappeda Litbang Kab. Kutai Barat

Kabupaten Kutai Barat dengan ibukota Sendawar terletak di bagian barat daya Provinsi Kalimantan Timur dan merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi dan Kabupaten lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu dari Kabupaten Kutai Barat, secara langsung luas wilayah Kabupaten Kutai Barat berkurang menjadi sekitar 20.381,59 Km² atau kurang lebih mencapai 16,06% dari keseluruhan luas Propinsi Kalimantan Timur.

Secara geografis Kabupaten Kutai Barat terletak antara 114°45'49"-116°32'43" Bujur Timur dan 00°37'30" Lintang Utara dan 1°09'33" Lintang Selatan.

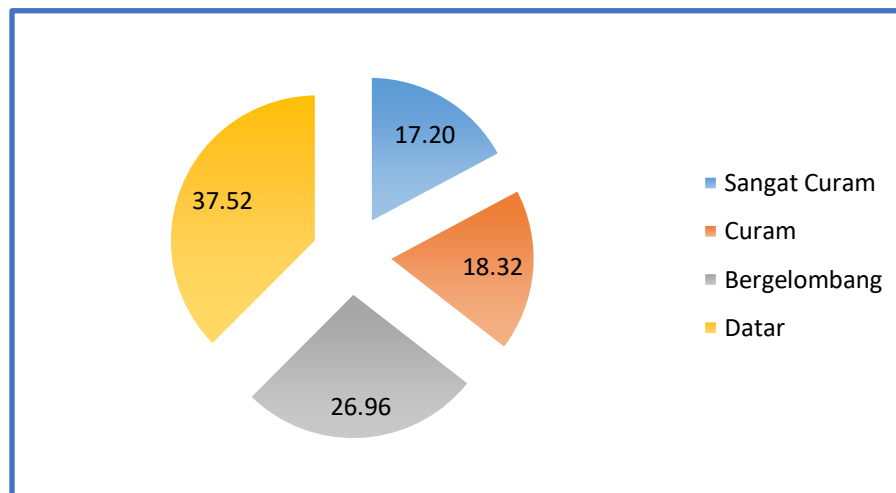
Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kutai Barat memiliki batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Hulu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara

- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2013, Kabupaten Kutai Barat memiliki wilayah seluas 20.381.59 Km². Didominasi oleh topografi datar sampai dengan bergelombang sedang yakni sebesar 46,48 %, topografi sangat curam (17,20%) dan curam (18,32%). Wilayah dengan topografi pegunungan mencapai 350.653,07 hektar atau kurang dari 18% dari luas seluruhnya dan berada di bagian Utara dan Selatan Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana pada Grafik 1.1.

Grafik 1.1
**LUAS WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT SETELAH PEMEKARAN
BERDASARKAN TOPOGRAFI**



Sumber : Bapelitbangda Kab. Kutai Barat

Wilayah berbukit dan bergunung dijumpai di Kecamatan Bongan kawasan gunung Meratus, Kecamatan Linggang Bigung bagian Barat dan Utara, dan Kecamatan Long Iram bagian Utara.

Secara Klimatologi wilayah Kabupaten Kutai Barat terbagi menjadi 4 tipe daerah hujan yaitu:

- 1) Kawasan dengan curah hujan antara 2.000 - 2.500 mm/tahun. Kawasan ini terletak pada ujung bagian timur Kabupaten Kutai Barat di sepanjang wilayah Kecamatan Penyinggahan, Tanjung Isui dan Muara Kedang;

- 2) Kawasan dengan curah hujan antara 2.500 - 3.000 mm/tahun. Kawasan ini terletak di bagian tengah meliputi daerah sekitar Kecamatan Melak, Muara Pahu, Damai, Muara Lawa, Jempang dan Bongan;
- 3) Kawasan dengan curah hujan antara 3.000 - 3.500 mm/tahun. Kawasan ini terletak di sebelah barat Melak meliputi Kecamatan Barong Tongkok sampai bagian selatan Kecamatan Barong Tongkok;
- 4) Kawasan dengan curah hujan antara 3.500 - 4.000 mm/tahun. Kawasan ini terletak di wilayah Kecamatan Long Iram meliputi daerah sekitar Kecamatan Long Iram;

Setelah pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu, saat ini Kabupaten Kutai Barat terdiri dari 16 Kecamatan, 190 Kampung dan 4 Kelurahan. Kecamatan dengan jumlah kampung terbanyak ialah Kecamatan Barong Tongkok yang terdiri dari 19 Kampung. Adapun nama kecamatan, jumlah kampung dan kelurahan dapat dilihat lebih jelasnya pada tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
**JUMLAH KECAMATAN, KELURAHAN DAN KAMPUNG
DI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kampung
1	Long Iram	-	11
2	Melak	2	6
3	Barong Tongkok	2	19
4	Damai	-	17
5	Muara Lawa	-	8
6	Muara Pahu	-	12
7	Jempang	-	12
8	Bongan	-	16

9	Penyinggahan	-	6
10	Bentian Besar	-	9
11	Linggang Bigung	-	11
12	Nyuatan	-	10
13	Siluq Ngurai	-	16
14	Mook Manaar Bulatn	-	14
15	Tering	-	15
16	Sekolaq Darat	-	8
Jumlah		4	190

Sumber : Bagian Pemerintahan Setdakab. Kutai Barat, 2022

2. Kondisi Demografis

Penduduk merupakan pelaku sekaligus sasaran pembangunan sehingga data penduduk merupakan data pokok yang perlu diketahui karakteristiknya (kuantitas, distribusi, komposisi dan kualitas) untuk mengetahui potensi maupun kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menuju subyek yang berkualitas. Penduduk mempunyai kedudukan yang strategis dalam pembangunan daerah yaitu sebagai subyek pembangunan dan juga sebagai obyek pembangunan.

Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan.

Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Barat Semester II Tahun 2022 menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercatat sebanyak **175.610 jiwa**, Jumlah penduduk ditahun 2022 ini ada peningkatan dibanding tahun 2021 yang jumlah penduduknya sebanyak 170.871 jiwa.

Berikut disajikan pada tabel 1.3 jumlah penduduk Kutai Barat Semester II Tahun 2022 masing-masing Kecamatan berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 1.3
**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN
SEMESTER II TAHUN 2022**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Long Iram	3.941	3.477	7.481
2	Melak	8.136	7.629	15.765
3	Barong Tongkok	17.831	16.409	34.240
4	Damai	5.882	5.234	11.116
5	Muara Lawa	3.977	3.651	7.628
6	Muara Pahu	4.623	4.152	8.775
7	Jempang	6.340	5.498	11.838
8	Bongan	6.095	5.409	11.504
9	Penyinggahan	2.089	1.896	3.985
10	Bentian Besar	1.787	1.590	3.377
11	Linggang Bigung	8.547	7.797	16.344
12	Nyuatan	3.537	3.153	6.690
13	Siluq Ngurai	3.382	2.945	6.327
14	Mook Manaar Bulatn	4.643	4.127	8.770
15	Tering	5.745	5.242	10.987
16	Sekolaq Darat	5.652	5.194	10.846
Jumlah		92.207	83.403	175.610

Sumber : *Disdukcapil Kab. Kutai Barat Semester II Tahun 2022*

Berdasarkan jenis kelamin, pada semester II Tahun 2022 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 92.207 jiwa (52,51%) sedangkan penduduk perempuan sebanyak 83.403 jiwa (47,49%). Untuk jumlah Keseluruhan ditahun 2022 ini laki-laki dan perempuan berjumlah 175.610 Jiwa.

Berikut data pada Tabel 1.4 menunjukkan luas wilayah, jumlah KK, jumlah penduduk serta kepadatan penduduk pada tiap kecamatan di Kabupaten Kutai Barat hingga Semester II Tahun 2022 :

Tabel 1.4
**LUAS WILAYAH, JUMLAH KK, PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK
MENURUT KECAMATAN TAHUN 2022**

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk / Km ²
Long Iram	1.657,95	2.407	7.481	4,51
Melak	179,11	4.982	15.765	88,02

Barong Tongkok	430,58	11.415	34.240	79,52
Damai	2.025,53	3.760	11.116	5,49
Muara Lawa	436,54	2.526	7.628	17,47
Muara Pahu	1.110,64	2.850	8.775	7,9
Jempang	744,47	3.949	11.838	15,9
Bongan	2.305,31	3.680	11.504	4,99
Penyinggahan	192,08	1.272	3.985	20,74
Bentian Besar	1.287,86	1.144	3.377	2,62
Linggang Bigung	5.718,07	5.274	16.344	2,86
Nyuatan	1.312,62	2.170	6.690	5,1
Silug Ngurai	1.629,10	2.073	6.327	3,88
Mook Manaar Bulatn	960,57	2.964	8.770	9,13
Tering	342,22	3.566	10.987	32,10
Sekolaq Darat	48,94	3.581	10.846	221,62
Kutai Barat	20.381,59	57.613	175.610	8,62

Sumber : Disdukcapil Kab. Kutai Barat Semester II Tahun 2022

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Kutai Barat pada umumnya tergolong rendah, namun demikian beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Barong Tongkok, Sekolaq Darat, Melak, Tering dan Penyinggahan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih padat di banding Kecamatan lain. Bila dilihat perbandingan antara jumlah penduduk 175.610 Jiwa dengan wilayah Kutai Barat yang memiliki luas 20.381,59 Km², maka dapat diperoleh kepadatan penduduk untuk Kabupaten Kutai Barat adalah sebesar 8,62 jiwa/km². Dari kepadatan tersebut di atas, Kecamatan Sekolaq Darat memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 221,62 jiwa/km² kemudian diikuti Kecamatan Melak dengan kepadatan 88,02 jiwa/km² dan Kecamatan Barong Tongkok sebesar 79,52 jiwa/km². Sebaliknya Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Bentian Besar dengan kepadatan penduduk 2,62 jiwa/km², diikuti Kecamatan Linggang Bigung dengan 2,86 jiwa/km² dan Silug Ngurai yang kepadatan penduduk 3,88 jiwa/km².

3. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian Kabupaten Kutai Barat di tahun 2022 relatif tidak banyak mengalami pergeseran. Pergerakan roda ekonomi ini tidak

terlepas dari situasi dan kondisi Kabupaten Kutai Barat dengan penerapan kebijakan pemerintah daerah melalui paket kebijakan yang berpedoman pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata serta terarah dan tepat sasaran, dengan selalu berlandaskan pada skala prioritas kebutuhan. Prioritas pembangunan selama Tahun 2022 pada sektor ekonomi menitikberatkan program pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada peningkatan kesejahteraan melalui usaha kecil/menengah, koperasi, dan pertanian sebagai tumpuan kehidupan sebagian besar masyarakat Kutai Barat.

Kondisi makro ekonomi Kutai Barat juga tidak terlepas dari dampak perkembangan kondisi ekonomi maupun non ekonomi. Keadaan tersebut sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional yang tercerminkan pula pada perekonomian regional di setiap Kabupaten. Beberapa indikator makro ekonomi nasional memperlihatkan perkembangan yang positif selama tahun 2022 seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita.

Dampak dari faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi bagi Kutai Barat, sebagai daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) memberi pengaruh terhadap perkembangan kondisi makro ekonomi. Dengan meningkatnya kemampuan keuangan Daerah untuk melayani masyarakat (*Public Services*), secara langsung telah menimbulkan "*Multiplier Effect*" terhadap perekonomian daerah, sehingga diharapkan pembangunan di Kutai Barat dapat lebih cepat berkembang dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat secara nyata.

3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan

kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2022 sebagai alat untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dapat dilihat pada tabel berikut. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2022 sebagai alat untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5
**PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN
MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 – 2022**

Kategori		2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.701.711,97	2 643 070,96	2 621 901,32	2 629 516,00

B	Pertambangan dan Penggalian	11.651.935,60	11 238 623,68	11 882 176,80	12 415 009,00
C	Industri Pengolahan	1.170.682,97	1 125 117,53	1 117 912,78	1 139 649,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.562,87	6 289,15	6 472,90	6 697,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.310,12	7 493,94	7 818,87	8 449,00
F	Konstruksi	2.051.425,36	1 943 891,97	2 023 802,77	2 217 842,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.490.565,15	1 505 875,67	1 546 175,04	1 640 385,00
H	Transportasi dan Pergudangan	334.342,20	316 325,71	331 627,38	373 446,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	63.577,01	59 665,52	61 672,80	66 684,00
J	Informasi dan Komunikasi	269.033,99	292 674,69	319 676,39	349 759,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	25.275,98	25 719,82	27 580,78	29 109,00
L	Real Estate	123.712,59	121 782,72	119 676,27	122 823,00
M,N	Jasa Perusahaan	11.514,38	11 078,97	11 222,04	11 820,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	833.478,21	791 404,81	827 575,28	888 107,00
P	Jasa Pendidikan	305.644,04	321 701,48	338 709,56	356 787,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	147.339,87	176 282,11	204 344,63	214 416,00
R,S,TU	Jasa lainnya	60.713,05	59 509,28	60 873,23	65 232,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		21.253.825,36	20 646 508,00	21 509 218,83	22 535 728,00

Sumber : *Badan Pusat Statistik Tahun 2019-2022*

Tabel 1.6
**PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 – 2022**

Kategori		2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.893.675,82	4.039.987,96	4.804.189,55	5.326.997,27
B	Pertambangan dan Penggalian	14.560.392,93	12.411.103,03	15.773.477,49	25.126.174,38
C	Industri Pengolahan	1.649.725,66	1.779.212,35	2.046.268,01	2.277.554,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.999,02	7.921,81	8.166,16	8.696,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.621,68	9.042,13	10.197,23	11.549,07
F	Konstruksi	3.465.229,77	3.298.833,19	3.477.715,24	4.00.792,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.188.234,49	2.234.134,50	2.320.102,31	2.651.405,92
H	Transportasi dan Pergudangan	472.258,70	457.397,34	504.141,07	606.511,28

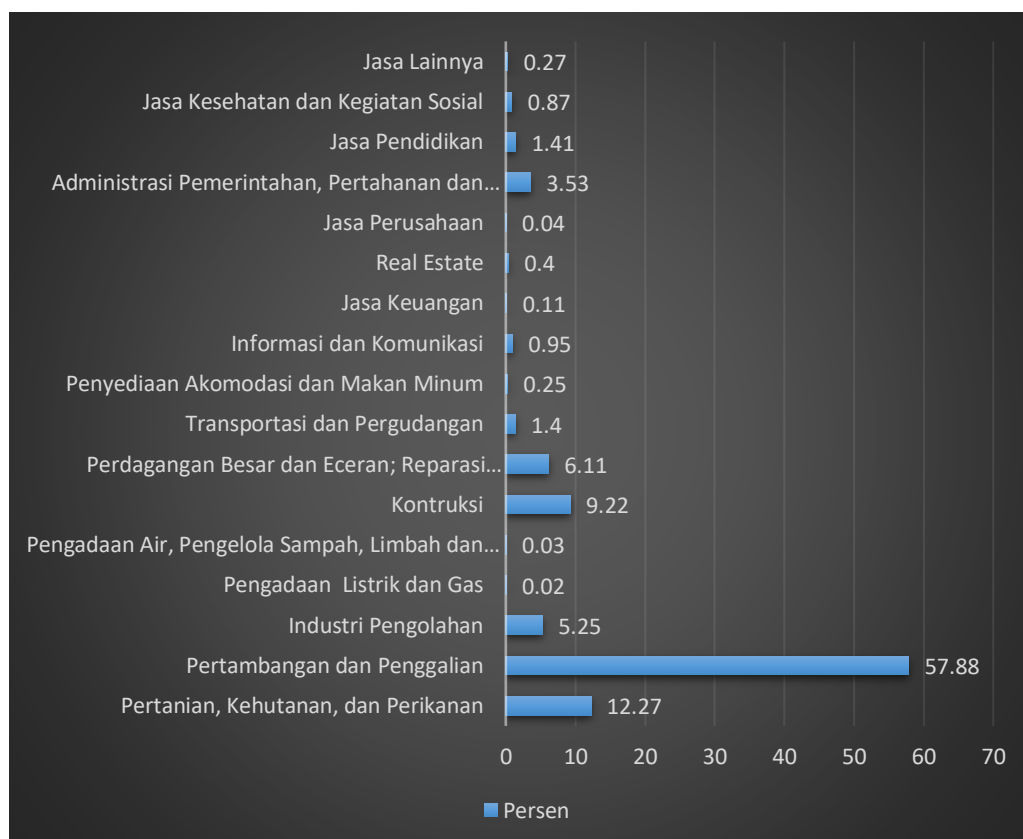
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99.273,75	93.432,47	98.296,45	110.588,49
J	Informasi dan Komunikasi	306.210,73	334.089,32	369.496,73	411.637,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	36.762,74	37.781,61	41.546,40	47.164,42
L	Real Estate	157.639,98	156.236,15	156.825,56	171.928,22
M,N	Jasa Perusahaan	18.388,28	17.835,78	18.072,63	19.068,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.423.723,89	1.357.300,48	1.427.041,23	1.521.834,74
P	Jasa Pendidikan	484.692,77	523.244,48	570.123,11	612.669,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	256.763,55	308.784,84	358.051,21	375.895,19
R,S,TU	Jasa lainnya	106.551,55	106.207,21	109.119,23	118.593,03
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		29.135.145,30	27.172.544,64	32.092.829,61	43.409.061,26

Sumber : *Badan Pusat Statistik Tahun 2019-2022*

Pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Barat selama periode 2019-2022 didominasi oleh dua lapangan usaha, yaitu Pertambangan dan Penggalan, serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan selama 2019-2022 kedua lapangan usaha tersebut cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. PDRB Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2022 yang dihasilkan melalui lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan yaitu mencapai 57,88 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,27 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,22 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,11 persen, lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 5,25 persen. Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 (lima) persen. Kontribusi masing-masing lapangan usaha dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 ditunjukkan dalam grafik berikut.

Grafik 1.2

**PERSENTASE PDRB KABUPATEN KUTAI BARAT
BERDASARKAN LAPANGAN USAHA
TAHUN 2022 (ATAS DASAR HARGA BERLAKU)**



Sumber : *Badan Pusat Statistik Tahun 2022*

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB terdiri atas dua jenis yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

3.2 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kutai Barat pada tahun 2022 didominasi Lapangan Usaha berbasis sumberdaya alam, yaitu Pertambangan khususnya komoditas Batu Bara yang pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Terlihat dari besarnya peranan Lapangan Usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kutai Barat. Dan pada tahun 2022, struktur ekonomi Kutai Barat juga menunjukkan peningkatan, dimana lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian masih mendominasi (25.126.174,38 juta rupiah), diikuti lapangan usaha Pertanian yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (5.326.997,27 juta rupiah) dan Konstruksi (4.000.792,65 juta rupiah). Sedangkan peranan lapangan usaha yang lain jika dilihat kontribusinya terhadap pembentukan total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai barat mulai berangsur-angsur menunjukkan peningkatan.

Grafik 1.3
**PERSENTASE PDRB KABUPATEN KUTAI BARAT
BERDASARKAN LAPANGAN USAHA
TAHUN 2022 (ATAS DASAR HARGA BERLAKU)**



Sumber : *Badan Pusat Statistik Tahun 2022*

3.3 Pertumbuhan Ekonomi

Seiring dengan berkurangnya musibah global dan nasional yaitu COVID-19, situasi ekonomi regional Kutai Barat menunjukkan peningkatan di tahun 2022. Kondisi ini tergambar dari estimasi capaian akan laju pertumbuhan ekonomi Kutai Barat tahun 2022 yang mencapai 4,77 persen, mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar 4,18 persen.

Berikut Tabel 1.6 Laju Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kutai Barat tahun 2019-2022 :

Tabel 1.7

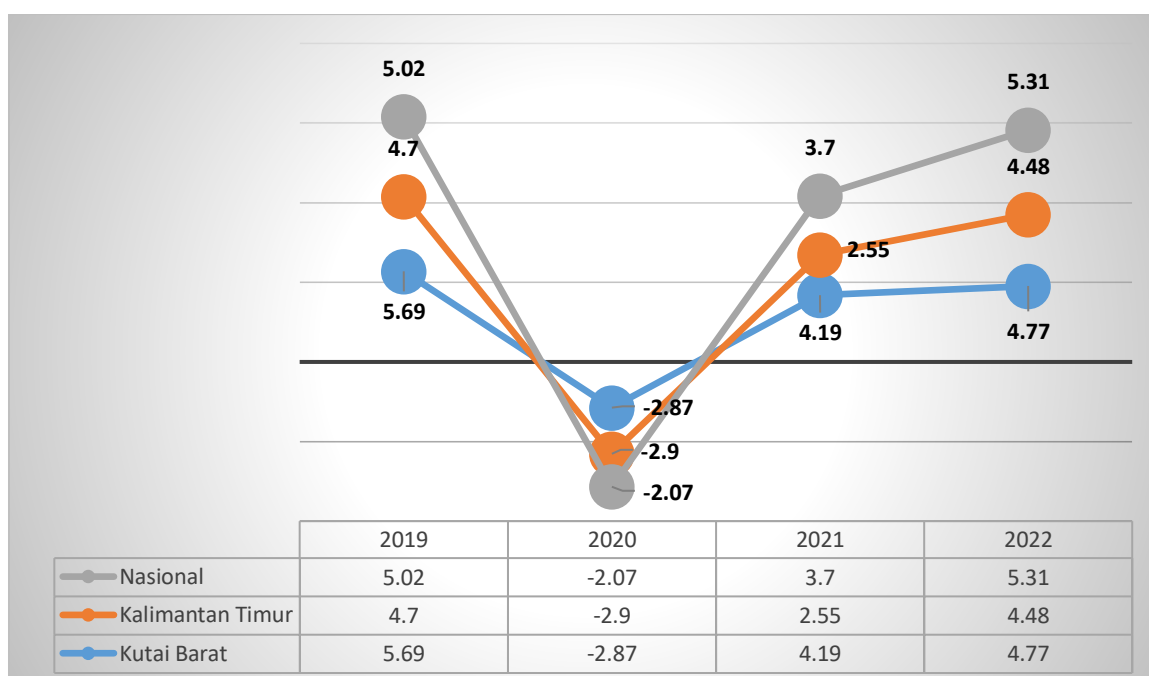
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019-2022 (PERSEN)

KATEGORI	URAIAN	TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,52	-1,99	-0,8	0,30
B	Pertambangan dan Penggalian	5,53	-3,67	5,73	4,48
C	Industri Pengolahan	5,29	-3,96	-0,64	1,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,24	13,06	2,92	3,46
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,39	2,39	4,34	8,06
F	Konstruksi	5,39	-5,24	4,11	9,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,71	1,03	2,68	6,09
H	Transportasi dan Pergudangan	7,68	-5,37	4,84	12,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,90	-6,15	3,36	8,13
J	Informasi dan Komunikasi	8,53	8,61	9,23	9,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,60	1,76	7,24	5,54
L	Real Estate	3,95	-1,56	-1,73	2,63
M,N	Jasa Perusahaan	4,07	-3,78	1,29	5,33
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,52	-5,31	4,57	7,25
P	Jasa Pendidikan	7,07	5,25	5,29	5,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,13	19,20	15,92	4,93
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,85	-1,92	2,29	7,16
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,58	-2,92	4,18	4,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Tingkat LPE Kabupaten Kutai Barat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan LPE Kalimantan Timur dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Barat relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara nasional. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Kutai Barat dibandingkan dengan Kalimantan Timur dan Nasional selama periode tahun 2019–2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1.4
**LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KUTAI BARAT,
KALIMANTAN TIMUR DAN NASIONAL TAHUN 2019-2022**



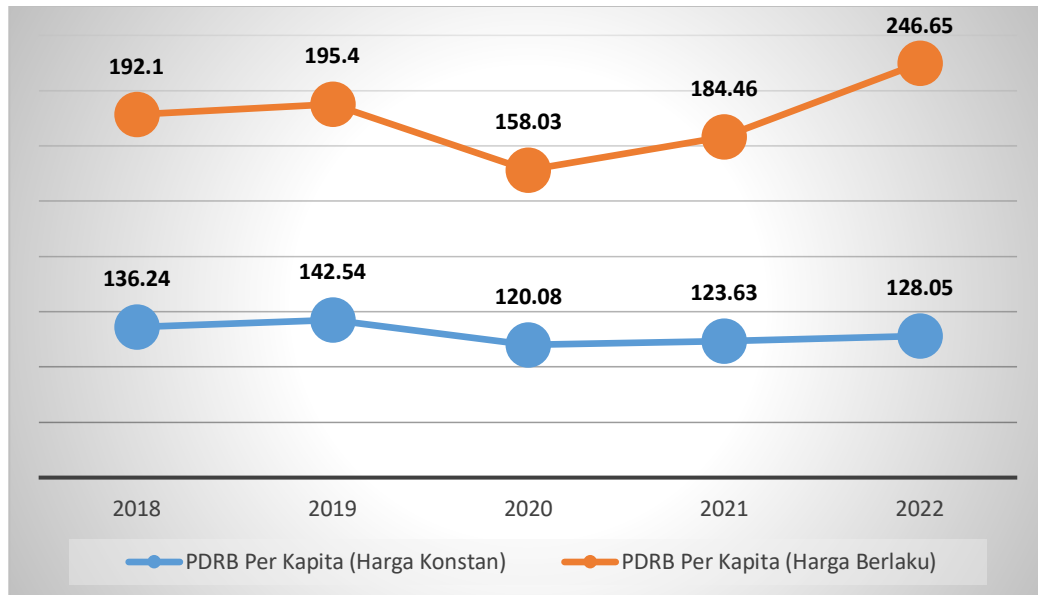
Potret perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat dari dimensi yang lebih luas lagi. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) dan berinteraksi dengan aspek dan indikator makro lainnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dan mempengaruhi indikator-indikator pembangunan lainnya. Hal ini

berguna untuk dapat melihat kerangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan holistic.

3.3 PDRB Per Kapita

Indikator lain untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kutai Barat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, PDRB per kapita tercatat sebesar 192,1 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 246,65 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga konstan di Kabupaten Kutai Barat juga mengalami kenaikan sejak tahun 2018 hingga 2022 walaupun menurun pada tahun 2020, masing-masing sebesar 136,24 juta rupiah dan 128,05 juta rupiah. Namun tidak setinggi kenaikan yang terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena sudah tidak ada pengaruh inflasi. Selengkapnya, nilai PDRB perkapita dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 1.5
**PDRB PER KAPITA KUTAI BARAT
TAHUN 2018-2022 (JUTA RUPIAH)**



Pada tahun 2022, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan PDRB per kapita dibandingkan tahun 2021. Jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 238,70 juta rupiah pada tahun 2022, hal ini menunjukkan PDRB per kapita Kabupaten Kutai Barat lebih tinggi. Berdasarkan analisis *Klassen Typology* Kabupaten Kutai Barat termasuk ke dalam katagori Daerah Maju dan Tumbuh Cepat (*Rapid Growth Region*) yaitu daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita provinsi. Tabel berikut dapat menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki nilai PDRB per kapita lebih tinggi dari pada Provinsi Kalimantan Timur, sementara Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda masih di bawah PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 1.8

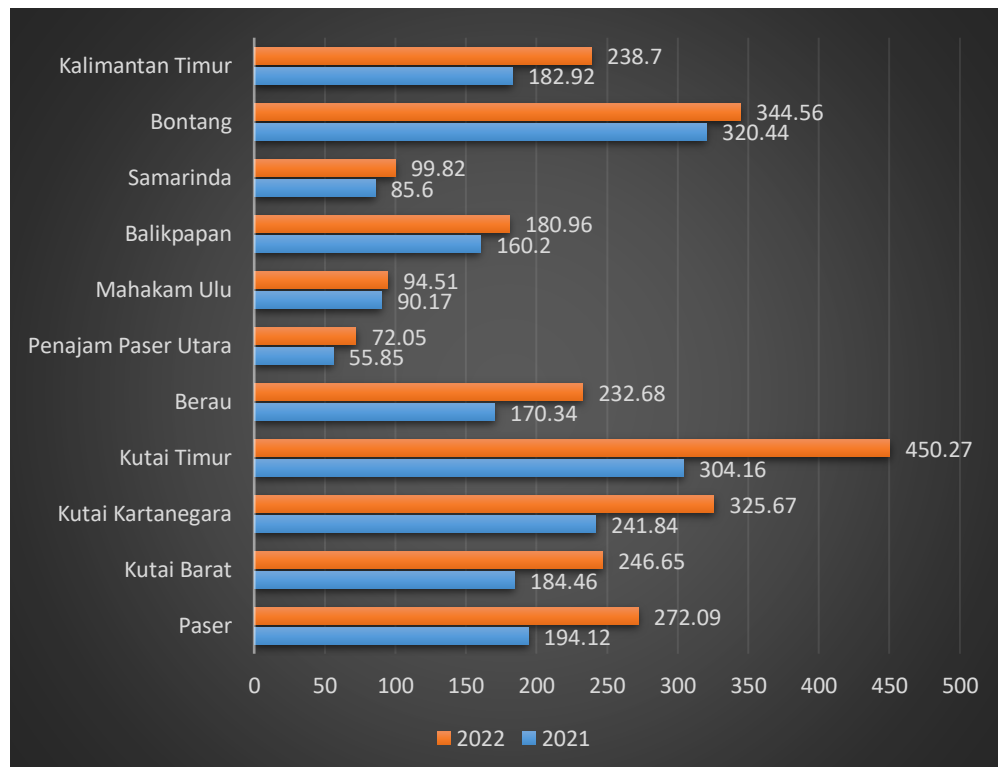
**PERBANDINGAN PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU
KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019-2022 (JUTA RUPIAH)**

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022
Paser	173,34	157,18	194,12	272,09
Kutai Barat	195,40	158,03	184,46	246,65
Kutai Kartanegara	212,76	204,50	241,84	325,67
Kutai Timur	367,11	268,80	304,16	450,27
Berau	173,83	143,67	170,34	232,68
Penajam Paser Utara	57,76	50,78	55,85	72,05
Mahakam Ulu	102,45	85,38	90,17	94,51
Balikpapan	165,69	151,31	160,20	180,96
Samarinda	79,95	80,36	85,60	99,82
Bontang	327,06	311,88	320,44	344,56
Kalimantan Timur	180,26	161,80	182,92	238,70

Sumber : *Badan Pusat Statistik Tahun 2022*

Grafik 1.6

**PERBANDINGAN PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU
KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021-2022 (JUTA RUPIAH)**



Sumber : *Badan Pusat Statistik Tahun 2022*

3.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia atau status tiga kemampuan dasar penduduk, yakni berumur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup, berpengalaman dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. 3 (tiga) dimensi pokok penyusun IPM tersebut, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Aspek kesehatan dalam pembangunan manusia diukur oleh indeks harapan hidup sebagai representasi kemampuan untuk hidup sehat dan berumur panjang. Aspek pendidikan diukur oleh indeks pendidikan yang diperoleh dengan mengukur rata-rata lama sekolah dan angka harapan sekolah. Standar hidup yang layak merupakan gambaran dari aspek ekonomi masyarakat. Aspek ekonomi tersebut dihitung dengan menggunakan indikator GNI per kapita.

Perkembangan IPM di Kutai Barat dalam 4 (empat) tahun terakhir, meskipun percepatannya bergerak bervariasi. Pada tahun 2021 IPM Kutai Barat tercatat 72,07 persen, **Pada tahun 2022 naik menjadi 72,92 persen atau naik 0,83 persen.**

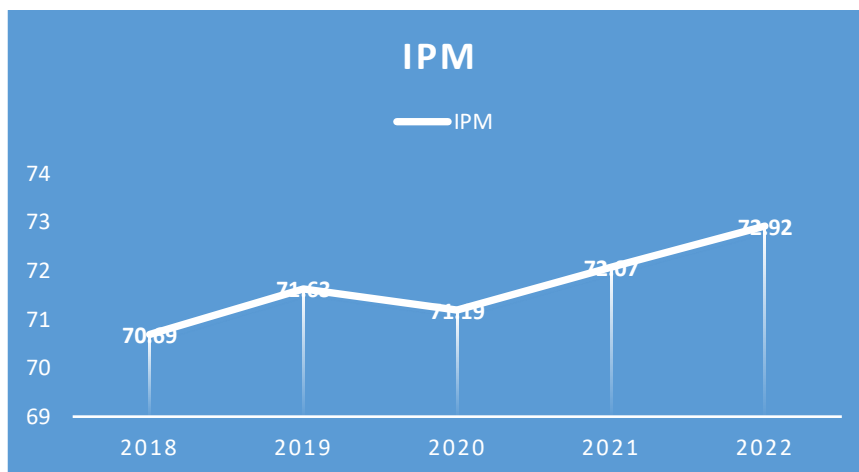
Berikut Tabel dan Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Barat tahun 2018 – 2022 :

Tabel 1.9
**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 – 2022**

Tahun	IPM
2018	70,69
2019	71,63
2020	71,19
2021	72,07
2022	72,92

Sumber : *Badan Pusat Statistik Tahun 2022*

Grafik 1.7
**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 – 2022**



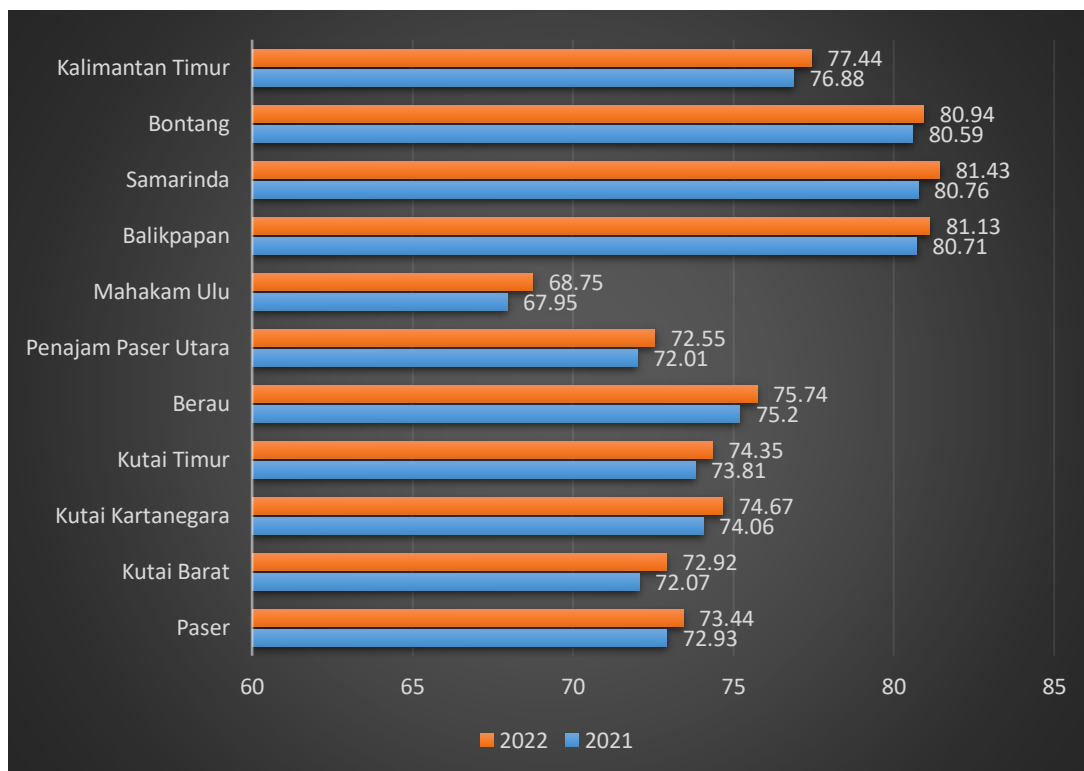
Pada tahun 2022, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibandingkan tahun 2021. Jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 77,44 pada tahun 2022, hal ini menunjukkan IPM Kabupaten Kutai Barat lebih rendah. Tabel dan Grafik berikut dapat menunjukkan perbandingan IPM Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 1.10
**PERBANDINGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019-2022**

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022
Paser	72,29	72,04	72,93	73,44
Kutai Barat	71,63	71,19	72,07	72,92
Kutai Kartanegara	73,78	73,59	74,06	74,67
Kutai Timur	73,49	73,00	73,81	74,35
Berau	74,88	74,71	75,20	75,74
Penajam Paser Utara	71,64	71,41	72,01	72,55
Mahakam Ulu	67,58	67,09	67,95	68,75
Balikpapan	80,11	80,01	80,71	81,13
Samarinda	80,20	80,11	80,76	81,43
Bontang	80,09	80,02	80,59	80,94
Kalimantan Timur	76,61	76,24	76,88	77,44

Sumber : *Badan Pusat Statistik Tahun 2022*

Grafik 1.8
**PERBANDINGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021-2022**



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat 7 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;

- 2) Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Barat merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- 3) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan Inspektorat Tipe A;

Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat, terdiri dari :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
- 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- 6) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- 7) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
- 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 11) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- 12) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
- 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 14) Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- 15) Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
- 16) Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
- 17) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- 18) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 19) Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- 20) Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan
- 21) Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan.

Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat, terdiri atas:

- 1) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- 2) Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan; dan
- 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Kecamatan terdiri atas:

- 1) Kecamatan Barong Tongkok dengan Tipe A;
- 2) Kecamatan Melak dengan Tipe A;
- 3) Kecamatan Linggang Bigung dengan Tipe A;
- 4) Kecamatan Sekolaq Darat dengan Tipe A;
- 5) Kecamatan Damai dengan Tipe A;
- 6) Kecamatan Muara Lawa dengan Tipe A;
- 7) Kecamatan Jempang dengan Tipe A;
- 8) Kecamatan Bongan dengan Tipe A;
- 9) Kecamatan Siluq Ngurai dengan Tipe A;
- 10) Kecamatan Bentian Besar dengan Tipe A;
- 11) Kecamatan Muara Pahu dengan Tipe A;
- 12) Kecamatan Penyinggahan dengan Tipe A;
- 13) Kecamatan Mook Manaar Bulatn dengan Tipe A;
- 14) Kecamatan Nyuatan dengan Tipe A;
- 15) Kecamatan Tering dengan Tipe A; dan
- 16) Kecamatan Long Iram dengan Tipe A.

Perangkat Daerah Lainnya :

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD) Tipe C, bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;
- 2) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebanyak 19 unit, tersebar di 16 Kecamatan, sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- 3) UPT Dinas Daerah;

- 4) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
- 5) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kutai Barat yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur teknis pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

5. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2022 didukung oleh sumber daya aparatur yang cukup memadai sebanyak 13.442 orang yang terdiri dari :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 3.582 Orang.
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Sebanyak 463 Orang
- Tenaga Kerja Kontrak (TKK)/Honorar sebanyak 9.397 orang

Tabel 1.11
RINCIAN JUMLAH PEGAWAI/ASN DAN NON ASN/PTT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 – 2022

No	Jenis Kepegawaian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3.783	3.634	3.628	3.582
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	N/a	N/a	N/a	463
3	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	5.483	6.063	9.658	9.397
Jumlah		11.582	11.966	13.286	13.442

Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Barat 2022

Tabel 1.12
RINCIAN JUMLAH PEGAWAI/ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022 BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN GENDER

No	Golongan dan Ruang	Gender		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	Total
1	I	32	3	35
2	II	521	425	946
3	III	908	1.173	2.081
4	IV	289	231	520
Jumlah		1.750	1.832	3.582

Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Barat 2022

Sementara jika dilihat berdasarkan Eselon, sebaran ASN Kabupaten Barat dapat dilihat pada tabel 1.13 sebagai berikut :

Tabel 1.13
RINCIAN JUMLAH ESELON DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 - 2022

No	Eselon	Tahun			
		2019	2020	2021	2022

1	Eselon II	30	24	30	27
2	Eselon III	157	147	177	161
3	Eselon IV	494	488	505	227
4	Eselon V	-	-	-	-
Jumlah		694	693	712	415

Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Barat 2022

Berdasarkan tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 rincian sebagai berikut :

Tabel 1.14

**RINCIAN JUMLAH PEGAWAI/ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022 BERDASARKAN PENDIDIKAN**

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	18
2	SLTP	28
3	SLTA	974
4	D1	10
5	D2	72
6	D3	447
7	D4/S1	1.606
8	S2	424
9	S3	3
Jumlah		3.582

Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Barat 2022

Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 menurut tingkat pendidikan dengan rincian sbb :

Tabel 1.15
**JUMLAH TENAGA KERJA KONTRAK (TKK) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2022 BERDASARKAN PENDIDIKAN**

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	124
2	SLTP	255
3	SLTA	4.795
4	D1	36
5	D2	39
6	D3	1.049
7	D4/S1	3.040
8	S2	59
9	S3	-
Jumlah		9.397

Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Barat 2022

Tabel 1.16
**DATA TENAGA KERJA KONTRAK (TKK)
TENAGA KEPENDIDIKAN (GURU) TAHUN 2022**

SEKOLAH	TINGKAT PENDIDIKAN							TOTAL
	SMA	D I	D 2	D 3	D4/S1	S 2	S 3	
PG/PAUD	106	2	3	7	130	0	0	248
TK/RA	118	4	6	4	146	0	0	278
SD/MI	349	5	17	22	688	0	0	1081
SLB	0	0	0	1	6	0	0	7
SMP/MTS	11	2	3	15	481	0	0	512
JUMLAH	584	13	29	49	1.451	0	0	2.126

Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Barat 2022

Tabel 1.17
**DATA TENAGA KERJA KONTRAK (TKK) TENAGA ADM PENYELENGGARA
KEPENDIDIKAN TAHUN 2022**

JENJANG PENDIDIKAN	JABATAN				JUMLAH
	TU	PERPUSTAKAAN	PENJAGA SEKOLAH	PELAYAN	
PG/PAUD	17	0	0	7	24
TK/RA	18	2	5	13	38
SD/MI	128	55	76	67	326
SMP/MTs	93	21	24	20	158
JUMLAH	256	78	105	107	546

Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Barat 2022

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 ini dilakukan dengan membentuk fokus grup yang melakukan pengumpulan data, kajian, dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sasaran/program yang telah ditetapkan. Berbagai dokumen perencanaan daerah yang telah ada baik itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 - 2026, Arah dan Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas APBD tahun 2022, serta dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2022 menjadi bahan perencanaan kinerja untuk diukur dan dievaluasi pencapaiannya.

Dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, LKjIP tahun 2022 lebih banyak menguraikan hal-hal strategis yang masih memerlukan perbaikan, sedangkan hal-hal yang relatif telah berhasil dengan baik tidak terlalu banyak diungkapkan.

Adapun sistematika penyusunan LAKIP Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang; maksud dan tujuan; gambaran umum Kabupaten Kutai Barat serta sistematika penulisan.

Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan Perencanaan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk periode 2021 - 2026 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kutai Barat Tahun 2022.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dikaitkan dengan sasaran strategis untuk tahun 2022 dan penyajian dari hasil pengukuran Kinerja Tahun 2022.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dituangkan merupakan pemaparan dari kerangka pembangunan strategis Kabupaten Kutai Barat untuk periode lima tahun. Segala hal terkait seperti penjabaran visi, isi, serta program pemerintah Kabupaten Kutai Barat tertuang di dalamnya.

Pedoman RPJMD mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Tak hanya itu, RPJPN dan RPJMN Nasional juga turut menjadi bahan pertimbangan. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022.

A. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu :

**“Kutai Barat Semakin Adil, Mandiri Dan Sejahtera
Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan Dan Peningkatan Sumber
Daya Manusia”**

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

a. Semakin Adil

Semakin Adil diartikan bahwa secara bertahap dan pasti berbagai kesenjangan (gap) atau disparitas hasil-hasil

pembangunan akan semakin berkurang dan hasil-hasil pembangunan akan semakin dirasakan manfaatnya secara lebih meluas dan merata ke seluruh wilayah dan lapisan masyarakat Kutai Barat, tidak lagi berfokus di pusat-pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu saja. Sehingga, pembangunan merata pada semua wilayah menuju kesejahteraan.

b. Semakin Mandiri

Semakin Mandiri diartikan bahwa masyarakat Kutai Barat di masa mendatang diharapkan akan semakin mampu untuk terus maju dengan bertumpu pada kekuatan serta daya inovasi masyarakat dan daerah, kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar serta sederajat dengan daerah lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Dalam membangun kemandirian ini mutlak harus dibangun kemampuan daya saing daerah.

c. Semakin Sejahtera

Semakin Sejahtera diartikan bahwa di masa mendatang dapat terciptanya kualitas hidup masyarakat Kutai Barat pada semua aspek kehidupan, pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan memiliki pendapatan yang lebih baik.

d. Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan

Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan diartikan bahwa masyarakat Kutai Barat di masa mendatang diharapkan mampu memanfaatkan Sumber Daya alam secara berkelanjutan dalam menyelenggarakan system ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi local, melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

e. Peningkatan Kualitas SDM

Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya

peningkatan daya saing dan kemandirian masyarakat namun juga mendukung pembangunan nasional.

B. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan sebelumnya. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Tabel 2.1

KETERKAITAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

VISI	MISI
Kutai Barat Semakin Adil, Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	<i>Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan local secara berkelanjutan</i>
	<i>Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang didukung optimalisasi pelayanan kesehatan</i>
	<i>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel</i>
	<i>Meningkatkan pemerataan insfrastruktur dasar dan insfrastruktur penopang ekonomi kerakyatan</i>

- 1) Misi Pertama : Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis**

kawasan berdasarkan potensi unggulan local secara berkelanjutan. Dalam periode lima (5) tahun mendatang, pendekatan pengembangan ekonomi kerakyatan menggunakan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang dipadukan dengan konsep pengembangan kawasan (*kluster*). Kedua pendekatan tersebut diharapkan menciptakan pekerjaan yang beragam, sesuai dengan keterampilan masyarakat local dan berkelanjutan.;

- 2) **Misi kedua : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang didukung optimalisasi pelayanan kesehatan.** Manusia merupakan objek sekaligus subjek/pelaku pembangunan. Pelestarian lingkungan, perlawanan terhadap kemiskinan, peningkatan ekonomi, dan sebagainya merupakan upaya mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan bagi umat manusia. Pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang menjadi ukuran kualitas sumber daya manusia merupakan penentu keberhasilan pembangunan.;
- 3) **Misi ketiga : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.** Visi Kutai Barat dapat dicapai dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Kerjasama dapat terjadi ketika ada rasa saling percaya dan peduli antara pemerintah dan masyarakat pemerintah daerah perlu menunjukkan bahwa kepedulian ditunjukkan dengan pelayanan yang cepat dan murah; dan
- 4) **Misi keempat : Meningkatkan pemerataan insfrastruktur dasar dan insfrastruktur penopang ekonomi kerakyatan.** Insfrastruktur atau sering disebut sarana dan prasarana memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan. Insfrastruktur merupakan modal pembangunan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa insfrastruktur seperti jalan, listrik, pelabuhan merupakan modal penting untuk mencapai pertumbuhan perekonomian wilayah yang tinggi dan berkelanjutan. Insfrastruktur yang baik akan meningkatkan perekonomian wilayah sekaligus perekonomian masyarakat.

Kebijakan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi kerakyatan.

Penjabaran pelaksanaan keempat misi diatas, telah diuraikan melalui janji politik Bupati Kutai Barat. Semuanya tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat 2021-2026. Penetapan janji politik, merupakan cerminan tentang urgensi permasalahan yang jadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bupati Kutai Barat.

RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 merupakan dokumen strategis Kabupaten Kutai Barat untuk mengimplementasikan janji-janji dimaksud menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan RPJMD, dan oleh karenanya menjadi contoh baik dalam tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan, bahwa janji-janji yang telah disampaikan mutlak harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan.

Berkenaan dengan janji-janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimaksud dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.2
JANJI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

No	Janji Politik/Kampanye	Program Terkait	SKPD Terkait Pencapaian Misi
1	Meningkatkan Jumlah Wirausahawan Lokal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	Meningkatkan peran BUMK dalam mendukung kegiatan usaha masyarakat lokal	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
3	Meningkatkan Jumlah UMKM berbasis komoditas unggulan dan berdaya saing	Program pengembangan UMKM Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pendukung Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

5	Meningkatkan Rantai Pasok Produksi Komoditas Unggulan Lokal	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
6	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Praktik-Praktik Jasa Lingkungan Dalam Skema Pembangunan Ekonomi Hijau	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
7	Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
8	Menurunkan Angka Putus Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Meningkatkan Rata-Rata Nilai UN		
10	Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan dan RSUD
11	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Menjangkau Keseluruh Lapisan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
12	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			

13	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
14	a. Menyediakan infrastruktur yang merata serta Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
	b. Menyediakan Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber : RPJMD Kab. Kutai Barat 2021-2026

Janji-janji tersebut bukanlah sekedar janji belaka. Banyak sisi positif yang bermanfaat bagi kesejahteraan warga Kabupaten Kutai Barat. Dengan janji-janji tersebutlah, Bupati Kutai Barat terus memelihara keinginan dan tekad kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Kutai Barat.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021-2026

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam dokumen perencanaan perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy Planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi, dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama dengan lebih menekankan pada target kinerja. Perumusan tujuan dan sasaran

dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran renstra perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Hubungan antara kepala daerah dan perangkat daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pada Penyusunan RPJMD ini disertakan indikator untuk setiap tujuan sebagai penjabaran dari misi yang telah ditetapkan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut dilakukan reviu atas tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 menetapkan sebanyak 9 (Sembilan) sasaran dan 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.3
**TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KABUPATEN KUTAI BARAT 2021-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
<i>Misi 1 : Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan local secara berkelanjutan.</i>		
Meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang semakin merata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	
	Meningkatnya peran sector unggulan daerah berbasis kluster terhadap Perekonomian Daerah (PDRB)	Kontribusi sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB
		Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB
		Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB
Menurunkan Angka Kemiskinan	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan	
	Terciptanya lapangan kerja baru dan Wirausahawan local baru	Tingkat Pengangguran terbuka
		Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil

	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kutai Barat	PDRB Perkapita
Menjaga Keberlanjutan Kawasan Dalam Skema Pembangunan Ekonomi Hijau	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
	Terjaganya kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air
		Indeks Kualitas Udara
Indeks Kualitas Lahan		
Misi 2 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang didukung optimalisasi pelayanan kesehatan.		
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Barat	Indeks Pembangunan Manusia	
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah
		Harapan Lama Sekolah
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	
Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.		
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat
		Indeks BPK
		Nilai LPPD
		Persentase Desa Mandiri
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Nilai SAKIP		
Misi 4 : Meningkatkan pemerataan insfrastruktur dasar dan insfrastruktur penopang ekonomi kerakyatan.		
Menyediakan Insfrastruktur dasar dan Insfrastruktur Penunjang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	Indeks Gini	
	Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Insfrastruktur Dasar	Persentase Penduduk Berakses air Minum Layak
		Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
		Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Layak Tidak Huni)
Tersedianya Insfrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	
		Cakupan Layanan Telekomunikasi

Sumber : RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026

2.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Dalam mencapai keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah, tentu saja harus ada beberapa kebijakan yang dijadikan dasar dalam perumusan perencanaan. Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional, dalam RPJMD yang disusun saat ini keselaraasan antara visi, misi daerah, serta sasaran pokok, dan arah kebijakan di elaborasi dalam visi, misi kepala daerah, serta sasaran pokok, dan arah kebijakannya.

Program pembangunan daerah merupakan program atau agenda strategis kepala daerah pada peripde RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Kebijakan belanja daerah pada RPJMD 2021-2026 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan seperti :

1. Pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Pemenuhan Belanja Fungsi Kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Pemenuhan kewajiban belanja moda transportasi sebesar 10 persen dari target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
4. Pemenuhan belanja pegawai atas belanja gaji dan tunjangan dan rencana pemberian tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari vis politik kepala daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Kabupaten Kutai Barat. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi

program prioritas pembangunan Daerah sesuai dengan janji politik pada saat kampanye.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran akan tercapai Ketika strategi yang digunakan tepat. Pemkab Kutai Barat selalu optimistis mampu mencapai sasaran berbekal strategi matang untuk seluruh lini yang ingin dibenahi.

Adapun strategi Pemkab Kutai Barat mencakup penentuan kebijakan, program, serta kegiatan. Untuk itu sebaiknya terlebih dahulu membahas secara singkat tentang arti dari kebijakan, program, serta kegiatan.

Kebijakan : pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang disepakati pihak-pihak terkait lalu ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan Pedoman. Maka pedoman itulah yang nanti dijadikan petunjuk bagi setiap kegiatan demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program : adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran Sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.

Kegiatan : adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. Sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas Fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan Merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah

untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemkab Kutai Barat melaksanakan reviu terhadap sasaran dan indikator kinerja. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan. Terutama, indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana table berikut:

Tabel 2.4
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021-2026**

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan
1	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap perekonomian daerah	1.1	Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas terhadap PDRB	%
		1.2	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%
		1.3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%
2	Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru	2.1	Tingkat Pengangguran terbuka	%
		2.2	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%
3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kutai Barat	3.1	PDRB Perkapita	Juta
4	Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup	4.1	Indeks Kualitas Air	Indeks
		4.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks
		4.3	Indeks Kualitas Lahan	Indeks
5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	5.1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun
		5.2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun
6	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	6.1	Usia Harapan Hidup	Tahun
7	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai
		7.2	Opini BPK	Opini

	Pemerintah Daerah	7.3	Nilai LPPD	Poin
		7.4	Persentase Desa Mandiri	%
		7.5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%
		7.6	Nilai SAKIP	Poin
8	Meningkatnya dan meratanya kualitas Infrastruktur dasar	8.1	Persentase penduduk berakses air minum	%
		8.2	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%
		8.3	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%
9	Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	9.1	Proporsi Panjanag Jaringan Jalan dalam kondisi mantap	%
		9.2	Cakupan Layanan Komunikasi	%

Sumber : RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Penyusunan Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan salah satu tahapan dalam **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi Amanah kepada pimpinan SKPD sebagai penerima Amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian Target Kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administrative, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan

perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi, dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan system manajerial dalam perjanjian kinerja, segala sesuatu menjadi terbuka dan bukannya sekedar tanda tangan.

Tabel 2.5
**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022**

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap perekonomian daerah	1.1	Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas terhadap PDRB	%	15,2
		1.2	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	0,525
		1.3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	0,375
2	Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru	2.1	Tingkat Pengangguran terbuka	%	4,63
		2.2	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	0,44
3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kutai Barat	3.1	PDRB Perkapita	Juta	193,35
4	Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup	4.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	62,2
		4.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,34
		4.3	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	66,55
5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	5.1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,5
		5.2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,95
6	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	6.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,05
7	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82
		7.2	Opini BPK	Opini	WTP
		7.3	Nilai LPPD	Poin	3,6
		7.4	Persentase Desa Mandiri	%	0,12
		7.5	Indeks Pembangunan	%	84,07

			Gender (IPG)		
		7.6	Nilai SAKIP	Poin	66
8	Meningkatnya dan meratanya kualitas Infrastruktur dasar	8.1	Persentase penduduk berakses air minum	%	80,60
		8.2	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	99,5
		8.3	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	28
9	Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	9.1	Proporsi Panjanag Jaringan Jalan dalam kondisi mantap	%	61,20
		9.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	48

Sumber : RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026

2.5 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin di capai Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2021 Berjumlah Rp 2.651.632.188.625,00. Adapun setelah perubahan berjumlah Rp 3.171.727.827.870,00.

Anggaran Belanja langsung merupakan bagian dari APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2022, Komposisi belanja APBD Kabupaten Kutai Barat, Sebagai berikut:

Tabel 2.6
**ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Belanja Operasi	1.921.229.230.574,00
2	Belanja Modal	805.220.708.122,00
3	Belanja Tidak Terduga	90.570.049.000,00

4	Belanja Transfer	363.707.840.174,00
Jumlah		3.171.727.827.870,00

Sumber : BKAD Kab. Kutai Barat 2022

Tabel 2.7

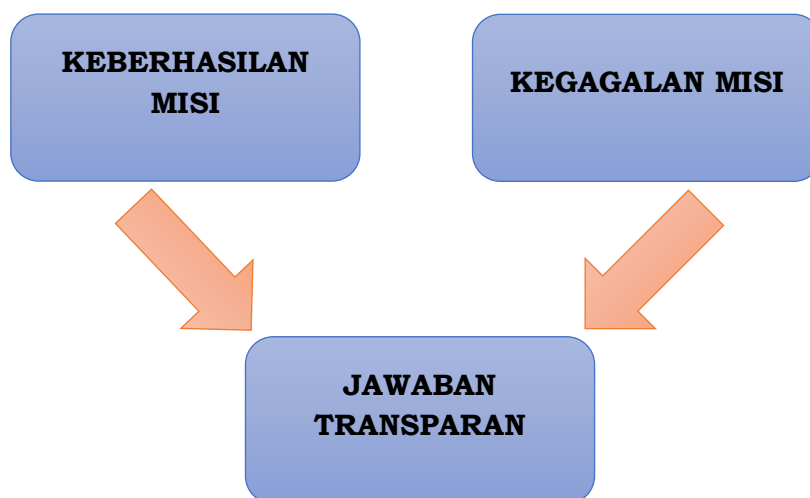
ALOKASI ANGGARAN PER INDIKATOR SASARAN TAHUN 2022

No	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp)
1	Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas terhadap PDRB	50.336.712.051,00
2	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	8.065.471.214,00
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	14.062.495.821,00
4	Tingkat Pengangguran terbuka	1.114.017.400,00
5	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	12.139.897.909,00
6	PDRB Perkapita	N/A
7	Indeks Kualitas Air	20.331.697.775,00
8	Indeks Kualitas Udara	
9	Indeks Kualitas Lahan	
10	Harapan Lama Sekolah	160.818.802.053,00
11	Rata-Rata Lama Sekolah	
12	Usia Harapan Hidup	189.488.801.895,00
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	1.210.937.298,00
14	Nilai SAKIP	
15	Nilai LPPD	1.379.842.100,00
16	Persentase Desa Mandiri	6.053.959.081,00
17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	6.721.533.294,00
18	Opini BPK	784.482.176.799,00
19	Persentase penduduk berakses air minum	446.452.544.884,00
20	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	
21	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	13.353.919.500,00
22	Persentase rumah tangga pengguna listrik	1.041.571.300,00
23	Cakupan Layanan Telekomunikasi	2.695.219.782,00

Jumlah	1.719.749.600.156,00
---------------	-----------------------------

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



3.1 REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, disebutkan bahwa sistematika penyajian Laporan Kinerja Khususnya pada Bab III diamanatkan untuk menyajikan informasi terkait evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya dengan memuat tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP. Dengan melaksanakan rekomendasi tersebut diharapkan akan terjadi perbaikan manajemen kinerja yang berakibat pada meningkatnya skor Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Pelaksanaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 telah dievaluasi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaksanaan Evaluasi SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi SAKIP adalah mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperoleh nilai **62,07** atau predikat **B**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik"**, yaitu **Implementasi AKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja**. Rincian hasil penilaian Evaluasi SAKIP dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
**HASIL EVALUASI SAKIP KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2022**

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1	PERENCANAAN KINERJA	30	21,71
2	PENGUKURAN KINERJA	30	17,21
3	PELAPORAN KINERJA	15	9,75
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25	13,40
	NILAI HASIL EVALUASI	100	62,07
	TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA		B

Namun Hasil evaluasi tahun 2022 **"tidak diperbandingkan"** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot Komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya.

Evaluasi tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat PD.

Nilai Hasil Evaluasi tersebut tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022, dan masih jauh dari target akhir di RPJMD yang menargetkan BB di akhir tahun RPJMD 2021 -2026. Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan penerapan budaya kinerja, Kemen PAN RB merekomendasikan beberapa hal terkait perbaikan manajemen kinerja dalam rangka peningkatan Nilai Akuntabilitas diantaranya :

1. Melakukan reviu dan Perbaikan kualitas rumusan indikator kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah dengan berorientasi pada Prinsip *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound* (SMART) dan cukup dalam Dokumen perencanaan tingkat Pemerintah Daerah;
2. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap PD dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap PD telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada Masyarakat (*result oriented*) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang SMART dan memenuhi unsur cukup dalam mengawal kinerja;
3. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen *cascading* kinerja baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun PD untuk memastikan kualitas *cascading* (penjenjangan) kinerja dari tingkat tertinggi hingga terendah dapat berorientasi (hasil) sesuai dengan tingkatnya dengan memerhatikan *logical framework dan critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Proses reviu dan perbaikan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan kinerja Instansi Pemerintah;
4. Melakukan identifikasi dan pemetaan pada *cascading* kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;

5. Memanfaatkan hasil perbaikan *cascading* kinerja untuk memilah program dan kegiatan apa saja yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja organisasi;
6. Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja serta membangun sistem berbasis aplikasi untuk dapat dilaksanakan secara terintergritas;
7. Melaksanakan pengukuran realisasi kinerja secara berkala dengan memanfaatkan rencana aksi yang telah disusun dan melaporkan hasil data kinerja tersebut sebagai revidasi atas pencapaian kinerja;
8. Mendorong keterlibatan seluruh pimpinan PD untuk turut aktif dalam memantau capaian kinerja PD maupun individu yang terlibat dalam mendukung capaian kinerja tersebut;
9. Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dapat dan konsisten antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
10. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
11. Menginformasikan laporan kinerja baik dari tingkat Pemerintah Daerah maupun PD dalam *website* kabupaten sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik;
12. Dalam proses revidasi, Inspektorat agar memastikan dalam laporan kinerja telah membandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun tersebut dengan capaian yang ada dalam RPJMD maupun Renstra, serta menyajikan dengan lengkap analisis faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian kinerja dan analisis efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mendukung kinerja;
13. Menyajikan data *benchmark* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Kalimantan Timur maupun secara nasional sebagai bahan

- perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja yang dicapai sudah berada kondisi mana;
14. Memnfaatkan laporan kinerja yang telah disusun untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses penetapan target dan bahan reuiu dokumen utnuk perencanaan Kedepan;
 15. Menyusun pedoman evaluasi AKIP internal Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Memastikan Bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap PD;
 17. Melakukan *monitoring* atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
 18. Menyusun kebijakn *reward and punishment* dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sehingga dapat menjadi penyemangat setiap PD untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan dan mempertanggungjelaskan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur, dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhailan pencapaian kinerja.

Sebelum pembahasan lebih jauh, ada baiknya memahami terlebih dahulu pengertian Akuntabilitas Kinerja. Secara umum, artinya yakni jawaban transparan terkait keberhasilan misi dan kegagalan misi. Jawaban tentang dua hal, itu disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Lantas, siapa saja yang punya kewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja itu sendiri? Jawabannya, ada tiga : Perorangan, Badan Hukum dan Pimpinan Kolektif. Berakuntabilitas jadi hal wajib dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat selaku pengemban amanah masyarakat. Kewajiban ini sudah dilakukan dengan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Ketentuan pembuatan laporan, sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Isi laporan menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, RKT Tahun 2022, RKPD Tahun 2022, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.2
**PREDIKAT NILAI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
DALAM SKALA PENGUKURAN ORDINAL**

No	Persentase	Predikat
1	<100%	Tidak Tercapai
2	=100%	Tercapai/Sesuai Target
3	>100%	Melebihi Target

Dan Predikat Capaian Kinerja untuk realisasi Capaian Kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Sebagai Berikut :

Tabel 3.3
**PENCAPAIAN KINERJA SASARAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI BARAT 2022**

No	Kategori	Rata-Rata Capaian %	Keterangan
1	Melampaui Target	>100	MT
2	Sangat Baik	85.00 - 100	SB
3	Baik	70.00 - 84.99	B
4	Cukup Baik	55.00 - 69.99	CB
5	Kurang Baik	0 - 54.99	KB

Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuannya, demi mengukur peningkatan kinerja, serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah, adalah menentukan kinerja utama dari instansi pemerintah bersangkutan. Kinerja harus utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU jadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Kabupaten Kutai Barat dan Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas terhadap PDRB	%	15,2	12,27	80,72
2	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	0,525	1,42*	270,47
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	0,375	0,25	66,66
4	Tingkat Pengangguran terbuka	%	4,63	4,62	100,22
5	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	0,44	0,44	100
6	PDRB Perkapita	Juta	193,35	246,65	127,56
7	Indeks Kualitas Air	indeks	62,2	62,31	100,18
8	Indeks Kualitas Udara	indeks	93,34	91,50	98,03
9	Indeks Kualitas Lahan	indeks	66,55	66,41	99,79
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,95	13,09	101,09
11	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,5	8,78	103,30
12	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,05	73,10	100,06
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	82,46	100,57
14	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100
15	Nilai LPPD	Poin	3,6	3,0733**	85,36
16	Persentase Desa Mandiri (Jumlah)	%	0,12 (23)	0,1684 (32)	137,33

17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	84,07	84,62	100,65
18	Nilai SAKIP	Poin	66	62,07	94,04
19	Persentase penduduk berakses air minum	%	80,60	86,84	107,7
20	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	99,5	86,26	86,69
21	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	28	8,96	32
22	Proporsi Panjanag Jaringan Jalan dalam kondisi mantap	%	61,20	65,00	106,20
23	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	48	55,67	115,98

Catatan/Note : *Data Tahun 2021 **Data Tahun 2019

Dari table tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada :

A. Misi 1 : Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kawasan Berdasarkan Potensi Unggulan Lokal Secara Berkelanjutan

1. Kontribusi Sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB, mencapai 80,72%.
2. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB, mencapai 270,47% (Data Sementara).
3. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB, mencapai 66,66%.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka, mencapai 100,22%.
5. Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, mencapai 100%.
6. PDRB Perkapita, mencapai 127,56%
7. Indeks Kualitas Air, mencapai 100,18%
8. Indeks Kualitas Udara, mencapai 98,03%
9. Indeks Kualitas Lahan, mencapai 99,79%

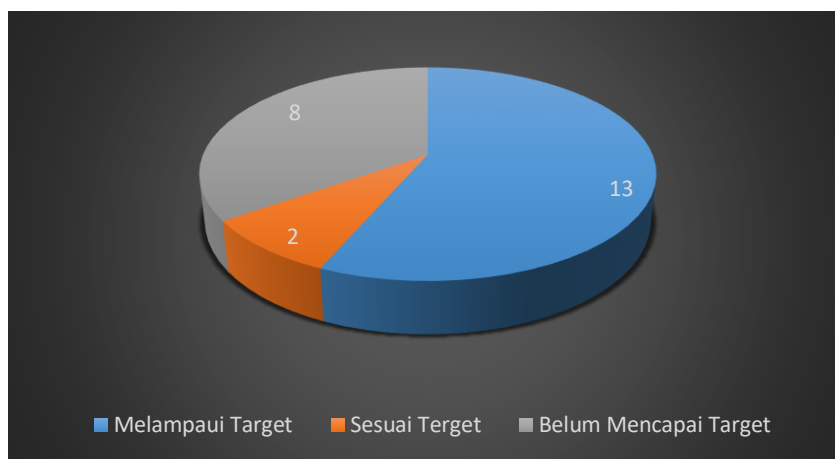
B. Misi 2 : Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Pendidikan dan Pelatihan yang didukung Optimalisasi Pelayanan Kesehatan

1. Rata-rata Lama Sekolah, mencapai 103,29%
2. Angka Harapan Lama Sekolah, mencapai 101,08%

3. Usia Harapan Hidup, mencapai 100,06%
- C. Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel
1. Indeks Kepuasan Masyarakat, mencapai 100,57%
 2. Opini BPK, mencapai 100%
 3. Nilai LPPD, mencapai 85,36%** (Data Sementara)
 4. Pesentase Desa Mandiri, mencapai 137,33%
 5. Indeks Pembangunan Gender (IPG), mencapai 100,65%
 6. Nilai SAKIP, mencapai 94,04%
- D. Misi 4 : Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penopang Ekonomi Kerakyatan
1. Persentase Penduduk Berakse Air Minum Layak, mencapai 107,74%
 2. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik, mencapai 86,69%
 3. Berkurangnya jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), mencapai 32%
 4. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap, mencapai 106,20%
 5. Cakupan Layanan Telekomunikasi, mencapai 115,98%

Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas dapat dilihat bahwa ada 12 (Dua Belas) Indikator yang Melampaui Target, 2 (dua) Indikator yang Mencapai Target dan 9 (Sembilan) Indikator yang Tidak Mencapai Target, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022**



3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISA KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk mewujudkan pencapaian Misi secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, lebih lanjut diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 2021.

Dalam laporan ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 maupun RKPD Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022, telah ditetapkan 11 (Sebelas) Sasaran dengan 23 (Dua Puluh Tiga) indikator kinerja (Outcome) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
JUMLAH INDIKATOR PER SASARAN

No	Sasaran	Jumlah	
1	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap perekonomian daerah	3	Indikator
2	Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru	2	Indikator
3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kutai Barat	1	Indikator
4	Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup	3	Indikator
5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	2	Indikator
6	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1	Indikator
7	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	6	Indikator
8	Meningkatnya dan meratanya kualitas Infrastruktur dasar	3	Indikator
9	Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	2	Indikator

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.6
**REKAPITULASI CAPAIAN SASARAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap perekonomian daerah	Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas terhadap PDRB	%	15,2	12,27	80,72
		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	0,525	1,42*	270,47
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	0,375	0,25	66,66
			Rata-Rata Capaian Kinerja			139,28
2.	Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru	Tingkat Pengangguran terbuka	%	4,63	4,62	100,22
		Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	0,44	0,44	100
			Rata-Rata Capaian Kinerja			100,11
3.	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kutai Barat	PDRB Perkapita	Juta	193,35	246,65	127,56
			Rata-Rata Capaian Kinerja			127,56
4.	Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	62,2	62,31	100,18
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,34	91,50	98,03
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	66,55	66,41	99,79
			Rata-Rata Capaian Kinerja			99,33
5.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,5	8,78	103,29
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,95	13,09	101,08
			Rata-Rata Capaian Kinerja			102,19
6.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,05	73,10	100,06
			Rata-Rata Capaian Kinerja			100,06
7.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	82,46	100,57
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100
		Nilai LPPD	Poin	3,6	3,0733**	85,36
		Persentase Desa Mandiri (Jumlah)	%	0,12	0,1684	137,33
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	84,07	84,62	100,65

		Nilai SAKIP	Poin	66	62,07	94,04
			Rata-Rata Capaian Kinerja			102,99
8.	Meningkatnya dan meratanya kualitas Infrastruktur dasar	Persentase penduduk berakses air minum	%	80,60	86,84	107,74
		Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	99,5	86,26	86,69
		Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	28	8,96	32
			Rata-Rata Capaian Kinerja			75,47
9.	Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi mantap	%	61,20	65,00	106,20
		Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	48	55,67	115,98
			Rata-Rata Capaian Kinerja			111,09
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN						106,45

Catatan/Note : * Data Tahun 2021 **Data Tahun 2019

Pengkategorian hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 3.7
PENKATEGORIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022

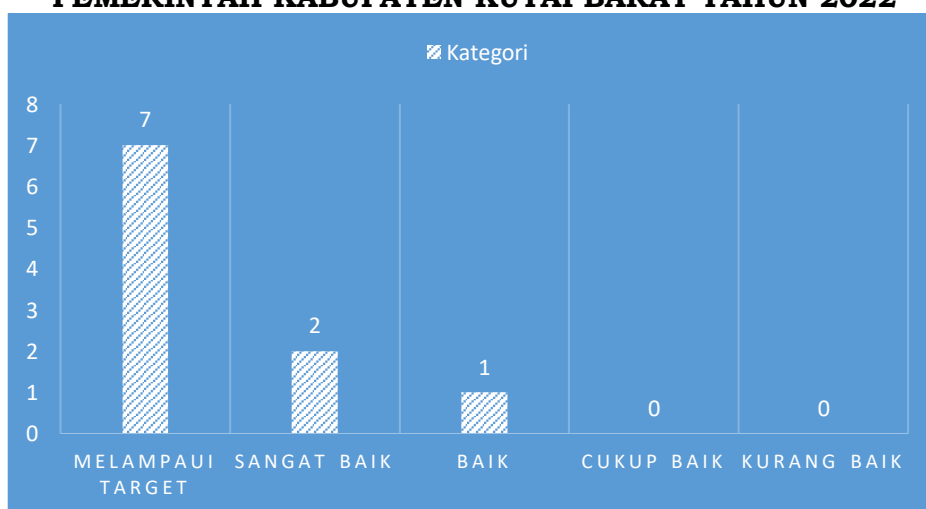
No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian (%)	0	55	70	85	≥100
				s/d <55	s/d <70	s/d <85	s/d <100	
1	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap perekonomian daerah	3	139,05					MT
2	Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru	2	100,11					MT
3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kutai Barat	1	127,56					MT
4	Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup	3	99,33				SB	
5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	2	102,20					MT
6	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1	100,06					MT

7	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	6	102,99					MT
8	Meningkatnya dan meratanya kualitas Infrastruktur dasar	3	75,47			B		
9	Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	2	111,09					MT
Jumlah		23	106,44			1	1	7

Berdasarkan kedua table diatas, maka kinerja capaian Sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Capaian Kinerja ≥ 100 % Kategori “Melampaui Target” sebanyak 7 Sasaran, atau 77,78 %
- Capaian Kinerja 85 s/d <100 Kategori “Sangat Baik” sebanyak 1 Sasaran, atau 11,11 %
- Capaian Kinerja 70 s/d <85 Kategori “Baik” sebanyak 1 Sasaran, atau 11,11 %
- Capaian Kinerja 55 s/d <70 Kategori “Cukup Baik” sebanyak 0 Sasaran, atau 0 %
- Capaian Kinerja 0 s/d <55 Kategori “Kurang Baik” sebanyak 0 Sasaran, atau 0 %

Grafik 3.2
**PENKATEGORIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022**



3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat setelah Perubahan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021 dengan total belanja sebesar **Rp 3.171.727.827.870,00** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp 2.348.182.915.987,76** atau dengan serapan dana APBD mencapai **74,03%**.

Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2022, komposisi belanja APBD Kabupaten Kutai Barat, sebagai berikut:

Tabel 3.8
**KOMPOSISI BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Operasi	1.912.229.230.574,00	1.462.185.343.006,76	76,46
2	Belanja Modal	805.220.708.122,00	511.213.955.568,00	63,49
3	Belanja Tidak Terduga	90.570.049.000,00	13.599.618.693,00	15,02
4	Belanja Transfer	363.707.840.174,00	361.183.998.720,00	99,31
Jumlah		3.171.727.827.870,00	2.348.182.915.987,76	74,03

Sumber : BKAD Kab. Kutai Barat

Jika dilihat dari komposisinya, Belanja Transfer memberikan kontribusi sebesar 99,31%, Belanja Operasi Sebesar 76,46%, Belanja Modal Sebesar 63,49%, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 15,02%.

Adapun Anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Barat yang diperjanjikan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp **1.720.318.057.756,-** lebih tinggi Rp **109.041.970.321,-** dari anggaran tahun 2021 yang mencapai Rp **1.611.276.087.435,-** Realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran

strategis pemerintah Kabupaten Kutai Barat 2022 adalah sebesar **1.100.742.803.552,64** atau **63,98%**, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.9
**ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT 2022**

No	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kontribusi Sektor	50.336.712.051,00	40.493.836.488,00	80,45
	Pertanian dalam Arti Luas terhadap PDRB			
2	Kontribusi Sektor	8.065.471.214,00	5.884.783.690,00	72,96
	Perikanan terhadap PDRB			
3	Kontribusi Sektor	14.062.495.821,00	8.175.242.406,00	58,14
	Pariwisata terhadap PDRB			
4	Tingkat Pengangguran	1.682.475.000,00	1.500.517.664,00	89,19
	terbuka			
5	Persentase Usaha Mikro	12.139.897.909,00	7.752.317.399,00	63,86
	menjadi Usaha Kecil			
6	PDRB Perkapita	N/A	N/A	N/A
7	Indeks Kualitas Air	20.331.697.775,00	5.536.840.400,00	27,23
8	Indeks Kualitas Udara			
9	Indeks Kualitas Lahan			
10	Harapan Lama Sekolah	160.818.802.053,00	119.265.101.146,50	74,16
11	Rata-Rata Lama Sekolah			
12	Usia Harapan Hidup	189.488.801.895,00	86.573.644.626,14	45,69
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	6.721.533.294,00	6.023.727.447,00	89,62
14	Opini BPK	784.482.176.799,00	395.708.234.222,00	50,44
15	Nilai LPPD	1.379.842.100,00	1.336.096.300,00	96,83
16	Persentase Desa Mandiri	6.053.959.081,00	5.819.801.219,00	96,13
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	1.210.937.298,00	1.154.786.792,00	95,36
18	Nilai SAKIP			
19	Persentase penduduk berakses air minum	15.733.111.715,00	13.875.344.606,00	88,20
20	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	13.353.919.500,00	12.626.243.239,00	94,55

21	Persentase rumah tangga pengguna listrik	1.041.571.300,00	996.466.724,00	95,67
22	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	430.719.433.169,00	385.628.909.016,00	89,53
23	Cakupan Layanan Telekomunikasi	2.695.219.782,00	2.390.910.168,00	88,71
Jumlah		1.720.318.057.756,00	1.100.742.803.552,64	63,98

Dari table diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja sasaran, yang diperjanjikan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2022.

Kondisi efektivitas anggaran belanja pada suatu Organisasi tidak selamanya mengalami peningkatan, sewaktu-waktu mengalami penurunan. Tingkat Efektivitas dapat dilihat dari apakah suatu program telah tercapai dari rencana yang ditetapkan. Semakin besar *output* yang dihasilkan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Supaya anggaran belanja menjadi efektif, maka diperlukan koordinasi dan kerjasama antar bidang-bidang yang bersangkutan dalam rangka pencapaian suatu program. Selain itu, diperlukan adanya pengawasan yang lebih baik dalam penyusunan anggaran belanja, supaya target atau rencana anggaran program yang akan digunakan dapat direalisasikan dengan maksimal. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.10
**EFEKTIFITAS ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN SASARAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022**

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran	Anggaran		Tingkat Efektifitas
				Realisasi (Rp)	%	
A. Misi 1						
1	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah	3	139,28	54.553.862.584,00	75,28	184,71

	berbasis kluster terhadap perekonomian daerah					
2	Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru	2	100,11	9.252.835.063,00	66,94	149,55
3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kutai Barat	1	127,56	N/A	N/A	N/A
4	Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup	3	99,33	5.536.840.400,00	27,23	364,78
B. Misi 2						
5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	2	102,20	119.265.101.146,50	74,16	137,81
6	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1	100,06	86.573.644.626,14	45,69	218,85
C. Misi 3						
7	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	6	102,99	410.042.645.980,00	51,27	200,88
D. Misi 4						
8	Meningkatnya dan meratanya kualitas Infrastruktur dasar	3	75,47	27.498.054.569,00	93,67	80,57
9	Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	2	111,09	388.019.819.184,00	89,53	124,08

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan semakin besar persentase capaian kinerja sasaran dibandingkan dengan persentase serapan anggaran maka dapat dipastikan semakin tinggi tingkat efektifitasnya.

ANALISIS PENCAPAIAN PER SASARAN STRATEGI

SASARAN 1

MENINGKATNYA PERAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH TERHADAP PEREKONOMIAN (PDRB)

A. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi Pertama yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan lokal secara berkelanjutan"** dengan tujuan **"Meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang semakin merata"**.

Adapun Indikator Kinerja sasaran ini adalah : **Kontribusi sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB**. Sedangkan Perangkat Daerah Penanggung Jawab keberhasilan sasaran ini adalah **Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pariwisata**.

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 1 menggunakan 3 indikator kinerja yaitu Kontribusi sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB dengan tingkat keberhasilan **157,36%** dengan kategori **"MELAMPAUI TARGET"**. Pencapaian target kinerja sasaran **Meningkatnya Peran dari Sektor Unggulan daerah terhadap perekonomian daerah (PDRB)** dapat dilihat pada tabel diawah:

Tabel 3.11
**CAPAIAN KINERJA MENINGKATNYA PERAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH
TERHADAP PEREKONOMIAN (PDRB) TAHUN 2022**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Nilai Capaian
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Kontribusi sector Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB	15,04	14,97	99,53	15,2	12,27	80,72	Tidak Tercapai
2	Kontribusi Sektor Kalautan dan Perikanan terhadap PDRB	0,5	1,42	284	0,525	1,42*	270,47	Melebihi Target
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,35	0,31	88,57	0,375	0,25	66,66	Tidak Tercapai
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		157,37			139,28			Melampaui Target

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2022 untuk sasaran 1 yakni Meningkatnya Peran Sektor Unggulan Daerah terhadap Perekonomian Daerah (PDRB) dapat disimpulkan bahwa sasaran 1 memberikan hasil kinerja yang baik bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan. Walaupun ada 2 Indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan namun jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya capaian tersebut mengalami peningkatan.

Adapun pencapaian sasaran pada indikator kinerja dapat di jelaskan melalui analisis sebagai berikut :

1. **Kontribusi Sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB.**
 - a. **Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Berdasarkan indikator ini kita akan memperoleh gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemakmuran masyarakat suatu wilayah.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, baik di tingkat wilayah provinsi maupun kabupaten atau kota digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga perubahan PDRB yang terjadi ditingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya Raharjo (Haryanto; 2008 : 38). Menurut BPS (2010). PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah.

Keadaan ekonomi suatu daerah dapat terlihat dari PDRB daerah tersebut. PDRB dapat mencerminkan kondisi dan pencapaian aktivitas atau kinerja perekonomian daerah. Informasi ini sangat dibutuhkan guna mendukung setiap kebijakan yang akan diambil oleh para *decision market* (pengambil keputusan), mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan disuatu daerah. Penyusunan PDRB suatu daerah merupakan salah satu upaya daerah tersebut dalam memberikan informasi yang jelas tentang gambaran pembangunan ekonomi, situasi, kondisi dan potensi suatu daerah sehingga memudahkan pemerintah maupun pihak swasta dalam menentukan pembangunan didaerah tersebut.

Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi disuatu daerah. Paling tidak terdapat lima hal yang didapat dari sektor pertanian, diantaranya :

1. Berperan secara langsung dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat;
2. Berperan dalam pembentukan pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
3. Menyerap tenaga kerja dipedesaan;
4. Berperan dalam penghasilan devisa dan penghematan devisa;
5. Berperan dalam pengendalian inflasi.

Dengan demikian sektor pertanian secara tidak langsung berperan dalam menciptakan iklim yang konsumtif bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya.

Sektor pertanian salah satu penyediaan pangan masyarakat, oleh karena itu percepatan pembangunan pertanian berperan penting dalam penyediaan pangan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat. Walaupun dalam kontribusinya dalam PDRB Kabupaten Kutai Barat terkadang mengalami penurunan, namun sektor pertanian masih akan tetap memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian secara keseluruhan, karena mempunyai keterkaitan yang luas dengan sektor ekonomi lainnya.

Peranan sektor pertanian bukan saja terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan andil yang cukup besar terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dan pemberantasan kemiskinan, sumber pendapatan, serta perekonomian Regional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hasil pendapatan di sektor pertanian dapat di ukur dari nilai PDRB yang dihasilkan sektor tersebut. Berikut data perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten Kutai Barat selama tahun 2018 - 2022 menurut Lapangan Usaha.

Tabel 3.12
**PERSENTASE DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA DI
KABUPATEN KUTAI BARAT 2018-2022**

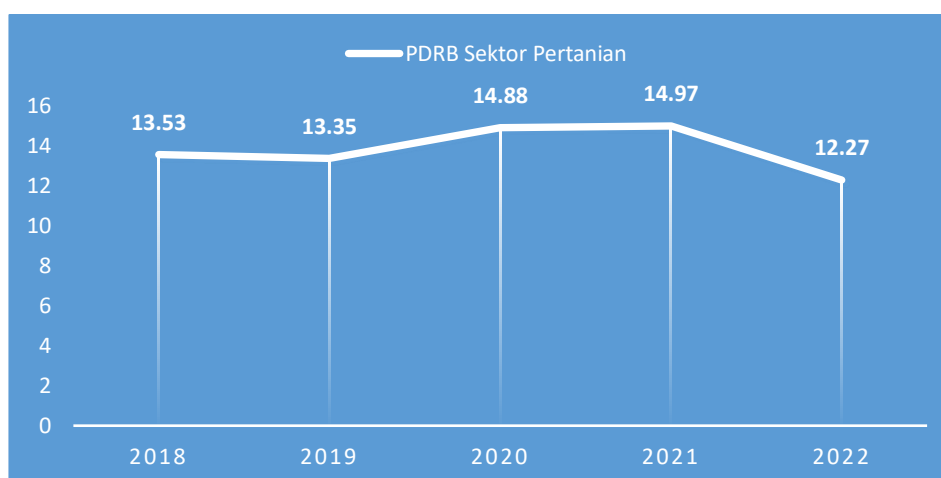
	Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,53	13,35	14,88	14,97	12,27
B	Pertambangan dan Pengalihan	51,85	49,88	45,50	49,15	57,88
C	Industri Pengolahan	5,69	5,66	6,54	6,38	5,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	11,08	11,88	12,11	10,84	9,22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,88	7,50	8,20	7,23	6,11
H	Transportasi dan Pergudangan	1,49	1,62	1,68	1,57	1,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,31	0,34	0,34	0,31	0,25
J	Informasi dan Komunikasi	0,98	1,05	0,34	1,15	0,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,12	0,13	1,22	0,13	0,11
L	Real Estate	0,52	0,54	0,14	0,49	0,40
M,N	Jasa Perusahaan	0,06	0,06	0,07	0,06	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,76	5,04	5,23	4,45	3,53
P	Jasa Pendidikan	1,56	1,66	1,92	1,78	1,41

Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80	0,88	1,15	1,12	0,87
R,S, T,U	Jasa lainnya	0,32	0,37	0,39	0,34	0,27
Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Sektor Pertanian sebagai salah penyumbang PDRB di Kutai Barat perkembangannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, **Namun pada tahun 2022 Sektor pertanian menyumbang 12,27% atau mengalami penurunan sebesar 2,7% dari Tahun 2021 sebesar 14,97.** Hal tersebut menjadi capaian terendah sejak tahun 2018. Untuk lebih jelasnya perkembangan kontribusi sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik 3.3
**PERANDINGAN PDRB SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN NASIONAL
TAHUN 2018 - 2022**



Tabel 3.13

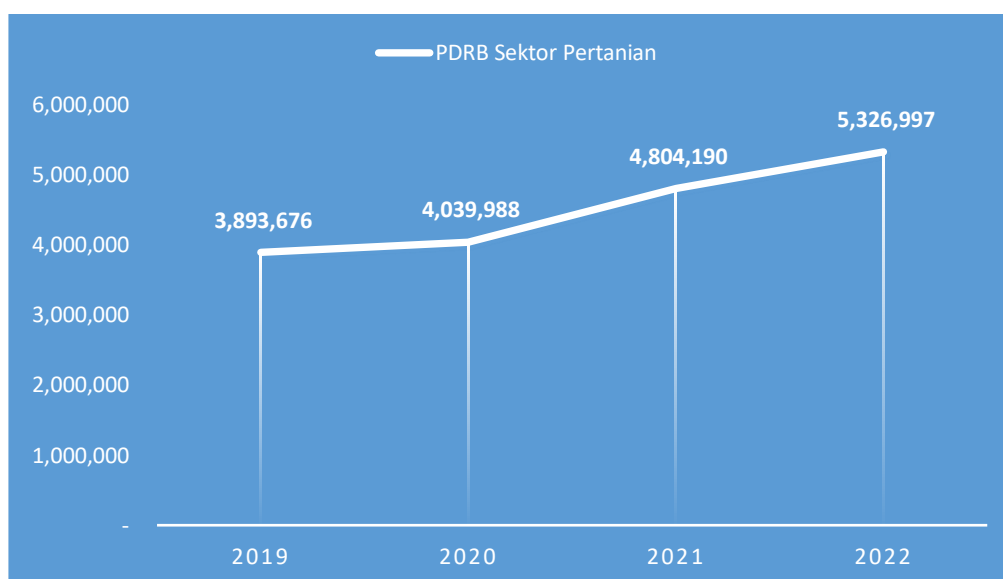
**NILAI PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 – 2022
(JUTA RUPIAH)**

Kategori		2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.893.675,82	4.039.987,96	4.804.189,55	5.326.997,27
B	Pertambangan dan Penggalian	14.560.392,93	12.411.103,03	15.773.477,49	25.126.174,38
C	Industri Pengolahan	1.649.725,66	1.779.212,35	2.046.268,01	2.277.554,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.999,02	7.921,81	8.166,16	8.696,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.621,68	9.042,13	10.197,23	11.549,07
F	Konstruksi	3.465.229,77	3.298.833,19	3.477.715,24	4.00.792,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.188.234,49	2.234.134,50	2.320.102,31	2.651.405,92
H	Transportasi dan Pergudangan	472.258,70	457.397,34	504.141,07	606.511,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99.273,75	93.432,47	98.296,45	110.588,49
J	Informasi dan Komunikasi	306.210,73	334.089,32	369.496,73	411.637,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	36.762,74	37.781,61	41.546,40	47.164,42
L	Real Estate	157.639,98	156.236,15	156.825,56	171.928,22
M,N	Jasa Perusahaan	18.388,28	17.835,78	18.072,63	19.068,91
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.423.723,89	1.357.300,48	1.427.041,23	1.521.834,74
P	Jasa Pendidikan	484.692,77	523.244,48	570.123,11	612.669,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	256.763,55	308.784,84	358.051,21	375.895,19
R,S,T U	Jasa lainnya	106.551,55	106.207,21	109.119,23	118.593,03
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		29.135.145,30	27.172.544,64	32.092.829,61	43.409.061,26

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Sedangkan berdasarkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Pertanian menyumbang PDRB sebesar 5.326.997,27 Juta yang mengalami kenaikan sebesar 522.807,72 Juta dari tahun 2021 sebesar 4.804.189,55 Juta. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah:

Grafik 3.4
PERTUMBUHAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN DALAM ARTI LUAS TERHADAP PDRB (Juta Rupiah) 2019 - 2022



Peningkatan sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB disumbang dari beberapa sektor diantaranya dari sektor Pertanian, Perkebunan Peternakan, dan Perikanan. Pada tahun 2022 Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat berfokus dalam meningkatkan Prasarana Pertanian dalam hal ini peningkatan Jalan Usaha Tani Tanaman Pangan dan Jalan Usaha Tani Perkebunan, hal tersebut bertujuan untuk melancarkan mobilisasi hasil tani maupun hasil perkebunan yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Berikut Jumlah Cakupan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022.

Tabel 3.14
**JUMLAH CAKUPAN PENYEDIAAN SARANA PERTANIAN
TAHUN 2022**

No	Cakupan Penyediaan Sarana Pertanian	Target	Realisasi
1	Alat Mesin Pertanian (Unit)	13	88
2	Benih Padi (Kg)	20.000	14.950
3	Benih Jagung (Kg)	10.000	817
4	Bibit Tanaman Buah-Buahan (Bibit)	3.500	2.420
5	Pupuk Tanaman Pangan (Kg)	100.000	60.234
6	Bibit Karet (Bibit)	80.000	-
7	Bibit Kakao (Bibit)	60.000	1.800
8	Bibit Lada (Bibit)	150.000	-
9	Pupuk Tanaman Perkebunan (Kg)	12.000	43.550
10	Pembeku Lateks (Liter)	5.000	1.667

Sumber : Dinas Pertanian 2022

Tabel 3.15
**JUMLAH CAKUPAN PENYEDIAAN PRASARANA PERTANIAN
TAHUN 2022**

No	Cakupan Penyediaan Prasarana Pertanian	Target	Realisasi
1	Dokumen Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B	1	1
2	Jalan Usaha Tani Tanaman Pangan (Meter)	5.000	8.403
3	Jalan Usaha Tani Perkebunan (Meter)	5.000	47.882
4	Cetak Sawah (Ha)	64	11
5	Optimalisasi Lahan Sawah (Ha)	101	-
6	Pembangunan Rehabilitasi BPP (Unit)	1	2
7	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum (Ha)	10	-

Tabel 3.16
**DATA PERKEMBANGAN POPULASI TERNAK
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022**

No	Jenis	Jumlah
1	Sapi	6.660
2	Kerbau	879
3	Kambing	4.281
4	Babi	29.990
5	Ayam Buras	216.747
6	Ayam Petelur	22.308
7	Ayam	2.582.059
8	Itik	19.662

Sumber : Dinas Pertanian 2022

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Adapun yang menjadi Faktor Pendukung terkait Kontribusi sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB yaitu :

1. Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
2. Pemberian Bantuan berupa bibit ternak kerbau, sapi, kambing, babi dan unggas.

Adapun yang menjadi Faktor Penghambat terkait Kontribusi sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB yaitu :

1. Kurangnya anggaran terkait sarana pertanian
2. Adanya perubahan cuaca yang tidak menentu berakibat gagal panen pada persawahan
3. Kurangnya pengusaha peternakan yang ada di Kabupaten Kutai Barat

Adapun solusi yang dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan sarana dan Prasarana pertanian yang lebih memadai
2. Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian di Kabupaten Kutai Barat
3. Meningkatkan Koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga

terkait dalam meningkatkan pertanian di Kabupaten Kutai Barat Strategi yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka mendukung kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB diantaranya adalah sebagai berikut :

Meningkatkan produktivitas usaha kluster karet, dengan arah kebijakan :

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani/koperasi petani sebagai suatu badan usaha ekonomi yang memenuhi syarat untuk memperoleh HGU lahan. Perluasan kebun karet rakyat diarahkan hanya pada wilayah wilayah yang sesuai dan tersedia serta masyarakatnya telah mengetahui budidaya karet secara baik;
- b. Penyediaan dana untuk pembangunan kebun karet rakyat; secara aktif memberikan fasilitasi agar petani yang tergabung dalam kelompok tani/koperasi petani dapat memperoleh dana dari program revitalisasi perkebunan;
- c. Perluasan areal tanaman produktif dengan peremajaan kebun karet rakyat tanaman tua/tanaman rusak;
- d. Memberikan dukungan/bantuan alsinta, dan saprodi dalam upaya meningkatkan produktivitas usaha petani karet untuk Peningkatan kemampuan petani dalam mengadakan sarana produksi sesuai standar dengan Ketersediaan Bibit karet unggul bersertifikat, pupuk anorganik, herbisida, dan pestisida;
- e. Akses permodalan usaha bagi petani karet;
- f. Pembinaan teknik *good agricultural practices*=GAP dan manajemen dalam upaya meningkatkan produktivitas usaha dan mutu karet melalui Peningkatan pengetahuan petani tentang budidaya karet yang baik dengan peningkatan intensitas penyuluhan. Keberadaan BPP didukung oleh petugas penyuluh lapangan (PPL) yang berkompeten di bidang budidaya karet dan peningkatan kualifikasi pendidikan PPL ke tingkat yang lebih tinggi untuk peningkatan kapasitas BPP.
- g. Penguatan bargaining position petani karet melalui penguatan kelompok tani karet; menumbuhkan penangkar-penangkar bibit karet unggul bersertifikat di wilayah sentra produksi karet, memanfaatkan kebun-kebun entres karet unggul yang sebagai sumber perbanyak bibit.

- h. Membina kelompok tani karet untuk dapat menyusun RDKK sehingga mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi (Urea, SP-36, ZA, NPK) dan mendorong tumbuhnya distributor pupuk serta kios pengecer di wilayah Kutai Barat .
- i. Peningkatan nilai tambah produk karet melalui mendorong petani meningkatkan mutu lum (harus bersih dari ampuran kotoran) sehingga tidak terkena rafaksi/potongan pada saat penjualan.
- j. Meningkatkan jumlah PBS untuk investasi pabrik pengolahan karet di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- k. Revitalisasi kelompok tani karet; melalui Kelembagaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani menjadi kelompok agribisnis yang professional Dan petani dapat mengadakan sarana produksi untuk melaksanakan budidaya karet sesuai standar.
- l. Menjalin kemitraan dengan perusahaan besar dan BUMN untuk menampung hasil karet.

2. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB

a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya

Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah dalam periode tertentu. Salah satu sektor PDRB adalah Pertanian dalam arti luas yang didalamnya terdapat sektor Kelautan dan Perikanan.

Dengan semakin banyak jumlah produksi perikanan baik yang diperoleh dari hasil budi daya maupun dari hasil perikanan diperairan umum yang ada di kawasan Kabupaten Kutai Barat serta adanya investasi di bidang Perikanan akan memberikan dampak yang positif terhadap PDRB di Kabupaten Kutai Barat terutama dari sektor-sektor perikanan itu sendiri.

Kedua sektor itu merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor perikanan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya.

Tiap tahunnya sektor perikanan memberikan kontribusi positif terhadap PDRB Kabupaten Kutai Barat dimana tiap tahunnya terus

mengalami peningkatan yang cukup baik tentu ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian di Kabupaten Kutai barat.

Pertumbuhan perikanan subsektor perikanan rata-rata per tahun sebesar 9,09%, subsektor perikanan umum (perikanan tangkap) sebesar 3,60% dan sub sektor perikanan budidaya sebesar 13,06%.

Sedangkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Kutai Barat sebesar 1,42% atau rata-rata setiap tahunnya 0,9%. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat selalu berupaya untuk meningkatkan produksi perikanan melalui pemberian bantuan kepada nelayan berupa perahu dan mesin ketinting, Cool Box, Alat Tangkap Ikan (Jala Lempar), pembuatan keramba dan pelatihan pengolahan hasil perikanan.

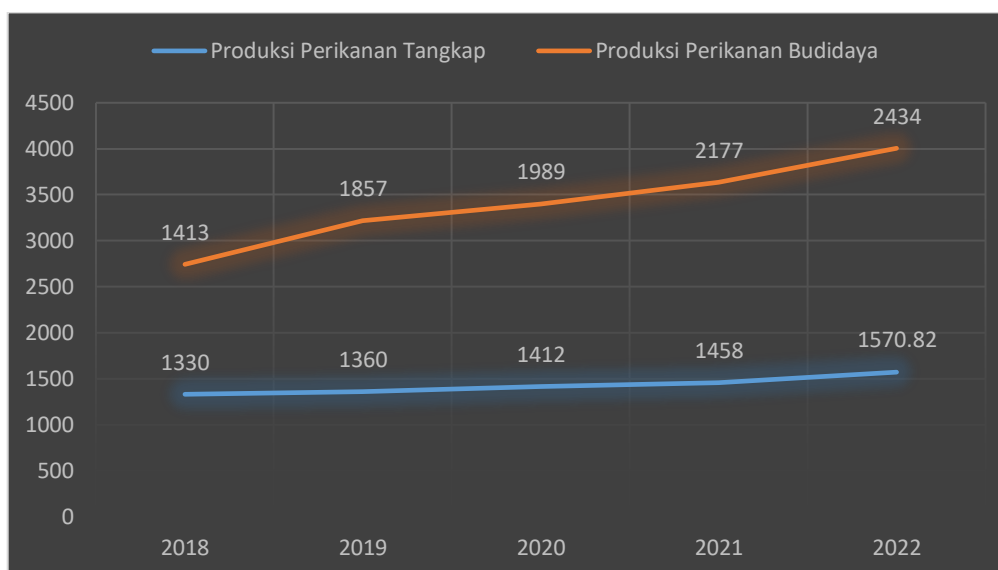
Dengan pemberian bantuan kepada nelayan dan pelatihan pengolahan hasil perikanan diharapkan akan memberikan dampak terhadap peningkatan PDRB sektor perikanan.

Tabel 3.17
**PRODUKSI PERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2018 -2022**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.330	1.360	1.412	1.485	1.570,82
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.413	1.857	1.989	2.177	2.434
Total		Ton	2.743	3.217	3.401	3.662	4.004,82

Sumber : Dinas Perikanan Kutai Barat 2022

Grafik 3.5
**PRODUKSI PERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2018 -2022**



Berdasarkan Grafik diatas Produksi Perikanan di Kabupaten Kutai Barat 2018-2022 selalu mengalami kenaikan.

Berikut ini data Jumlah Produksi Perikanan Tangkap menurut jenis usaha dan kecamatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.18
**JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
MENURUT JENIS USAHA DAN KECAMATAN TAHUN 2022**

No	Kecamatan	Jumlah	Jenis Usaha	
			Laut	Perairan Umum
1	Damai	66,01	0,00	66,01
2	Muara Pahu	245,94	0,00	245,94
3	Bongan	9,67	0,00	9,67
4	Jempang	366,02	0,00	366,02
5	Mook Manaar Bulatn	177,38	0,00	177,38
6	Penyinggahan	311,28	0,00	311,28
7	Nyuatan	12,53	0,00	12,53
8	Long Iram	87,57	0,00	87,57
9	Tering	128,35	0,00	128,35
10	Barong Tongkok	18,20	0,00	18,20
11	Melak	90,23	0,00	90,23
12	Sekolaq Darat	7,90	0,00	7,90

13	Linggang Bigung	4,78	0,00	4,78
14	Muara Lawa	22,84	0,00	22,84
15	Siluq Ngurai	13,44	0,00	13,44
16	Bentian Besar	8,70	0,00	8,70
Jumlah Total		1.570,82	0,00	1.570,82

Sumber : Dinas Perikanan Kutai Barat 2022

Berikut ini data Jumlah Produksi Perikanan Budidaya menurut jenis usaha dan kecamatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.19
**JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
MENURUT JENIS USAHA DAN KECAMATAN TAHUN 2022**

No	Kecamatan	Jumlah	Kegiatan Budidaya		
			KJA	Kolam	Keramba
1	Melak	239,82	27,90	55,17	156,75
2	Barong Tongkok	43,54	0,00	40,64	2,9
3	Linggang Bigung	49,19	0,00	49,19	0,00
4	Damai	44,03	0,00	13,58	30,45
5	Muara Lawa	36,59	0,00	4,04	32,548
6	Long Iram	176,19	0,00	8,87	167,32
7	Mook Manaar Bulatn	251,67	31,05	15,63	204,99
8	Sekolaq Darat	52,04	0,00	52,04	0,00
9	Nyuatan	30,86	0,00	30,86	0,00
10	Tering	360,06	80,49	29,54	250,03
11	Muara Pahu	432,66	80,74	11,71	340,21
12	Penyinggahan	424,21	0,00	10,546	413,66
13	Jempang	286,82	0,00	71,07	215,75
14	Bongan	3,60	0,00	3,60	0,00
15	Bentian Besar	0,97	0,00	0,97	0,00
16	Siluq Ngurai	2,4	0,00	2,4	0,00
Jumlah Total		2.434,64	220,18	399,856	1814,608

Sumber : Dinas Perikanan Kutai Barat 2022

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Adapun yang menjadi Faktor Pendukung terkait Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB yaitu :

4. Nelayan sebagai penerima merupakan nelayan yang telah mendapatkan pembinaan dari Dinas Perikanan
5. Tersedianya tenaga teknis yang terlibat dalam pelaksanaan

kegiatan

6. meningkatnya Jumlah Bantuan Sarana Tangkap di Tahun 2022, diantaranya Keramba Jaring Apung (KJA), Perahu dan Mesin Ketinting, Cool Box, dan Alat Tangkap (Jala Lempar)
7. Meningkatnya Jumlah Bantuan seperti Benih Ikan, Pakan Benih, Pakan Pembesaran, Mesin Pembuat/Pencetak Pelet Ikan, dan Kolam bundar
8. Terlaksananya Pemetaan Kegiatan
9. Penetapan Kelompok Penerima sesuai Prosedur dan Aturan
10. Terlaksananya Identifikasi/Verifikasi, Pembinaan dan Pendampingan yang Intensif
11. Tersedianya SDM yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
12. Adanya Keterlibatan Penyuluh Perikanan untuk mendukung Pelaksanaan Kegiatan.

Strategi yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas subsektor perikanan dalam mendukung kontribusi sektor perikanan dalam arti luas terhadap PDRB diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Integrasi pengelolaan hutan gunduk di sekitar DAS Mahakam dan Penegakan aturan sepadan sungai dan danau;
- b. Pengembangan jumlah pembudidaya ikan, Pengembangan kapasitas dan kapabilitas pembudidaya ikan;
- c. Pengembangan teknologi perikanan yang ramah lingkungan meliputi Teknologi benih, Teknologi pakan, Teknologi pengelolaan kualitas air, Teknologi dan manajemen kesehatan ikan, Teknologi pascapanen;
- d. Pengembangan infrastruktur produksi guna mendukung usaha perikanan yang tangguh melalui Pembangunan dan pengembangan hatchery ikan dan unit pembenihan/pendederan rakyat (UPR), Pembangunan dan pencetakan kolam, Pengembangan keramba apung dan keramba tancap, Pengembangan pabrik pakan, Pembangunan dan pengembangan pasar ikan higienis

- e. Pengembangan sarana produksi yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat harga yang mencakup Pengembangan benih, Pengembangan pakan, Pengembangan obat-obatan ikan, Pengembangan peralatan perikanan. Pemberian bantuan/stimulan berupa bibit ikan berkualitas, pakan ikan, peralatan dan perlengkapan budidaya ikan);
- f. Pengembangan Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan (BBPPI);
- g. Pengembangan kelembagaan yang efektif dan tangguh melalui Pembentukan, penguatan dan pembinaan kelompok, Pemberdayaan dan penguatan penyuluh lapangan Penguatan lembaga usaha dalam sistem agribisnis perikanan, Pembinaan teknik produksi budidaya ikan.
- h. Pengembangan unit kolam air deras;
- i. Bantuan pemasaran hasil budidaya ikan.
- j. Pengembangan industri pengolahan perikanan;

3. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

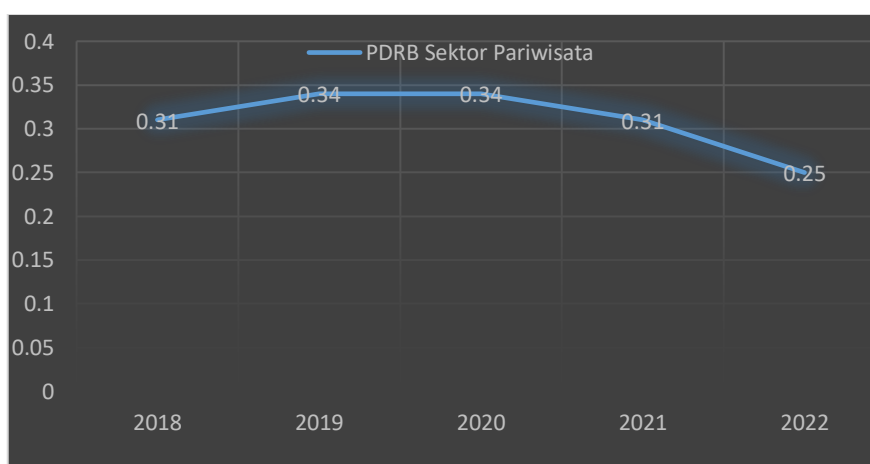
a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya

Potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Kutai Barat sangatlah banyak antara lain: wisata alam, budaya, religi dan minat khusus seperti wisata agro. Pesona pariwisata yang dimiliki Kutai Barat membuat banyak wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara berkunjung menikmati keindahan pariwisata di Kutai Barat. Sektor pariwisata merupakan sektor yang dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah, termasuk di Kutai Barat. Pariwisata Kutai Barat sudah dikenal oleh wisatawan di beberapa daerah Kabupaten/Kota khususnya untuk di wilayah Kalimantan Timur. Pariwisata dapat menjadi industri andalan untuk daerah yang tidak memiliki sumber daya alam migas, hasil hutan dan industri manufaktur.

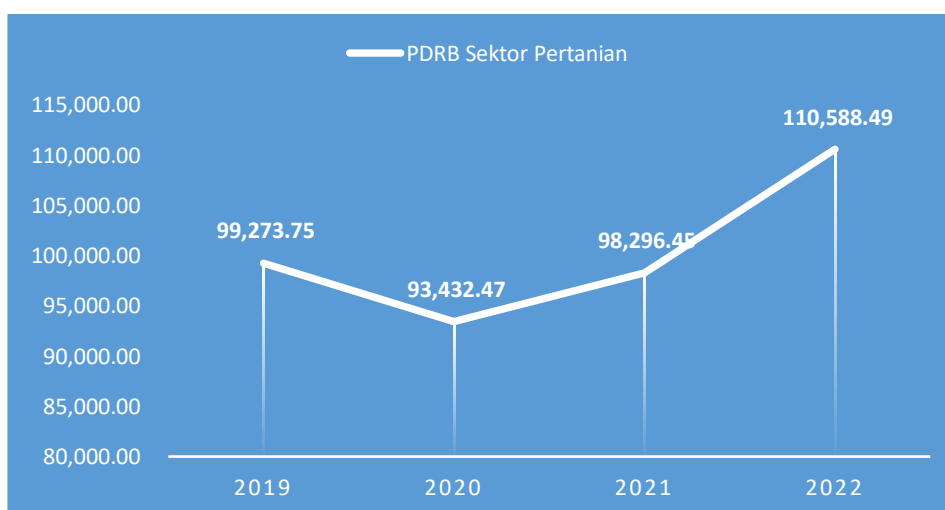
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah yang disebabkan berbagai sektor. Salah satunya sektor Pariwisata, khususnya di Kutai Barat. Kontribusi sektor pariwisata yang dilihat dari variabel investasi di bidang hotel, jumlah

wisatawan asing dan lama mereka tinggal. Dari hasil analisis data time series selama 4 tahun dengan metode Ordinary Least Square (OLS) menunjukkan bahwa, sektor Pariwisata berdasarkan ketiga variabel tersebut mempunyai kontribusi positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Barat secara bersama-sama (simultan).

Grafik 3.6
**PDRB SEKTOR PARIWISATA (AKOMODASI DAN MAKAN MINUM)
TAHUN 2018 – 2022 (Persen)**



Grafik 3.7
**PDRB SEKTOR PARIWISATA (AKOMODASI dan MAKAN MNUM)
(Juta Rupiah) 2019 - 2022**



Berdasarkan Grafik diatas PDRB Sektor Pariwisata (Akomodasi dan Makan Minum) berdasarkan Persentase mengalami penurunan dari tahun 2021 yang mencapai 0,25 persen, namun berdasarkan pendapatan PDRB Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan minum selalu mengalami kenaikan mencapai 110.588,49 Juta Rupiah.

Tabel 3.20
JUMLAH WISATAWAN KUTAI BARAT 2017 - 2022

Tahun	Wisatawan		
	M mancanegara	Domestik	Jumlah
2017	390	28.584	28.974
2018	279	32.205	32.484
2019	356	65.652	66.008
2020	28	25.929	25.957
2021	5	10.871	10.876
2022	170	68.899	69.069

Sumber : Dinas Pariwisata dan BPS Kutai Barat dalam angka

Mengembangkan sektor pariwisata merupakan salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan ekonomi dalam jangka panjang yang perlu diperhatikan.

Tabel 3.21
JUMLAH TEMPAT WISATA, PENGUNJUNG DAN RATA-RATA TARIF MASUK

Tempat Wisata	Pengunjung			Tiket Masuk/Orang	Keterangan
	2019	2020	2022		
Danau Aco	8.303	4.693	958	5.000	Dikelola Dispar
Danau Bahadaq	299	59		5.000	Dikelola Dispar
Danau Beluq	885	427	1.305	5.000	Dikelola Dispar
Air Terjun Gemuruh	479	73	231	5.000	Dikelola Dispar
Air Terjun Mapan	5.583	1.694	4.617	5.000	Dikelola Dispar
Air Terjun Manarung	591	65	209	5.000	Dikelola Dispar
Air Terjun Tabalas	4.273	1.225	1.782	5.000	Dikelola Dispar

Air Terjun Geronggong	96	7	405	5.000	Dikelola Dispar
Air Terjun Inar	29		5.000	
Kersik Kerbangan	459	4.200	482	5.000	Dikelola Dispar
Pancuran Sengkreaq	285	92		5.000	Dikelola Dispar
Situs Sendawar	305	64	102	5.000	Dikelola Dispar
Lamin Mancong	1.227	266	772	N.a	Dikelola Provinsi
Hutan Adat Jaras	N.a	N.a	83	5.000	Dikelola Dispar
Lamin Tembisaq	54	N.a	67	N.a	
Pemandian Tirta Tapak	6.475	1.605	2.374	15.000	Dikelola swasta
Kolam renang TKP	22.532	6.833	9.825	25.000	Dikelola swasta
Cia Wisata	3.267	233		5.000	Dikelola swasta
Taman Budaya Sendawar	5.568	753			Dikelola Dispar
Hemaq Beniung			5.253	2.000	Dikelola Kampung
Gunung S			4.031	5.000	Dikelola Kampung
Perkemahan Batuq Bura			34.989	5.000	Dikelola Kampung

Sumber : Dinas Pariwisata dan BPS Kutai Barat dalam angka

Pada Tahun 2022 Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat dari seluruh Obyek Wisata yang ada di Kabupaten Kutai barat hanya ada 4 obyek Wisata yang dapat ditarik retribusinya yaitu Danau Aco, Danau Beluq, Jantur Mapan dan Jantur Tabalas. Tidak dapatnya dilakukan penarikan retribusi pada obyek wisata di Kabupaten Kutai Barat dikarenakan persoalan regulasi, salah satu contohnya adalah Lamin Mancong di Kecamatan Jempang yang dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pariwisata Kutai Barat hanya mendata jumlah pengunjung.

Ada beberapa faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain tenaga kerja, kapital, sumberdaya alam, tingkat teknologi dan kondisi sosial dalam negara yang bersangkutan. Banyak keuntungan yang didapat dari pengembangan potensi sektor pariwisata di Kutai Barat karena sektor pariwisata memiliki peranan penting dalam membentuk besaran PDRB Kabupaten Kutai Barat. Perkembangan sektor pariwisata di Kutai Barat dari tahun ke tahun cukup signifikan. Kontribusi sektor pariwisata pada tahun 2021, pariwisata memberikan kontribusi sebesar Rp. 93.432.000.000,00 terhadap PDRB Kutai Barat. Kemudian pada

tahun 2022 kontribusi sektor pariwisata meningkat menjadi Rp. 98.300.000.000,00 (BPS, Kubar dalam angka 2022), untuk data tahun 2022 sampai dengan laporan ini buat belum rilis dari BPS. Dari total kontribusi tersebut perlu diteliti mana faktor yang perlu diberikan perhatian lebih untuk saat ini digarap sebagai skala prioritas pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Menurut Hysa (2012) dua komponen utama yang mempengaruhi pergerakan pariwisata adalah jumlah wisatawan dan lama tinggal wisatawan. Saat ini pariwisata telah menjadi kebutuhan pokok sebagian besar manusia di dunia. Semakin sejahtera seseorang maka semakin banyak peluang dan keinginan untuk melakukan perjalanan wisata. Hal ini dapat dilihat dari total kunjungan wisatawan ke Kutai Barat yang semakin meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2022 wisatawan yang berkunjung ke Kutai Barat berjumlah 69.069 Orang, angka ini naik sebesar 635% bila dibandingkan dengan kunjungan di tahun 2021 yang jumlahnya 10.978 Orang. Hal ini menjadi jumlah pengunjung wisata terbanyak sejak Tahun 2017. Jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di suatu daerah. Pengaruh kontribusi sektor pariwisata yang lain dapat dilihat dari lama tinggal wisatawan yang berkunjung ke Kutai Barat.

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Situasi Pandemi COVID-19, jasa usaha di bidang pariwisata mengalami penurunan kunjungan wisatawan yang sangat signifikan. Hal tersebut dikarenakan ditebitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia, mulai Tanggal 2 April 2020 hingga akhir tahun 2022 belum dicabut kembali pelarangan tersebut.
2. Masih terbatasnya upaya pembangunan sarana dan prasarana pendukung wisata di Kutai Barat.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan pariwisata.

Strategi untuk memecahkan masalah dan kendala tersebut adalah:

1. Meningkatkan peran Aktif masyarakat untuk mengembangkan kepariwisataan dalam rangka mewujudkan peran pariwisata sebagai penggerak perekonomian masyarakat.

B. CAPAIAN KINERJA SASARAN DIBANDINGKAN DENGAN RPJMD

Tabel 3.22
**REALISASI KINERJA SASARAN 1 DIBANDINGKAN
DENGAN TARGET AKHIR RPJMD**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI S/D TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD 2026	PRESENTASE CAPAIAN KINERJA
KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN DALAM ARATI LUAS TERHADAP PDRB	12,27	15,85	77,41
KONTRIBUSI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP PDRB	1,42	0,675	210,37
KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB	0,25	0,55	45,45

SASARAN 2

TERCIPTANYA LAPANGAN KERJA BARU DAN WIRAUSAHAWAN LOKAL BARU

A. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke Pertama yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu "Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan lokal secara berkelanjutan" dengan tujuan "Menurunkan Angka Kemiskinan".

Adapun Indikator Kinerja sasaran ini adalah : **Tingkat Pengangguran Terbuka** dan **Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil**. Sedangkan Perangkat Daerah Penanggung Jawab keberhasilan sasaran ini adalah **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** dan Dinas **Perdagangan, Koperasi dan UMK**.

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 2 menggunakan 2 indikator kinerja yaitu "**Tingkat Pengangguran Terbuka**" dan "**Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil**" dengan tingkat keberhasilan **100,11%** dengan kategori "**Melampaui Target (MP)**". Pencapaian target kinerja sasaran **Terciptanya Lapangan Kerja baru dan wirausahawan lokal baru** seperti tampak pada tabel 3.21:

Tabel 3.23
CAPAIAN KINERJA TERCIPTANYA LAPANGAN KERJA BARU DAN WIRAUSAHAWAN LOKAL BARU

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Nilai Capaian
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,8	5,14	-2,28	4,63	4,62	100,22	Melebihi Target
2	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	0,35	0,87	248,57	0,44	0,44	100	Tercapai
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		248,57			100,11			Melampaui Target

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2022 untuk sasaran 2 yakni Terciptanya Lapangan Kerja baru dan Wirausahawan baru dapat disimpulkan memberikan hasil kinerja yang sangat baik.

Adapun pencapaian sasaran pada indikator kinerja dapat di jelaskan melalui analisis sebagai berikut :

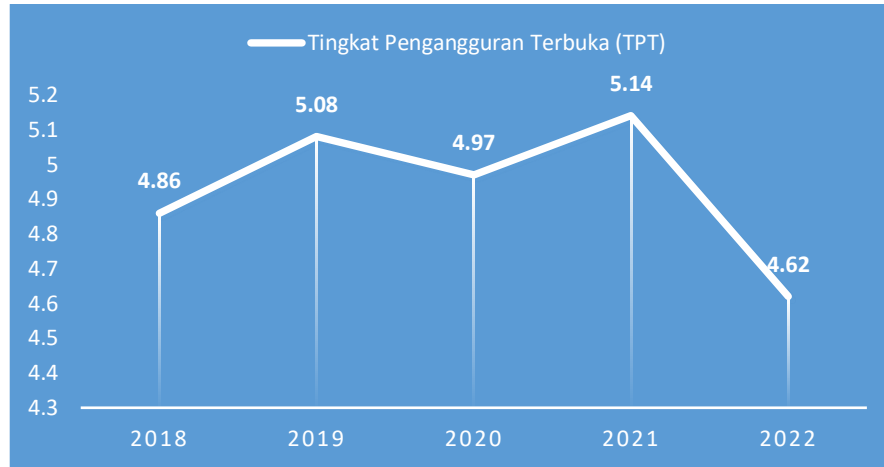
1. Tingkat Pengangguran Terbuka

a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya

Pengangguran merupakan keadaan seseorang belum mendapatkan pekerjaan dimana seseorang tersebut termasuk dalam angkatan kerja (Sukirno, 1994). Pengangguran terbuka merupakan salah satu jenis pengangguran dimana angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Konsep milik Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka dapat diukur dengan presentase pengangguran terhadap angkatan kerja, hasil perhitungan tersebut dinamakan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Berdasarkan data dari BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kutai Barat berfluktuasi, di tandai dengan adanya penurunan dan juga peningkatan. Dimulai pada tahun 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka Kutai Barat ada diangka 4,86% kemudian naik 0,22 % di tahun 2019 menjadi 5,08%. Ditahun 2020 mengalami penurunan 0,11% diangka 4,97. Namun di tahun 2021 kenaikan sebesar 0,17 % diangka 5,14% dan Untuk Tahun 2022 TPT mengalami Penurunan sebesar 0,52 diangka 4,64 yang menjadi penurunan tertinggi sejak 2018 dan menjadikan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kutai Barat terendah sejak 2018. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada grafik 3.4 berikut ini.

Grafik 3.8
**PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
KABUPATEN KUTAI BARAT**



Sumber data : BPS, Kutai Barat dalam Angka

Secara umum ada 5 penyebab terjadinya pengangguran, yaitu :

1. Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja;
2. Terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi;
3. Kondisi pandemic covid-19 dengan adanya kebijakan PPKM;
4. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja;
5. Kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang tidak sesuai dan motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah.

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan Kutai Barat, khususnya dalam rangka penurunan angka pengangguran. Upaya yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan tenaga kerja trampil, kompeten dan profesional yang mengarah pada standar kualifikasi tenaga kerja yang memiliki kompeten knowledge, skill dan attitude serta ketrampilan sosial (*social skill*), adalah dengan melaksanakan program-program pelatihan/*vocational training* yang intens dan berkelanjutan melalui lembaga pelatihan kerja baik pemerintah maupun swasta dan

stake holders yang lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pelatihan.

Pelatihan kerja harus didukung sumber daya pelatihan yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, yaitu : 1. Program pelatihan 2. Sumber daya manusia termasuk instruktur 3. Peralatan dan sarana prasarana 4. Bahan pelatihan 5. Manajemen 6. Anggaran / dana.

Permasalahan ketenagakerjaan memang sangat kompleks, hal ini antara lain disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah angkatan kerja dari waktu ke waktu, dari pertumbuhan penduduk dan perkembangan pendidikan.

Setiap tahun akan memberikan kontribusi penganggur baru yang berasal dari lulusan baru dari pendidikan (*fresh graduate*). Belum lagi dengan kondisi pandemi covid-19 saat ini juga berdampak yang luar biasa dibidang ketenagakerjaan, seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kasus Perselisihan Hubungan Industrial. Pada Tahun 2022 Jumlah PHK sebanyak 16 Kasus dan 12 Kasus Perselisihan Hubungan Industrial terkait HAK. Dari 2 Kasus tersebut sebanyak : 1250 orang tenaga kerja yang di PHK dan sebanyak 73 Tenaga Kerja yang pada Kasus Perselisihan Hubungan Industrial.

Tabel 3.24

DATA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TAHUN 2022

NO	URAIAN		PHK	HAK	TOTAL
1	Jumlah Kasus		16	12	28
2	Jumlah Tenaga Kerja		1250	73	1323
3	Jumlah Perusahaan		17	13	30
4	Jumlah Kasus Yang Selesai	Kasus	9	7	16
		Tenaga Kerja	1222	58	1280
5	Jumlah Kasus yang dalam Proses	Kasus	21	21	42
		Tenaga Kerja	50	109	159
6	Jumlah Kasus yang dipekerjakan Kembali	Kasus	0	0	0
		Tenaga Kerja	0	0	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022

Berikut Data Pencari Kerja, Lowongan dan Penempatan Menurut Kelompok Pendidikan Tahun 2022 :

Tabel 3.25

**PENCARI KERJA, LOWONGAN, DAN PENEMPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDIDIKAN TAHUN 2022**

PENDIDIKAN	PENCARI KERJA			LOWONGAN			PENEMPATAN		
	L	P	JMLH	L	P	JMLH	L	P	JMLH
TIDAK TAMAT SD	217	58	275	0	0	0	0	0	0
SD	100	20	120	0	0	0	0	0	0
SLTP	191	46	237	50	0	50	50	0	50
SLTA	812	265	1077	176	28	204	178	28	206
SMK	750	226	976	88	2	90	88	2	90
DIPLOMA I	2	2	4	0	0	0	0	0	0
DIPLOMA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIPLOMA III	45	60	105	0	5	5	0	5	5
SARJANA S1	187	132	319	26	13	39	24	13	37
SARJANA S2	2	1	3	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2306	810	3116	340	48	388	340	48	388

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai upaya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah Meningkatkan akses pencari kerja terhadap lapangan kerja terutama di sektor formal dengan arah kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana bidang ketenagakerjaan secara holistik dan integratif;
- b. Peningkatan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam upaya penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi atau kebutuhan lapangan kerja dan membekali keterampilan penduduk sebelum bekerja;
- c. Optimalisasi peran IT dalam mengkomunikasikan dan memberikan informasi dan pelayanan terkait lapangan kerja dan pencari kerja;
- d. Peningkatan kerja sama dengan stakeholders dan penguatan kerja sama dengan variasi stakeholders lain dalam teknis

- kegiatan peningkatan kesempatan kerja;
- e. Peningkatan peran hubungan industrial dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.

2. **Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil**

a. **Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya**

Pengembangan pembangunan ekonomi yang berbasis partisipasi masyarakat luas sebagai pelaku usaha merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam pembangunan ekonomi saat ini. Pertumbuhan ekonomi di Kutai Barat didorong oleh beberapa sektor, salah satu sektor yang mempunyai peran sangat strategis adalah sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah atau UMKM. Berikut Tabel Perkembangan UMKM di Kabupaten Kutai Barat 2018 – 2022:

Tabel 3.26
**PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL
KABUPATEN KUTAI BARAT 2018 – 2022**

No	Kriteria	2018	2019	2020	2021	2022
1	Usaha Mikro	3.354	3.364	6.164	10.748	12.896
2	Usaha Kecil	115	130	145	253	-

Sumber : LKJIP Disdagkop UKM Tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pada tahun 2015 lalu telah membentuk Unit Pengelola Teknis- Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM disingkat UPT UPD KUMKM berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015.

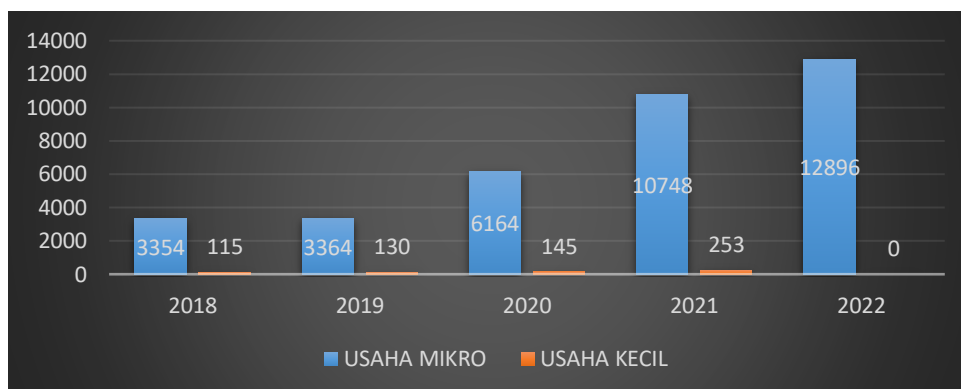
UPT- UPD KUMKM tersebut sangat membantu masyarakat pelaku UMKM terkait permasalahan permodalan. Dengan Penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp. 5.000.0000.000,00 telah menyalurkan bantuan permodalan ke UMKM di 16 Kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Dana tersebut dikelola terus menerus secara bergulir untuk membantu pelaku UMKM. Keuntungan dari Pengelolaan Dana Bergulir tersebut masuk sebagai Pendapatan Asli daerah (PAD)

Kabupaten Kutai Barat yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Berdasarkan data dari LKjIP Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK, realisasi pendapatan dari pengelolaan Dana Bergulir UPT UPD KUMK tahun 2016 adalah 129.585.868.45 dari target 112.875.000, maka tercapai 114,80%. Dan pada tahun 2017 realisasi pendapatan adalah 204.717.089.35 dari target 120.000.000, maka tercapai 170,60%. Dan pada tahun 2018 realisasi pendapatan 233.968.484.10 dari target 150.000.000, maka tercapai 155.98%. dan pada tahun 2019 realisasi pendapatan 497.854.859.36 dari target 170.000.000, maka tercapai 292.86% dan pada tahun 2020 realisasi pendapatan 260.594.003,43 dari target 275.000.000, maka tercapai 94.76%., Tahun 2021 realisasi pendapatan 310.442.932,41 dari target 250.000.000, maka tercapai 124.18%., Tahun 2022 realisasi pendapatan 431.612.330,04 dari target 250.000.000, maka tercapai 172.64%

Sampai dengan tahun 2022 UPT UPD KUMK telah melakukan bantuan permodalan bagi pelaku UMKM. Dari total pemohon UMKM sebanyak 446 orang, realisasi penyaluran pinjaman kepada pelaku yang lolos verifikasi dan analisa kelayakan usaha sebanyak 330 UMKM dengan jumlah dana yang digulirkan sebesar Rp. 12.846.000.000.- (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah) dan dana yang dicairkan kepada 38 UMKM ditahun 2022 sebanyak Rp 2.395.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah). Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu peningkatan jumlah UMKM di Kabupaten Kutai Barat. Peningkatan tersebut bisa dilihat pada Grafik dibawah ini.

Grafik 3.9
**PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL
KABUPATEN KUTAI BARAT 2018 – 2022**



b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Meningkatnya perkembangan usaha dari Mikro ke Kecil di Kabupaten Kutai Barat karena adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK melalui upaya :

- a. Penyederhanaan perijinan usaha bagi UMKM;
- b. Keberpihakan pemerintah daerah kepada UMKM;
- c. Pemberian bantuan permodalan bagi UMKM (BPUM);
- d. Peningkatan kualitas SDM pelaku UMKM (Pelatihan baik melalui anggaran Propinsi dan Daerah); dan
- e. Pengembangan pola kemitraan dan kerjasama dengan Perusahaan yang berada di Kabupaten Kutai Barat dalam pengembangan UMKM;

Adapun yang menjadi Faktor Penghambat dalam meningkatkan Usaha dari Mikro ke Kecil yaitu :

- b. Rendahnya SDM Pelaku UMKM dalam mengelola usaha karena tidak memiliki pengetahuan yang luas mengenai bisnis dan bagaimana cara mempertahankan usaha dan mengembangkan usahanya serta modal usaha yang minim.
- c. Masih kurangnya fasilitasi dalam kemitraan usaha yang berkelanjutan dalam mempromosikan dan memasarkan produk serta Belum tersedianya tempat penampungan bokar
- d. Kurangnya kesadaran Pelaku UMKM dalam kepengurusan ijin

usaha, jaringan yang tidak memadai saat penginputan data ke sistem OSS, hambatan lainnya juga pada saat penginputan data ke OSS NIK yang tidak valid dengan Data Dukcapil.

- e. Kurangnya Pelatihan bagi wirausaha pemula.
- f. Masih Minimnya koordinasi dan Sikronisasi tentang Program Kegiatan UMKM ke Pemerintah Pusat.
- g. Terbatasnya Pemanfaatan Pemasaran Digital untuk meningkatkan penjualan, mempromosikan produk dan memasarkan produk karena kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan sistem digital, serta kurangnya Inovasi Produk, tidak melakukan Branding dan kurangnya modal usaha.

Adapun Strategi yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka mendukung prosentase Usaha Mikro menjadi Usaha kecil diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengetahuan atau SDM Pelaku UMKM dengan cara melakukan Pendampingan monitoring, evaluasi, Pengelolaan Keuangan, serta membuat strategi pengembangan usaha, melihat riset dan target pasar, berinovasi dalam mengembangkan produk baru yang paling diminati masyarakat dengan harga jual yang tidak terlalu tinggi namun penjualan tetap berkelanjutan / berputar dipasaran.
2. Melakukan Pendampingan, Pelatihan dalam memfasilitasi, memotivasi agar Kemitraan antara PT. MKC dan UPBB dapat berjalan dengan baik. Dan Pelaku UMKM/ Petani Karet dapat mengembangkan usahanya, dengan kualitas karet yang baik Pelaku UMKM dapat menjual produk karetnya dengan harga yang tinggi serta diharapkan dengan adanya Kemitraan ini Pelaku UMKM dapat meningkatkan akses pasar dalam penjualan karet bokar. Dan jika anggaran tersedia Disdagkop & UMKM akan membangun tempat penampungan bokar untuk menampung bokar yang sudah bersih dan siap dikirim ke PT. MKC Palaran Samarinda.
3. Bagi Pelaku UMKM yang belum memiliki Izin / Nomor Induk Berusaha (NIB) Disdagkop & UKM akan terus melakukan Sosialisasi dengan tujuan agar Pelaku UMKM memiliki

kesadaran pentingnya memiliki NIB. Manfaat memiliki NIB antara lain adalah :

1. Menyimpan Data Perizinan dalam Satu Identitas;
Pelaku Usaha tidak perlu membawa berkas persyaratan yang begitu banyak untuk mengurus Perizinan. Cukup dengan menggunakan NIB sebagai salah satu dokumen yang dibutuhkan disertai dengan beberapa dokumen pendukung yang memang dibutuhkan. Dengan NIB bisa mendapatkan akses untuk membuat izin lain.
 2. Memperoleh Kelengkapan Berkas Usaha;
Mengurus NIB hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja, karena semua bisa dilakukan secara Online
 3. Mendapat Pendampingan Usaha;
UMKM yang memiliki NIB akan memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pendampingan dari Pemerintah. Pendampingan tersebut tentunya akan sangat berguna bagi Pelaku UMKM yang ingin mengembangkan Usahanya.
 4. Memperoleh Akses Permodalan;
Memiliki NIB akan memudahkan akses pembiayaan lembaga Keuangan Bank dan Non Bank.
 5. Kesempatan Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan;
Memudahkan Pemberdayaan dari Pemerintah Pusat, Daerah dan Lembaga agar para Pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya.
 6. Memangkas Proses Perizinan;
Mengurus NIB tergolong sangat mudah dan praktis, Pemilik Usaha hanya perlu mendaftar melalui laman resmi One Stop Submission (OSS).
 7. Mendapat Kepastian dan Perlindungan Usaha;
Pelaku UMKM yang telah memiliki Legalitas berupa NIB akan memperoleh kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang sudah ditetapkan.
4. Dalam upaya membantu Pelaku UMKM Wirausaha muda Melalui Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan

Pengembangan Usaha Mikro diharapkan Pelaku UMKM dapat mengembangkan potensi yang telah digali melalui pelatihan serta membuka usaha sehingga dapat meningkatkan taraf hidup.

5. Melalui Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro diharapkan Aparatur dapat meningkatkan pelayanan terhadap Pelaku UMKM Mulai dari Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro, Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro sehingga Pelaku UMKM dapat berkembang melalui usaha yang telah di laksanakan.
6. Dalam upaya membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan, mempromosikan produk dan memasarkan produk, Disperindagkop& UMKM memfasilitasi Pelaku UMKM untuk mengikuti Pelatihan Pemasaran secara Online. Pelatihan ini bertujuan agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan sistem Digitalisasi (Facebook Maupun Instagram) sebagai sarana untuk mempromosikan hasil Produk Kerajinan tersebut. Pada saat ini digitalisasi diyakini mampu meningkatkan penjualan Pelaku UMKM karena Digitalisasi mampu memperluas pasar karena memiliki jangkauan yang luas, mempromosikan dengan memanfaatkan teknologi Digital memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk dan Pelaku UMKM bisa semakin dekat dengan konsumen. Inovasi Produk juga wajib dilakukan karena dengan memperbaharui model produk dan mengikuti tren agar tidak kalah dipasaran akan menarik minat konsumen dalam hal pembelian produk kerajinan. Strategi lainnya juga perlu melakukan Branding meskipun branding identik dengan perusahaan – perusahaan besar bukan berarti Pelaku UMKM tidak membutuhkan Branding yang baik, justru sebaliknya Pelaku UMKM juga harus membuat Branding yang Unik dan Menarik agar menarik minat Konsumen. Jadi tentukanlah Image atau Citra yang ingin ditampilkan produk kemudian kembangkan dengan berbagai strategi branding seperti membuat loga nama usaha yang unik, menggunakan media

sosial sebagai wadah promosi produk, fokus meningkatkan dan menjaga produk yang ditawarkan serta meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Untuk permodalan Pelaku UMKM dapat melakukan Usulan Bantuan melalui UPT Dana bergulir atau Kredit Usaha Rakyat dengan bunga yang relatif rendah.

B. CAPAIAN KINERJA SASARAN DIBANDINGKAN DENGAN RPJMD

Tabel 3.27
**REALISASI KINERJA SASARAN 2 DIBANDINGKAN
DENGAN TARGET AKHIR RPJMD**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI S/D TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD 2026	PRESENTASE CAPAIAN KINERJA
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,62	4,01	86,79
Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	0,44	0,44	100

SASARAN 3

MENINGKATNYA STANDAR HIDUP LAYAK MASYARAKAT KUTAI BARAT

A. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 3 menggunakan indikator kinerja yaitu PDRB Perkapita dengan tingkat keberhasilan 97,83% dengan kategori **"SANGAT BERHASIL (SB)"**. Pencapaian target kinerja sasaran **Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat Kutai Barat** seperti tampak pada tabel dibawah.

Tabel 3.28

CAPAIAN KINERJA MENINGKATNYA STANDAR HIDUP LAYAK MASYARAKAT KUTAI BARAT

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Nilai Capaian
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Predikat
1	PDRB PerKapita	188,54	184,46	97,83	193,35	246,65	127,56	Melebihi Target
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		97,83			127,56			Melampaui Target

Adapun pencapaian sasaran pada indikator kinerja dapat di jelaskan melalui analisis sebagai berikut :

1. PDRB Per Kapita

a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya

Sebuah negara ataupun daerah pasti memiliki pendapatannya sendiri, biasanya berasal dari proses transaksi yang mereka lakukan di dalamnya. Hal tersebut bisa juga disebut indikator perekonomian. Indikator ekonomi ini bisa digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi yang memiliki tingkatan dari nasional hingga daerah.

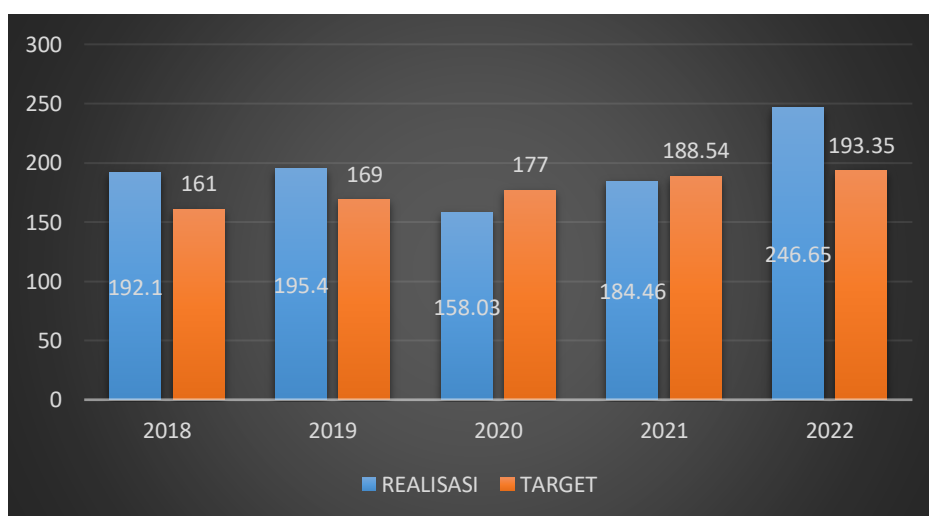
Pada tingkat nasional indikator ini disebut Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara, untuk tingkat daerah seperti provinsi, kabupaten/kota bahkan kecamatan, hal itu dikenal dengan sebutan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Oleh karena perannya sebagai salah satu indikator utama dalam perekonomian, hal tersebut membuat PDRB ini secara otomatis memegang peranan penting. Menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB bisa juga didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa dikatakan bahwa PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, yang pada umumnya dalam waktu satu tahun.

Berikut perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Kutai Barat 2018 - 2022 yang terlihat dalam grafik dibawah ini:

Grafik 3.10
**PERKEMBANGAN PDRB PERKAPITA
KABUPATEN KUTAI BARAT 2018 -2022**



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa PDRB Perkapita Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup drastis yaitu sebesar 246,65 Juta naik 63,16 Juta dari Tahun 2021 sebesar 184,46 Juta.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya

anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Data pengeluaran dan konsumsi penduduk didapatkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Data berasal dari kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran (Daftar VSEN2017. KP).

Mulai tahun 2015, pengumpulan data SUSENAS dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret untuk pengumpulan data KOR dan konsumsi/ pengeluaran rumah tangga. Serta pada bulan September untuk pengumpulan data modul dan konsumsi/pengeluaran rumah tangga. Pelaksanaan SUSENAS Maret 2017 mencakup 300.000 rumah tangga yang tersebar di seluruh provinsi. Target sampel SUSENAS September adalah 75.000 rumah tangga.

Data konsumsi/pengeluaran di bagi menjadi dua kelompok yaitu makanan dan bukan makanan. Pada tahun 2017, jumlah komoditi yang disurvei sebanyak 112 komoditi yang terbagi dalam 14 kelompok. Pengumpulan data kelompok makanan meliputi banyaknya (kuantitas) komoditi yang dikonsumsi beserta nilai pengeluarannya. Sementara pengumpulan data pada sebagian besar kelompok bukan makanan hanya mencakup nilai pengeluaran barang yang dikonsumsi, kecuali beberapa jenis barang juga dikumpulkan kuantitasnya seperti listrik, air, gas dan BBM. Komoditi non makanan terbagi dalam 6 kelompok.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Kutai Barat tahun 2022 adalah Rp 1.529.442,-. Jumlah ini terdiri dari makanan dan bukan makanan. Untuk makanan, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah sebesar Rp 783.613,- dan untuk bukan makanan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah sebesar Rp 810.810,-. Hal ini artinya lebih besar pengeluaran untuk non-makanan dari pada makanan. Ciri-ciri masyarakat yang sejahtera apabila pengeluaran untuk bukan makanan lebih besar daripada makanan, hal ini menandakan bahwa pemerintah di kabupaten Kutai Barat harus lebih bekerja keras untuk menuju masyarakat Kutai Barat yang sejahtera.

Diketahui bahwa untuk makanan, komoditas makanan dan minuman jadi yang paling besar dibandingkan dengan komoditas makanan jadi, yaitu sebesar Rp 216.974,-. Kemudian diikuti oleh komoditas Rokok sebesar Rp 112.526,- dan selanjutnya yang menempati posisi ketiga adalah komoditas Ikan/Udang/Cumi/Kerang sebesar Rp 97.644,-. Jika kita tinjau dari bukan makanan, diketahui bahwa komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga

adalah komoditas terbesar untuk kelompok bukan makanan, yaitu sebesar Rp 432.070,-. Kemudian diikuti oleh Komoditas Tahan Lama sebesar Rp 138.713,-

Tabel 3.29

RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK KOMODITAS (RUPIAH) DI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 - 2022

Kelompok Komoditas/Commodity Group	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan/Food			
Padi-padian	75 955	76 589	77 500
Umbi-umbian	4 320	4 892	4 040
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	85 207	93 073	97 644
Daging	48 227	43 750	54 432
Telur dan Susu	54 752	52 962	51 214
Sayur-sayuran	40 369	52 989	49 492
Kacang-kacangan	10 142	11 659	11 489
Buah-buahan	45 543	48 760	27 433
Minyak dan Kelapa	16 216	17 556	26 805
Bahan minuman	23 825	25 230	22 159
Bumbu-bumbuan	14 766	17 275	15 605
Konsumsi Lainnya	15 920	17 633	16 300
Makanan dan Minuman	189 366	227 403	216 974
Rokok	92 008	93 013	112 526
Jumlah Makanan/Total Food	720 616	782 784	783 613
Bukan Makanan/Non Food			
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	413 470	412 065	432 070
Aneka komoditas dan jasa	130 809	138 135	137 918
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	25 614	32 689	24 573
Komoditas tahan lama	136 433	104 652	138 713
Pajak, pungutan, dan asuransi	40 978	47 604	65 925
Keperluan pesta dan upacara	26 695	11 866	11 610
Jumlah bukan makanan/Total non-food	774 000	747 011	810 810
Jumlah/Total	1 494 615	1 529 795	159 422

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Tabel 3.30

RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK KOMODITAS (PERSEN) DI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 - 2022

Kelompok Komoditas/Commodity Group	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan/Food			
Padi-padian	5,35	5,01	4,86
Umbi-umbian ⁴ 320	0,29	0,32	0,25
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	5,70	6,08	6,12
Daging	3,23	2,86	3,41
Telur dan Susu	3,66	3,46	3,21
Sayur-sayuran	2,70	3,46	3,10
Kacang-kacangan	0,68	0,76	0,72
Buah-buahan	3,05	3,19	1,72
Minyak dan Kelapa	1,08	1,15	1,68
Bahan minuman	1,59	1,65	1,39
Bumbu-bumbuan	0,99	1,33	0,98
Konsumsi Lainnya	1,07	1,15	1,02
Makanan dan Minuman	12,67	14,86	13,61
Rokok	6,16	6,08	7,06
Jumlah Makanan/Total Food	48,21	51,17	49,15
Bukan Makanan/Non Food			
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	27,66	26,94	27,10
Aneka komoditas dan jasa	8,75	9,03	8,65
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	1,71	2,14	1,54
Komoditas tahan lama	9,13	6,84	8,70
Pajak, pungutan, dan asuransi	2,74	3,11	4,13
Keperluan pesta dan upacara	1,79	0,78	0,73
Jumlah bukan makanan/Total non-food	51,79	48,83	50,85
Jumlah/Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

B. CAPAIAN KINERJA SASARAN DIBANDINGKAN DENGAN RPJMD

Tabel 3.31
**REALISASI KINERJA SASARAN 3 DIBANDINGKAN
DENGAN TARGET AKHIR RPJMD**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI S/D TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD 2026	PRESENTASE CAPAIAN KINERJA
PDRB PerKapita	246,65	213,87	115,32

SASARAN 4

TERJAGANYA KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN HIDUP

A. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke Pertama yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **”Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan lokal secara berkelanjutan”** dengan tujuan **”Menjaga Keberlanjutan Kawasan dalam skema Pembangunan Hijau”**.

Adapun Indikator Kinerja sasaran ini adalah : **Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara** dan **Indeks Kualitas Lahan**. Sedangkan Perangkat Daerah Penanggung Jawab keberhasilan sasaran ini adalah **Dinas Lingkungan Hidup**.

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 4 menggunakan 3 indikator kinerja yaitu : Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan dengan tingkat keberhasilan **99,33%** dengan kategori **”SANGAT BAIK (SB)”**. Pencapaian target kinerja sasaran **Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup** seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 3.32

CAPAIAN KINERJA TERJAGANYA KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2021			Nilai Capaian
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Indeks Kualitas Air	62,1	60,00	96,62	62,2	62,31	100,18	Melebihi Target
2	Indeks Kualitas Udara	93,24	91,65	98,29	93,34	91,50	98,03	Tidak Tercapai
3	Indeks Kualitas Lahan	66,06	66,10	100,06	66,55	66,41	99,79	Tidak Tercapai
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		98,32			99,33			Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2022 untuk sasaran 4 yakni Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup mengalami kenaikan sebesar 1,01 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 Capaiannya adalah 98,32 persen.

1. Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Pada IKLH 2009 hingga 2011 dilakukan penyempurnaan dengan melakukan perubahan titik acuan dan metode perhitungan. Sebagai pembanding atau target untuk setiap indikator adalah standar atau ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti ketentuan tentang baku mutu air dan baku mutu udara ambien. Selain itu dapat digunakan juga acuan atau referensi universal dalam skala internasional untuk mendapatkan referensi ideal (*Benchmark*).

Pada tahun 2012 – 2014 dilakukan pengembangan metodologi dengan melakukan pembobotan untuk menghasilkan keseimbangan dinamis antara isu hijau (*green issues*) dan isu coklat (*brown issues*).

Isu hijau adalah semua aktivitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Isu coklat adalah aktivitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Tahun 2016 – 2017 dilakukan penyempurnaan kembali dengan pengembangan metodologi perhitungan IKA. Pada periode ini status mutu air yang digunakan adalah status mutu air kelas I Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Selain itu dilakukan penyempurnaan metodologi perhitungan IKTL dengan mempertimbangkan aspek konservasi dan aspek rehabilitasi berdasarkan perubahan tutupan lahan/hutan, serta karakteristik wilayah secara spasial. Indikator/parameter yang dipergunakan:

1. Luas tutupan hutan (Forest cover index) dan perubahan tutupan hutan (Forest performance index);
2. Kondisi tutupan tanah (Soil condition index). Indeks ini terkait dengan parameter C (tutupan lahan) dalam perhitungan erosi dan air limpasan;
3. Konservasi sepadan sungai/danau/pantai (Water health index). Kondisi tutupan lahan di kanan kiri sungai (ekosistem riparian); dan
4. Kondisi habitat (Land habitat index). Tingkat fragmentasi hutan/habitat. Luas tutupan hutan (Forest cover index).

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. Adapun strategi yang akan dilakukan yaitu berupa penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup; penguatan mekanisme pemantauan dan sistem informasi lingkungan hidup dan penyempurnaan IKLH.

Adapun pencapaian sasaran pada indikator kinerja dapat di jelaskan melalui analisis sebagai berikut :

a. Indeks Kualitas Air

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj).

Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Tolak ukur sasaran meningkatnya Kualitas Air diukur dari indikator persentase peningkatan kualitas air yang dihitung berdasarkan rata-rata dikalikan seratus persen (menggunakan metode perhitungan indeks pencemaran air (%)).

Realisasi capaian Indeks Kualitas Air (IKA) diatas Target Kinerja di mana pada target tahun 2022 IKA pada nilai 62.2 sedangkan pada realisasi indeks kualitas Air (IKA) mencapai pada nilai 62.31 sehingga melebihi persentase target capaian kinerja pada indeks IKU mencapai nilai sebesar 100,18%.

Realisasi capaian Indeks Kualitas Air pada tahun 2021 dan 2022. Di mana capaian tahun 2021 mencapai nilai IKA sebesar 60.00 % dan tahun 2022 yang mencapai nilai IKA sebesar 62,31%. Nilai Indeks Kualitas Air pada Tahun 2022 melebihi dari target yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 62.2% dikarenakan faktor Bertambahnya jumlah titik pemantauan pada penentuan indeks kualitas air dimana titik pantau pada tahun 2022 sebanyak 26 titik pantau dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 14 titik pemantauan kualitas air.

Berdasarkan hasil Titik pantau Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat bahwa kualitas air sesuai baku mutu ada pun hasil pemantauan untuk perentase Indeks kualitas Air (IKA) pada pemantauan dan pengujian kualitas air sungai dengan rumusan indeks pencemaran air sebagai berikut:

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})_M^2 + (C_i / L_{ij})_R^2}{2}}$$

IP_j = indeks pencemaran bagi peruntukan j,

C_i = konsentrasi parameter kualitas air i,

L_{ij} = konsentrasi parameter kualitas air i yang tercantum dalam baku peruntukan air j,

M = maksimum, R = rerata.

Dari 26 (Dua Puluh Enam) titik untuk pormulasi perhitungan indeks pencemaran air dimana 16 (Enam Belas) titik yang memenuhi kadar mutu air serta 10 (Sepuluh) titik yang mengalami sebaran ringan.

Jumlah sampel dibagi jumlah sampel keseluruhan :

Persentase Mutu air Memenuhi 16/26 x 100 = 61,54

Indeks mutu air memenuhi % x bobot = 61,54 x 70 = 43,08%

Jumlah sampel dibagi jumlah sampel keseluruhan:

Persentase Mutu air cemaran ringan $10/14 \times 100 = 38,46$

Indeks mutu air Cemaran ringan $\% \times \text{bobot} = 38,46 \times 50 = 19,23\%$

Total nilai indeks permutu air = Indeks mutu air memenuhi +
Indeks mutu air Cemaran ringan = $43,08 + 19,23 = \mathbf{62.31\%}$ (**realisasi
persentase peningkatan kualitas air tahun 2022**)

Indeks Pencemaran Air Pada IKLH = Total nilai indeks permutu air
 $\times \text{bobot} = 62.31\% \times \text{Bobot } 37.6\% = \mathbf{23.43}$ (**indeks kualitas air**)

1. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain:
 - 1) Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air;
 - 2) Ketersediaan dan fukuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
 - 3) Penggunaan air; dan
 - 4) Serta tingkat erosi dan sedimentasi.

Sehingga dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah serta pelaku usaha.

b. Indeks Kualitas Udara

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di dunia dan tidak terkecuali di Kabupaten Kutai Barat. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2.5) dan oksidan/ozon (O3) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan

pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Penyusunan dan penghitungan indeks kualitas udara ditujukan :

1. Sebagai pelaporan kualitas udara yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara; dan
2. Sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kualitas udara yang tujuannya melindungi manusia dan ekosistem.

Tolok ukur capaian meningkatnya Kualitas Udara diukur dari indikator yaitu Persentase Peningkatan Kualitas Udara yang dihitung berdasarkan rata-rata peningkatan kualitas udara dengan parameter yaitu Nitrogen Dioksida (NO²) dan Sulfur Dioksida (SO²) sebagai berikut:

$$\text{IKU} = \text{Indeks Kualitas Udara} = 100 - [50/0.9 \times (\text{Ieu} - 0.1)]$$

Pada Parameter NO₂ dan SO₂ :

Nilai Rata-rata SO₂ pada 14 Titik = 6,98

Nilai Rata-rata NO₂ pada 14 Titik = 6,28

Diperoleh Indeks Udara (Indeks Udara Model EU-IEU)

Indeks NO₂ = 0,16

Indeks SO₂ = 0,35

$$\begin{aligned} \text{Rataan Indeks} = \text{I}_{\text{eu}} &= (\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2) / 2 \\ &= 0,25 \end{aligned}$$

$$\text{IKU} = 100 - (50/0,9 \times (0,25-0,1)) = \mathbf{91,50}$$

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Untuk keperluan penyusunan metode penghitungan IKTL yang dapat mewakili karakteristik wilayah perkotaan, hulu dan hilir daerah aliran sungai serta kepulauan, dapat diidentifikasi beberapa pendekatan yang dipergunakan untuk penyusunan metode penghitungan IKTL:

- a. Kecukupan luas (kawasan hutan dan) penutupan hutan pada daerah aliran sungai dan/atau pulau sesuai kondisi eksisting.
- b. Kemampuan dan kesesuaian lahan pada karakteristik lahan tertentu yang membutuhkan Tutupan Lahan berupa pepohonan, seperti pada sempadan sungai, pantai dan sekitar danau/waduk,

lahan kemiringan lereng >25% (lebih dari dua puluh lima persen). Karakteristik lahan tersebut juga dapat mewakili wilayah hulu dan hilir, dimana sempadan sungai, sekitar danau/waduk dan lahan kemiringan lereng >25% (lebih dari dua puluh lima persen) pada umumnya terdistribusi di bagian tengah hingga ke hulu, sedangkan sempadan pantai di bagian hilir.

- c. Berkaitan dengan arahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) peruntukan lahannya berupa ruang terbuka hijau. Peruntukan sebagai ruang terbuka hijau tersebut dapat berupa hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas perkotaan, kebun raya, taman keanekaragaman hayati atau taman kota yang didominasi pepohonan.
- d. Penggunaan data citra satelit *Landsat* dalam analisis Tutupan Lahan, terdapat keterbatasan khususnya pada wilayah perkotaan sehingga diperlukan pendetailan data untuk pelaksanaan pemantauan kondisi ruang terbuka hijau dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50 / 54,3)$$

LTH 1	Hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman	= 534067,97818834
LTH 2	Belukar dalam kawasan Hutan dikali 0,6	= 167511,608305318
LTH 3	Belukar pada Fungsi Lindung dikali 0,6	= 28969,1204889244
LTH 4	RTH, seperti Hutan Kota, Kehati dan Lain-lain 0,6	= 0
LTH 5	RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBD)	= 1849,308616

Luas Wilayah Kabupaten (LWK) = 1373677,72553

$$TL = LTH : LWK \times 100 = 0,48$$

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50 / 54,3)$$

IKTL = 66,14

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

Perhitungan IKA (Air) = 62,31 x bobot 37,6%

= **23,43**

Perhitungan IKU (Udara) = 91,50 x bobot 40,5%

= **37,06**

Perhitungan IKTL (Tutupan Lahan) = 66,14 x bobot 21,9%

= **14,48**

Jumlah Keseluruhan IKLH = IKA + IKU + IKTL

= 23,43 + 37,06 + 14,48

= **74,97**

Kategori Baik = $70 \leq x < 90$

B. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam mencapai sasaran adalah:

1. Kendala pada transportasi untuk menuju lokasi pengaduan masyarakat dan kurangnya tanggapan dari pihak pelaku usaha tentang pengaduan masyarakat terhadap pencemaran.
2. Tingkat kualitas SDM personil yang belum memadai didalam pengambilan sampel dan analisa pengujian kualitas udara yang tidak dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup serta Ketersediaan peralatan pengambilan sampling dan analisa kualitas udara ambien dan udara emisi. Metode pengambilan sampel udara ambien menggunakan metode passive sampler. Sedangkan laboratorium terakreditasi yang dapat menguji kualitas udara dengan metode passive samper adalah PT. Anugrah Analisis Sempurna di Depok, Jawa Barat. Keterbatasan titik pantau belum dapat mewakili setiap kawasan sampling pada seluruh kecamatan di kabupaten Kutai Barat. Keterbatasan anggaran dalam pemantauan kualitas udara ambient sehingga tidak maksimalnya jumlah titik pantau dan durasi pemantuan.

Adapun Solusi yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan pemantauan kualitas air sungai dan pengawasan terhadap pembuangan air limbah kesungai, Memperketat pemberian izin pembuangan air limbah ke sungai dengan memperhatikan kondisi Daya Tampung Beban Pencemaran Air (Sebatas Perusahaan saja), Pengawasan industri untuk mengukur ketaatannya didalam pemenuhan baku mutu limbah sesuai Peraturan.
2. Menindak lanjuti permasalahan untuk memberi arahan atau binaan bahwa pentingnya pengelolaan lingkungan bagi kepada pelaku usaha, yang sudah tertuang dalam Undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Memperketat pemberian ijin pembuangan air limbah kesungai sesuai dengan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan timur No.02 Tahun 2011 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air .
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan Atau/Perusakan Lingkungan Hidup dan Atau/Perusakan Hutan.
5. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar baku mutu lingkungan yang sudah ditetapkan.
6. Pemberian sanksi administrasi secara tegas pada para pelaku usaha yang melakukan kelalaian terhadap pengelolaan lingkungan.
7. Kegiatan peningkatan pengendalian polusi pada kualitas udara ambient dan emisi dapat dilakukan pada tahun 2015 dan tahun 2021 dengan bekerjasama dengan mitra laboratorium pengujian Kualitas udara yaitu Laboratorium Mutu Agung Lestari Samarinda yang dapat dilaksanakan dengan 1 priode/tahun. Pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan mitra laboratorium PT. Anugrah Analisis Sempurna melaksanakan pemantauan dan pengujian kualitas udara ambient sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun

C. CAPAIAN KINERJA SASARAN DIBANDINGKAN DENGAN RPJMD

Tabel 3.33
**REALISASI KINERJA SASARAN 4 DIBANDINGKAN
DENGAN TARGET AKHIR RPJMD**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI S/D TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD 2026	PRESENTASE CAPAIAN KINERJA
Indeks Kualitas Air	62,31	62,6	99,53
Indeks Kualitas Udara	91,50	93,74	97,61
Indeks Kualitas Lahan	66,41	68,51	96,93

SASARAN 5

MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN

A. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan. Indikator Kinerja dari Sasaran tersebut adalah Rata-rata Lama sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah. Untuk melihat capaian Kinerja Tahun 2022 pada RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026, dapat dilihat dilihat pada 2 indikator sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 3.34

CAPAIAN KINERJA MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT TAHUN 2022

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Nilai Capaian
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Rata-rata Lama Sekolah	8,49	8,70	102,47	8,5	8,78	103,29	Melebihi Target
2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,91	13,02	100,85	12,95	13,09	101,08	Melebihi Target
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		101,66			102,19			Melampaui Target

Capaian Kinerja Indikator “Rata-rata Lama Sekolah” adalah 8,78 dari target sebesar 8,5 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103,29, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 0,08, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 maka capaian kinerjanya mencapai 96,80%.

Capaian Kinerja Indikator “Angka Harapan Lama Sekolah” adalah 13,09 dari target sebesar 12,95 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,08, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 mengalami

kenaikan 0,14 dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 maka capaian kinerjanya mencapai 96,97%.

1. Rata-rata Lama Sekolah

a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di definisikan yaitu Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Rumusan

$$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (LamaSekolahPendudukke - i)$$

Keterangan:

1. P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas
2. Lama sekolah penduduk ke-i:
 - > Tidak pernah sekolah = 0
 - > Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
 - > Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1
 - > Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir
 - > Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
3. Tahun konversi ijazah
 - > Tidak punya ijazah = 0
 - > SD = 6 tahun; SMP = 9 tahun; SMA = 12 tahun
 - > D1/D2 = 14 tahun; D3 = 15 tahun; D4 = 16 tahun; S1 = 17 tahun
 - > S2 = 19 tahun; S3 = 22 tahun

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2022 yaitu 8,78 tahun meningkat 0,08 tahun dari capaian tahun 2021 yaitu 8,70 tahun. Capaian ini menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Kutai Barat berusia 15 tahun keatas telah menempuh pendidikan hingga kelas IX.

Berikut perkembangan capaian Rata-rata Lama Sekolah dari tahun

2020 sampai dengan 2022:

Tabel 3.35
**PERKEMBANGAN CAPAIAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

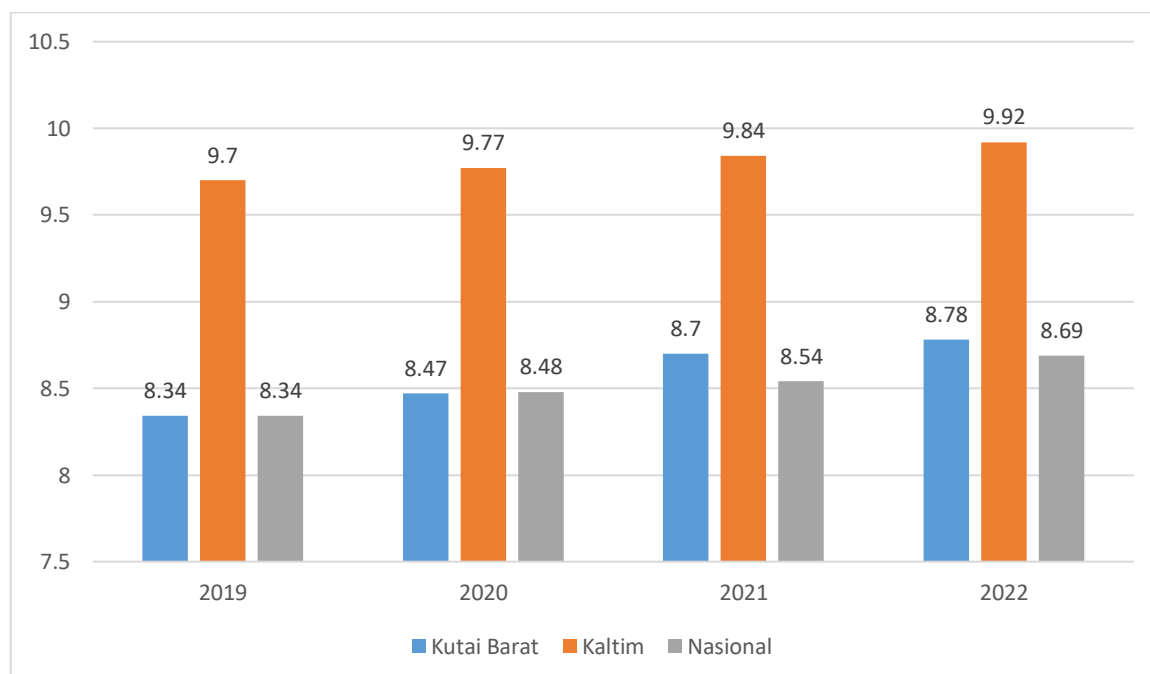
Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,34	8,47	8,70	8,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah selalu meningkat walau tidak terlalu signifikan, dimana peningkatan tertinggi yaitu pada tahun 2021 mencapai 8,70 Tahun meningkat sebanyak 0,23 Tahun.

Berikut Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

Grafik 3.11
**PERKEMBANGAN CAPAIAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN NASIONAL**



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Berdasarkan Grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat lebih rendah 1,14 Tahun dari

Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 9,84 Tahun. Sedangkan bila dibandingkan dengan capaian secara Nasional, Kabupaten Kutai Barat lebih tinggi 0,09 Tahun dari capaian Nasional sebesar 8,69 Tahun dimana Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat yaitu 8,78 Tahun.

2. Angka Harapan Lama Sekolah

a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di definisikan yaitu Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

dimana:

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

i = Usia (a, a + 1, ..., n)

FK = Faktor koreksi pesantren

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2022 yaitu 13,09 tahun meningkat 0,07 tahun dari capaian tahun 2021 yaitu 13,02 tahun. Capaian ini menggambarkan bahwa anak-anak Kabupaten Kutai Barat yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga Diploma I.

Berikut perkembangan Angka Harapan lama sekolah Kabupaten Kutai Barat dari tahun 2020 sampai dengan 2022.

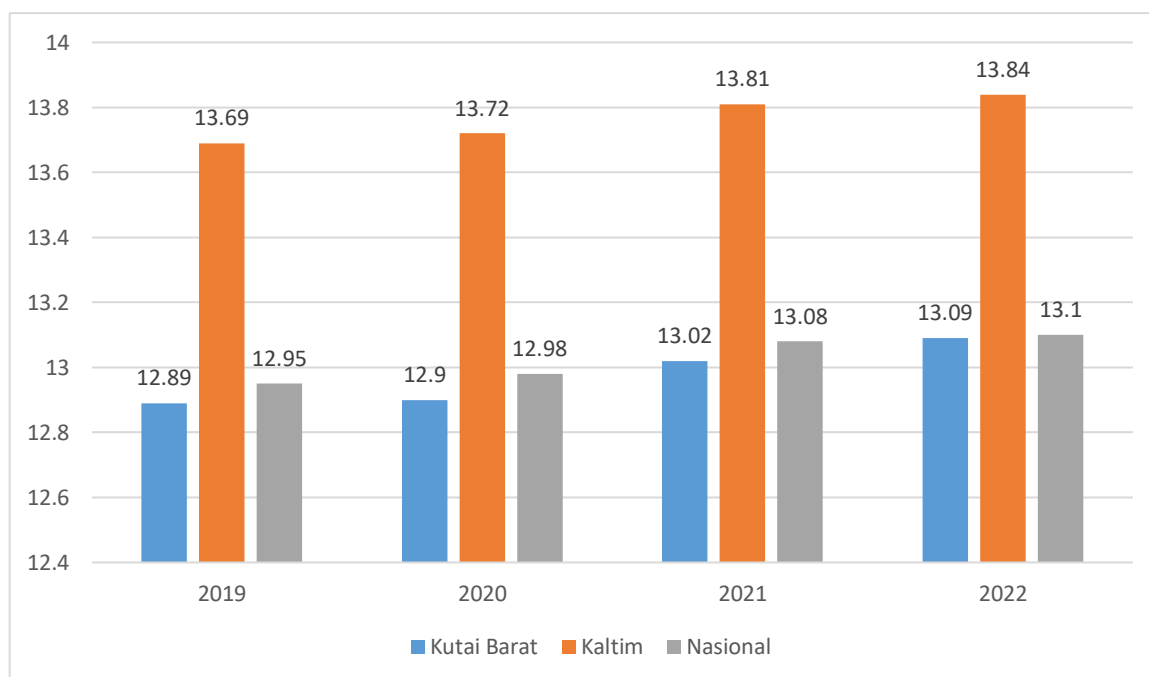
Tabel 3.36
**PERKEMBANGAN CAPAIAN ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

Indikator Kinerja	2020	2021	2022
Angka Harapan Lama Sekolah	12,90	13,02	13,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah selalu meningkat walau tidak terlalu signifikan, dimana peningkatan tertinggi yaitu pada tahun 2022 mencapai 13,09 Tahun meningkat sebanyak 0,07 Tahun.

Grafik 3.12
**PERKEMBANGAN ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN NASIONAL**



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Berdasarkan Grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat lebih rendah 0,75 Tahun dari Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur

sebesar 13,84 Tahun. Sedangkan bila dibandingkan dengan capaian secara Nasional, Kabupaten Kutai Barat lebih rendah 0,01 Tahun dari capaian Nasional sebesar 13,10 Tahun dimana Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat yaitu 13,09 Tahun.

b. Analisis keberhasilan / kegagalan dan solusi

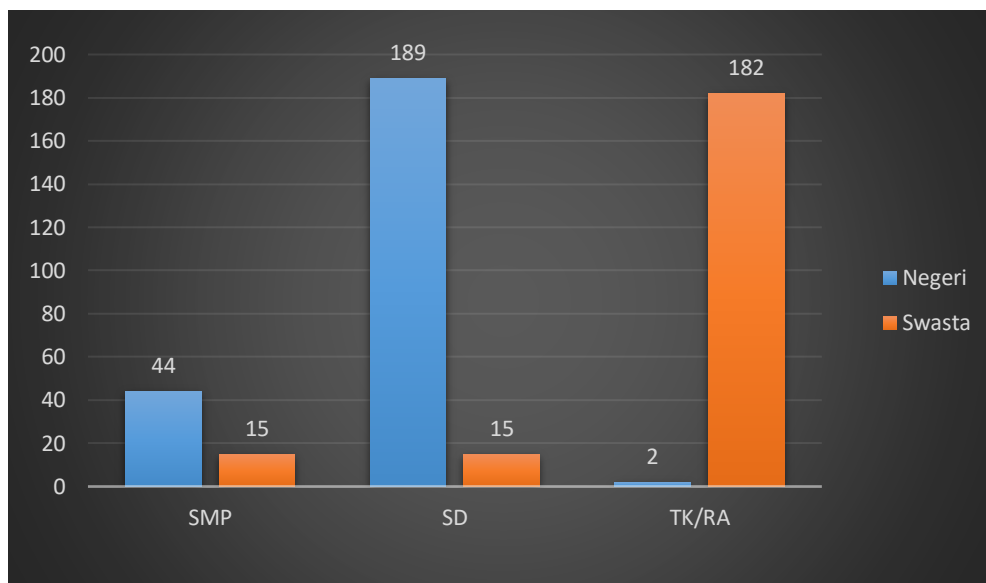
Adapun Strategi yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak;
- b. Meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan, baik melalui penyetaraan pendidikan formal maupun Pendidikan Profesi Guru (PPG) guna meningkatkan kualitas lulusan SD dan SMP;
- c. Pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya PAUD dan Pendidikan Dasar;

Adapun Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian pada Sasaran Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan pada Tahun 2022 adalah :

1. Penyediaan sekolah oleh pemerintah (Sekolah Negeri) maupun masyarakat (Sekolah Swasta) dengan sarana prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Grafik 3.13
JUMLAH SEKOLAH DI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- a. TK/RA di Kabupaten Kutai Barat seperti tampilan pada grafik diatas menunjukkan betapa peran masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam penyediaan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal ini dikarenakan jumlah TK/RA swasta lebih banyak dari jumlah keseluruhan PAUD sebesar 98,92%
- b. Pada jenjang SD/MI, persentase jumlah sekolah negeri lebih banyak dari swasta yaitu sebesar 92,64% sedangkan persentase sekolah swasta yaitu sebesar 7,36%. Dari sisi jumlah peserta didik, persentase sekolah swasta juga cukup memiliki rombongan belajar sama dengan sekolah negeri. Artinya, partisipasi masyarakat dalam penyediaan fasilitas SD/MI juga memberikan andil terhadap aksesibilitas pendidikan dasar di Kabupaten Kutai Barat.
- c. Pada jenjang SMP/MTs, persentase jumlah sekolah negeri lebih besar daripada sekolah swasta yaitu sebesar 74,57%, sedangkan persentase sekolah swasta sebesar 25,43%. Dari sisi jumlah peserta didik, persentase sekolah swasta mencapai 14,70%. Hal ini menunjukkan bahwa

sekolah swasta juga cukup memiliki rombongan belajar sama dengan sekolah negeri. Meskipun demikian, peran masyarakat dalam menyediakan fasilitas pendidikan SMP/MTs juga merupakan kunci keberhasilan dalam memperluas aksesibilitas pendidikan karena menampung sekitar 18% peserta didik SMP/MTs di Kabupaten Kutai Barat.

2. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BPPD terutama yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kutai Barat untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs juga merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam **Meningkatkan Akses Pendidikan dan Meningkatkan Mutu Pendidikan bagi Masyarakat**. Dana BOS dan BPPD diberikan pemerintah pusat dan daerah kepada satuan pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan meringankan beban orang tua peserta didik terutama bagi keluarga ekonomi tidak mampu. Dana tersebut digunakan untuk membiayai operasional sekolah dalam rangka mencapai 8 standar pendidikan nasional. Terutama pada masa pandemic covid-19 di tahun 2022 ini, pemanfaatan dana BOS dan BPPD tidak lagi dibatasi tetapi tetap dengan prinsip sesuai kebutuhan dan kondisi kemampuan anggaran masing-masing satuan pendidikan. Pada tahun 2022 ini dana BOS SD dialokasikan sebesar Rp 1.090.000,- per siswa per tahun, sedangkan BPPD Kabupaten Kutai Barat untuk SD Negeri dan Swasta sebesar Rp 300.000,- per siswa per tahun. BOS SMP sebesar Rp 1.350.000,- per siswa per tahun, dan BPPD Kabupaten Kutai Barat untuk SMP Negeri dan Swasta sebesar Rp 420.000,- per siswa per tahun.
3. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan juga BOP Pendidikan Kesetaraan dari dana APBN juga merupakan kunci keberhasilan peningkatan aksesibilitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.
4. Kerjasama dengan stakeholder lain seperti PGRI, lembaga

pendidikan tinggi, dan perusahaan di wilayah Kabupaten Kutai Barat juga merupakan kunci keberhasilan dalam bidang pengembangan kualitas belajar mengajar dan peningkatan kualifikasi pendidik. Terlebih lagi dalam masa pandemic covid-19 di tahun 2021 ini. Seperti yang telah dilakukan oleh PGRI Kabupaten Kutai Barat melalui Kubar Jaji, yang telah menyusun kajian hasil pembelajaran jarak jauh dengan metode Belajar Dari Rumah (BDR) serta memberikan rekomendasi pelaksanaan BDR, diantaranya yaitu:

- a. Peran orang tua dalam pendampingan belajar anak-anak mereka di rumah yang posisinya menggantikan peran guru di sekolah menjadi sangat penting. Maka dibutuhkan kesadaran dari para orang tua untuk mendampingi secara penuh agar pembelajaran daring bisa berjalan efektif.
- b. Perlunya mengembangkan TV digital Edukasi, dengan adanya TV digital Edukasi menjadi sangat relevan dimasa pandemic Covid-19 ini. Konten berfokus pada penayangan materi pembelajaran yang sifatnya membutuhkan visualisasi seperti halnya mata pelajaran lain. Konten tersebut dapat ditayangkan pada jam di mana sebagian besar orang tua tidak bekerja misalnya di sore hari atau malam hari bagi mereka yang bekerja di pagi hari. Sedangkan bagi orang tua yang bekerja di malam hari dapat ditayangkan di pagi hari. Maka perlu adanya pembuatan modul yang berisi penjelasan konten yang akan ditayangkan dalam TV Digital Edukasi baik pembelajaran luring dan daring.

Secara keseluruhan kinerja Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (program)/capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat untuk **Meningkatkan Akses Pendidikan dan Meningkatkan Mutu Pendidikan** mencapai 54,18% dan 53,57% sedangkan kinerja capaian keuangan Belanja Operasional yang digunakan sebesar 87,50% yang artinya terdapat efisiensi dan efektivitas dalam prosesnya.

B. CAPAIAN KINERJA SASARAN DIBANDINGKAN DENGAN RPJMD

Tabel 3.37
**REALISASI KINERJA SASARAN 5 DIBANDINGKAN
DENGAN TARGET AKHIR RPJMD**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI S/D TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD 2026	PRESENTASE CAPAIAN KINERJA
Rata-rata Lama Sekolah	8,78	8,7	100,91
Angka Harapan Lama Sekolah	13,09	13,05	100,30

SASARAN 6

MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

A. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Indikator Kinerjanya berupa Usia Harapan Hidup. Untuk melihat capaian Kinerja Tahun 2022 pada RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026, dapat dilihat pada indikator sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 3.38
CAPAIAN KINERJA MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT TAHUN 2022

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Nilai Capaian
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Usia Harapan Hidup (Tahun)	72,96	73,10	100,19	73,05	73,10	100,06	Melebihi Target
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		100,19			100,06			Melampaui Target

Sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat dapat dilihat dari 1 indikator yaitu:

Capaian Kinerja Indikator “Usia Harapan Hidup” adalah 73,10 dari target sebesar 73,05 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,06, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 Usia Harapan Hidup tahun 2022 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 maka capaian kinerjanya mencapai 99,40%.

1. Usia Harapan Hidup (UHH)

a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. AHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kutai Barat pada bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 73,10 Tahun.

Berikut perkembangan capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Kutai Barat dari tahun 2020 sampai dengan 2022:

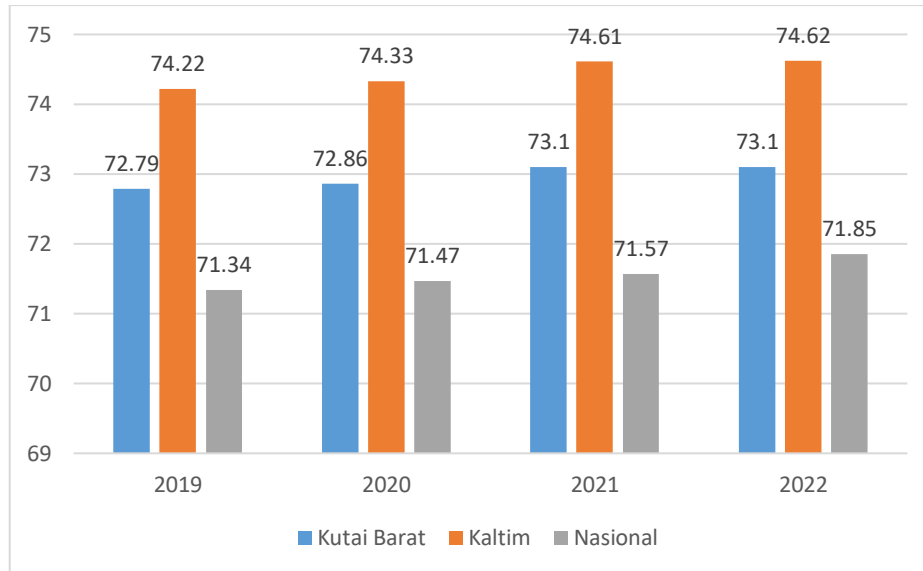
Tabel 3.39
**PERKEMBANGAN CAPAIAN USIA HARAPAN HIDUP
KABUPATEN KUTAI BARAT**

Indikator Kinerja	2020	2021	2022
Usia Harapan Hidup	72,86	73,10	73,10

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Usia Harapan Hidup 73,10 mempunyai interpretasi bahwa secara rata-rata bayi yang baru lahir pada 2022 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 73,10 tahun.

Grafik 3.14
**PERKEMBANGAN USIA HARAPAN HIDUP
KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN NASIONAL**



b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Adapun faktor penghambat dari indikator tersebut data dari Dinas Kesehatan yaitu :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan kegawat daruratan;
2. SDM masih kurang kompeten dalam mengenali tanda bahaya;
3. Akses jalan yang belum memadai untuk pemeriksaan lengkap bagi ibu hamil yang didapatkan di posyandu;
4. Masih ada ibu hamil yang tidak memeriksa kehamilannya ke fasilitas kesehatan;
5. Masih ada persalinan di tolong dukun;
6. Adanya faktor-faktor yang memperberat keadaan ibu hamil seperti empat terlalu, tiga terlambat, ibu hamil yang menderita penyakit menular maupun penyakit menurun;
7. Puskesmas PONED belum berjalan optimal;
8. Sistem rujukan belum berjalan optimal;

Adapun Solusi yang akan dilakukan yaitu:

1. Menyediakan alat dan obat yang lengkap di fasilitas kesehatan;
2. Pelatihan kegawat-daruratan untuk beberapa puskesmas yang belum dan beberapa jenis pelatihan/OJT yang perlu dilaksanakan;
3. Perlu update ilmu bagi tenaga kesehatan secara berkala via workshop dll;
4. Perbaikan jalan dari kampung ke fasilitas kesehatan;
5. Penyediaan sarana transportasi;
6. Pelayanan kespro kepada WUS yang akan menikah tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan sedini mungkin minimal sebelum usia kehamilan 12 minggu (peningkatan kegiatan kespro catin)
7. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia
8. Membuat dan menyepakati sistem rujukan maternal/perinatal (sisrute)

Strategi yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan rasio pelayanan rumah sakit;
- b. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar nasional;
- c. Perbaikan manajemen pengelolaan kefarmasian;
- d. Peningkatan kualitas SDM kesehatan pada Pustu (khususnya pelatihan APN, MTBS, BBLR, SDIDTK dan sebagainya);
- e. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM pengelola program promkes;
- f. Perbaikan kondisi gedung rumah sakit dalam upaya pemenuhan persyaratan rumah sakit yang telah ditetapkan;
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan baik di level PKM maupun Rumah Sakit;
- h. Setifikasi dan peningkatan kualitas SDM pengelola peralatan kesehatan di rumah sakit;
- i. Peningkatan upaya pemenuhan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama upaya penanggulangan penyakit-penyakit tidak menular; dan

- j. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap PHBS.

B. CAPAIAN KINERJA SASARAN DIBANDINGKAN DENGAN RPJMD

Tabel 3.40
**REALISASI KINERJA SASARAN 6 DIBANDINGKAN
DENGAN TARGET AKHIR RPJMD**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI S/D TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD 2026	PRESENTASE CAPAIAN KINERJA
Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,10	73,54	99,40

SASARAN 7

MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah. Dengan 6 (Enam) Indikator Kinerja berupa persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai SAKIP, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah, Nilai LPPD, Persentase Desa Mandiri dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Untuk melihat capaian kinerja tahun 2021 sebagai tahun pertama RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Tabel 3.41

MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Nilai Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50	79,91	98,04	82	82,46	100,57	Melebihi Target
2	Nilai SAKIP	64 (BB)	62,46 (B)	97,60	66	62,07 (B)	94,04	Tidak Tercapai
3	Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	Tercapai
4	Nilai LPPD	3,5	3,0733**	87,80	3,6	3,0733**	85,36	Tidak Tercapai
5	Persentase Desa Mandiri (Jumlah)	20	19	95	0,12 (23)	0,1684 (32)	137,33	Melebihi Target
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	83,97	84,28	100,37	84,07	84,62	100,65	Tercapai
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		96,47			102,99			Melampaui Target

Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah dapat dilihat dari 6 indikator yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menjelaskan definisi dan beberapa unsur penilaian SKM kategori baik dengan nilai interval 76,61 – 88,30, Adapun kriteria IKM Baik dalam Perencanaan Strategis Kabupaten Kutai Barat adalah minimal 82,00. Pada tahun 2022 terdapat 15 OPD yang dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat, dari 15 OPD yang melakukan pengukuran IKM, 15 perangkat daerah yang disurvei berkatagori “Baik” memperoleh nilai IKM sama atau lebih dari 79,99 Sehingga capaian kinerja indikator adalah sebesar 82,46 %.

Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan Amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah pula mengamanatkan pelayanan publik yang berorientasi pada Kepuasan masyarakat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 ini dapat dilihat dari Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 yang diberikan oleh Ombudsman RI Kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang hasilnya diperoleh melalui melalui pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat pada seluruh unit layanan Perangkat Daerah.

Survei pelayanan publik pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat, mencakup pelayanan langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, terdiri dari 9 unsur meliputi Persyaratan, Sistem, mekanisme dan prosedur , Waktu penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan serta tindak lanjut, Sarana dan Prasarana.

Berikut rekapitulasi hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat:

Tabel 3.42
**REKAPITULASI HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

No.	OPD/Instansi/Unit Kerja	IKM Unit Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	DISDUKCAPIL	85,14	B	Baik
2	DPMPTSP	83,66	B	Baik
3	Dinas Kesehatan	85,87	B	Baik
4	Dinas Ketahanan Pangan	86,54	B	Baik
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	78,88	B	Baik
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	81,92	B	Baik
7	Dinas Pemuda dan Olahraga	83,33	B	Baik
8	Dinas Pertanian	83,08	B	Baik
9	BKPSDM	79,96	B	Baik
10	Kecamatan Bongan	83,49	B	Baik
11	Kecamatan Barong Tongkok	80,00	B	Baik
12	Kecamatan Melak	77,99	B	Baik
13	Kecamatan Tering	80,83	B	Baik
14	Kecamatan Muara Lawa	87,56	B	Baik
15	Kecamatan Linggang Bigung	84,03	B	Baik

Sumber : Data Bagian Organisasi Setkab Kubar

Perangkat daerah yang mendapatkan predikat kurang baik berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat didapat dari unsur pelayanan antara lain : biaya dan tarif, sarana dan prasarana, serta kompetensi pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan yang belum sesuai dengan harapan pengguna layanan.

Saran / Rekomendasi

Berdasarkan tabel di bawah disimpulkan bahwa setiap OPD memiliki unsur penilaian tertinggi dan terendah yang berbeda-beda. Apa yang menjadi unsur dengan penilaian tertinggi diharapkan dapat bertahan dan terus meningkat setiap tahunnya. Dan untuk unsur dengan

penilaian terendah diharapkan agar menjadi evaluasi bagi setiap Satuan Perangkat Daerah agar bisa ditingkatkan lagi untuk tahun depan.

Saran / rekomendasi berikut ini disampaikan kepada seluruh unit penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Kutai Barat yang bertujuan agar dapat menjadi prioritas dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Rekomendasi ini juga sebagai bentuk komunikasi dan pembinaan pelayanan publik oleh pimpinan kepada unit penyelenggara pelayanan publik. Adapun saran / rekomendasi yang disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.43

SARAN DAN REKOMENDASI UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Unsur Nilai Tertinggi	Unsur Nilai Terendah	Saran dan Rekomendasi
1.	DISDUKCAPIL	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan dan unsur Waktu Penyelesaian Pelayanan	Direkomendasikan untuk dapat membuat Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan berdasarkan jenis dan produk pelayanan yang diterbitkan atau mereviu dan mengevaluasi kembali waktu pelayanan pada Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang sudah dibuat kemudian mempublikasikan Standar Pelayanan atau SOP tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas mengenai mekanisme, prosedur dan waktu penyelesaian produk pelayanan.
2.	DPMPTSP	Kompetensi Pelaksana dan Perilaku pelaksana	Waktu Penyelesaian	Direkomendasikan untuk dapat membuat pengaturan jam kerja petugas pelayanan agar pelayanan tidak dihentikan pada jam istirahat sehingga masyarakat tidak perlu menunggu hingga jam istirahat berakhir dan pelayanan dapat lebih cepat diselesaikan. Selain itu pimpinan masing – masing unit pelayanan memastikan bahwa petugas pelayanan hadir sesuai waktu pelayanan sesuai yang sudah ditetapkan dan memastikan pemberian sanksi dan

				penghargaan bagi petugas pelayanan berdasarkan ketepatan waktu dalam memberi pelayanan.
3.	Dinas Kesehatan	waktu penyelesaian, unsur biaya/tarif, unsur kompetensi pelaksana dan unsur penanganan pengaduan, saran	produk spesifikasi jenis pelayanan	Direkomendasikan agar hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4.	Dinas Ketahanan Pangan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Biaya/Tarif	Direkomendasikan untuk dapat mempublikasi setiap jenis dan produk pelayanan yang diterbitkan sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas mengenai mekanisme, prosedur dan biaya yang di butuhkan untuk pelayanan yang membutuhkan biaya.
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Sarana dan Prasarana	Direkomendasikan untuk melakukan perbaikan atau pembaharuan dalam bidang sarana dan prasarana berupa komponen yang belum tersedia untuk menunjang pelayanan dan kenyamanan masyarakat.
6.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kompetensi Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Direkomendasikan untuk melakukan perbaikan atau pembaharuan dalam bidang sarana dan prasarana berupa komponen yang belum tersedia untuk menunjang pelayanan dan kenyamanan masyarakat.
7.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Waktu Penyelesaian, Biaya tarif, Kompetensi Pelaksana, Penanganan Penaduan, Saran dan Masukan	Sistem, mekanisme dan Prosedur	Direkomendasikan untuk dapat membuat Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan berdasarkan jenis dan produk pelayanan yang diterbitkan atau mereviu dan mengevaluasi kembali waktu pelayanan pada Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang sudah dibuat kemudian mempublikasikan Standar Pelayanan atau SOP tersebut sehingga masyarakat dapat

				mengetahui dengan jelas mengenai mekanisme, prosedur dan waktu penyelesaian produk pelayanan.
8.	Dinas Pertanian	Perilaku Pelaksana	Waktu penyelesaian	Direkomendasikan untuk dapat membuat pengaturan jam kerja petugas pelayanan agar pelayanan tidak dihentikan pada jam istirahat sehingga masyarakat tidak perlu menunggu hingga jam istirahat berakhir dan pelayanan dapat lebih cepat diselesaikan. Selain itu pimpinan masing – masing unit pelayanan memastikan bahwa petugas pelayanan hadir sesuai waktu pelayanan sesuai yang sudah ditetapkan dan memastikan pemberian sanksi dan penghargaan bagi petugas pelayanan berdasarkan ketepatan waktu dalam memberi pelayanan
9.	BKPSDM	Produk Spesifikasi Jenis Layanan, Kompetensi Pelaksana	Sistem, mekanisme dan Prosedur	Direkomendasikan untuk dapat membuat Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan berdasarkan jenis dan produk pelayanan yang diterbitkan atau mereviu dan mengevaluasi kembali waktu pelayanan pada Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang sudah dibuat kemudian mempublikasikan Standar Pelayanan atau SOP tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas mengenai mekanisme, prosedur dan waktu penyelesaian produk pelayanan.
10.	Kecamatan Bongan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Direkomendasikan untuk mereviu dan mengevaluasi kembali pelayanan pada Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang sudah dibuat kemudian mempublikasikan Standar Pelayanan atau SOP tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan spesifikasi ketentuan yang telah ditetapkan
11.	Kecamatan Barong Tongkok	Biaya/Tarif	Waktu Penyelesaian	Direkomendasikan untuk mereviu dan mengevaluasi kembali waktu pelayanan pada Standar Operasional Prosedur dan Standar

				Pelayanan yang sudah dibuat kemudian mempublikasikan Standar Pelayanan atau SOP tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
12.	Kecamatan Melak	Perilaku Pelaksana	Sistem, mekanisme dan Prosedur, Sarana dan Prasarana	Direkomendasikan untuk dapat membuat Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan berdasarkan jenis dan produk pelayanan yang diterbitkan atau mereviu dan mengevaluasi kembali waktu pelayanan pada Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang sudah dibuat kemudian mempublikasikan Standar Pelayanan atau SOP tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas mengenai mekanisme, prosedur dan waktu penyelesaian produk pelayanan.
13.	Kecamatan Tering	Biaya/Tarif	Kompetensi Pelaksana	Agar Perangkat Daerah meningkatkan kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman;
14.	Kecamatan Muara Lawa	Kompetensi Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Direkomendasikan untuk mereviu dan mengevaluasi kembali pelayanan pada Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang sudah dibuat kemudian mempublikasikan Standar Pelayanan atau SOP tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan spesifikasi ketentuan yang telah ditetapkan
15	Kecamatan Linggang Bigung	Sarana dan Prasarana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Waktu Penyelesaian, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Direkomendasikan untuk mereviu dan mengevaluasi kembali pelayanan pada Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang sudah dibuat kemudian mempublikasikan Standar Pelayanan atau SOP tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan dan hasil pelayanan yang diberikan dan

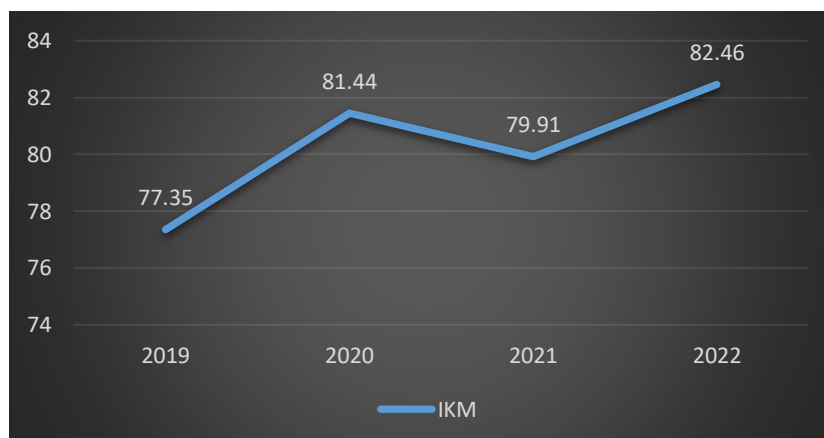
diterima sesuai dengan spesifikasi ketentuan yang telah ditetapkan

Tabel 3.44
**REALISASI INDIKATOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019-2022**

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat	77,35	81,44	79,91	82,46

Sumber : Data Bagian Organisasi Setkab Kubar

Grafik 3.15
**REALISASI INDIKATOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2019-2022**



b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Adapun upaya dan solusi untuk mendorong pencapaian kinerja pelayanan publik Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut :

- Mendorong dan memfasilitasi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja agar menetapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan;
- Mendorong dan melakukan fasilitasi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja agar menerapkan Standar Pelayanan pada setiap jenis pelayanan, sesuai dengan penetapan Standar Pelayanan;
- Melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja;

- d. Mendorong Perangkat Daerah/Unit Kerja agar melakukan evaluasi terhadap ketersediaan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas;
- e. Mendorong Perangkat Daerah/Unit Kerja agar melakukan evaluasi, memelihara, dan membangun sarana dan prasarana pelayanan publik;
- f. Mendorong dan memfasilitasi Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk berkomitmen melalui cara membuat Maklumat Pelayanan dan menerapkannya pada kegiatan pelayanan publik sehari-hari;
- g. Mendorong Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk menyusun rencana kerja berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan unsur pelayanan mana yang harus tetap dipertahankan dan unsur pelayanan mana yang harus ditingkatkan.

2. Nilai SAKIP

a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP;(c) menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja;(d) memberikan saran perbaikan untuk

peningkatan AKIP; dan (e) memonitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang Lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah (PD). Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi dan kemanfaatan yang kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menunjukkan bahwa nilai sebesar 62.07 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “BAIK”, **yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagai unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja**

Hasil evaluasi tahun 2022 “ **tidak diperbandingkan**” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada tingkat Pemerintah Daerah Maupun Tingkat PD.

Berdasarkan Informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut ;

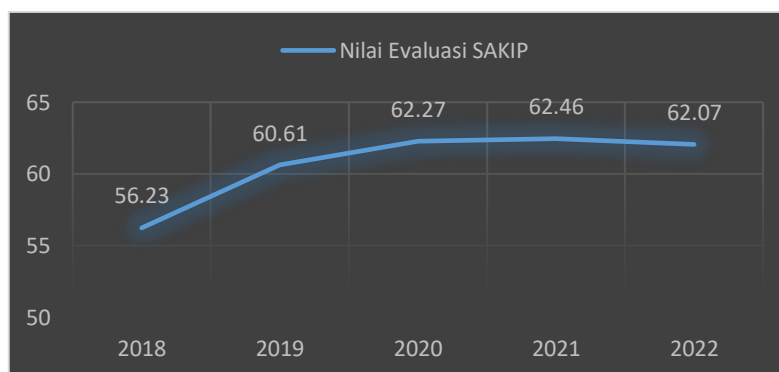
- a. Melakukan Penguatan pemahaman SAKIP di setiap PD melalui *coaching clinic* internal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

- b. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) beserta Rencana Strategis (RENSTRA) PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk periode 2021-2026;
- c. Menyusun cascading/penjenjangan kinerja sebagai turunan dari RPJMD dan Renstra PD yang telah disusun sebelumnya.

Tabel 3.45
NILAI AKIP KABUPATEN KUTAI BARAT DARI 2018-2022

No	Tahun	Realisasi Nilai AKIP
2	2018	56,23
3	2019	60,61
4	2020	62,27
5	2021	62.46
6	2022	62.07

Grafik 3.16
**HASIL AKIP KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2018 - 2022**



Tabel 3.46
**RINCIAN PENILAIAN EVALUASI PERIODE 2018-2022 AKIP PADA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

Komponen yang dinilai	2018		2019		2020		2021		2022	
	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai

Perencanaan Kinerja	30	19,93	30	21,17	30	21.82	30	21,88	30	21,71
Pengukuran Kinerja	25	13,15	25	14,14	25	14.48	25	14,53	30	17,21
Pelaporan Kinerja	15	9,00	15	9,52	15	9.71	15	9,74	15	9,75
Evaluasi Internal	10	3,23	10	4,88	10	5.19	10	5,19	25	13,40
Capaian Kinerja	20	10,92	20	10,91	20	11.07	20	11,12		
Nilai Hasil evaluasi	100	56,23	100	60,61	100	62.27	100	62,46	100	62,07
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		C		B		B		B		B

Berdasarkan Uraian di atas dalam Rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Melakuakn reviu dan perbaikan kualitas rumusan indikator kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah dengan berorientasi pada prinsip *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound* (SMART) dan cukup dalam mengawal pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan tingkat Pemerintah Daerah;
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap PD dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap PD telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang SMART dan memenuhi unsur cukup dalam mengawal kinerja;
- 3) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen *cascading* kinerja baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun PD untuk memastikan kualitas *cascading* (penjenjangan) kinerja dari tingkat tertinggi hingga terendah dapat berorientasi *outcome* (hasil) sesuai dengan tingkatnya dengan memerhatikan *logical framework* dan *critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang di susun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Proses reviu dan perbaikan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Melakukan identifikasi dan pemetaan pada *cascading* kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi *crosscutting* kinerja dengan tugas

- dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
- 5) Memanfaatkan hasil perbaikan *cascading* kinerja untuk memilah program dan kegiatan apa saja yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja Organisasi;
 - 6) Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja serta membangun system berbasis aplikasi untuk dapat dilaksanakan secara terintergritas;
 - 7) Melaksanakan pengukuran realisasi kinerja secara berkala dengan memanfaatkan rencana aksi yang telah disusun dan melaporkan hasil data kinerja tersebut sebagai reuiu atas pencapaian kinerja;
 - 8) Mendorong keterlibatan seluruh pimpinan PD untuk turut aktif dalam memantau capaian kinerja PD maupun individu yang terlibat dalam mendukung capaian kinerja tersebut;
 - 9) Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dapat dan konsisten antara perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
 - 10) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategis, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN di Pemerintah Kabupetn Kutai Barat;
 - 11) Menginformasikan laporan kinerja baik dari tingkat Pemerintah Daerah maupun PD dalam *website* kabupetn sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada public;
 - 12) Dalam proses reuiu, Inspektorat agar memastikan dalam laporan kinerja telah membandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun tersebut dengan capaian yang ada dalam RPJMD maupun Renstra, serta menyajikan dengan lengkap analisis faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian kinerja dan analisis sumber daya yang telah dilakukan dalam mendukung kinerja;
 - 13) Menyajikan data *benchmark* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik ditingkat regional Provinsi

Kalimantan Timur maupun secara nasional sebagai bahan perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja yang dicapai sudah berada di kondisi mana;

- 14) Memanfaatkan laporan kinerja yang telah disusun untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses penetapan target dan bahan reviu dokumen untuk perencanaan kedepan;
- 15) Menyusun pedoman evaluasi AKIP internal Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap PD;
- 17) Melakukan *monitoring* atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- 18) Menyusun kebijakan *reward and punishment* dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sehingga dapat menjadi penyemangat setiap PD untuk mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP.

3. Opini BPK

a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada tahun 2022 di targetkan nilai opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan hasil audit BPK RI memberikan penilaian WTP sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mampu mempertahankan opini WTP dan Pemerintah Daerah dengan Data Gaji Terbaik se-Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022

Tabel 3.47

**HASIL AUDIT BPK TERHADAP PEMERIKSAAN KEUANGAN KABUPATEN
KUTAI BARAT TAHUN 2017 – 2022**

NO	Tahun	Hasli Opini
1	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
2	2018	Wajar Tanpa Pengecualian
3	2019	Wajar Tanpa Pengecualian
4	2020	Wajar Tanpa Pengecualian
5	2021	Wajar Tanpa Pengecualian
6	2022	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Barat

Untuk mencapai target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), beberapa langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kutai Barat antara lain melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia penatausahaan laporan keuangan, Pemkab Kutai Barat menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Laporan Keuangan SKPD se-Kutai Barat bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim. “*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut yaitu para pejabat dan pegawai yang terlibat dalam penatausahaan pelaporan keuangan mampu membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah.
- b. Peningkatan sistem pengendalian intern melalui kegiatan *Workshop Control Self Assessment (CSA)*.

- c. Evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengendalian intern (SPI) atas aset tetap yang digunakan oleh SKPD guna penyempurnaan SPI atas aset tetap dan peningkatan tingkat kepatuhan terkait pengelolaan aset.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD pada akhir tahun untuk menyesuaikan saldo akhir Laporan Keuangan SKPD dengan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Bagian Keuangan sehingga Laporan Keuangan yang dipakai oleh SKPD berdasarkan pada Laporan Keuangan yang disusun oleh Bagian Keuangan (sentralistik).

Pada dasarnya tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran satu dengan indikator penyampaian rencana kerja OPD tepat waktu dan rasio kemandirian keuangan daerah dengan katagori penilaian sangat berhasil sedangkan Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target dengan indikator penilaian berhasil.

Sasaran kedua indikator persentase data aset yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang PAD, presentase data aset yang akurat dengan indicator penilaian sangat berhasil dan sasaran tiga indikator persentase tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dengan baik mencerminkan keberhasilan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam kategori Sangat Berhasil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat selama Tahun 2022. Capaian kinerja Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat dimana tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan pengidentifikasian sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi, diantaranya adalah :

1. Pengalokasian dan BTT dari APBD dan SiLPA DBH-DR yang tidak bisa dibelanjakan diakhir tahun
2. Perencanaan terhadap kegiatan yang disusun mulai awal tahun tetapi baru bisa melaksanakan pada semester kedua
3. Belum tersedianya sistem informasi data yang baik dan kualitas SDM yang masih rendah dalam proses penyusunan dokumen keuangan dan aset daerah
4. Kurangnya respon dan ketaatan terhadap pemanfaatan keuangan dalam implementasi program serta sistem pengadministrasian keuangan belum optimal.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan adalah:

1. Melakukan penyesuaian lagi dalam pelaksanaan kegiatan serta menyusun ulang perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat terkait regulasi BTT maupun Dana SiLPA yang tidak bisa dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data,
4. Melakukan Bimtek peningkatan SDM

Strategi yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka mendukung Misi III **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel** adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Daerah, dengan arah kebijakan berikut:
 - a. Peningkatan kapabilitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat teknis;
 - b. Optimalisasi pemanfaatan IT dalam mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik dan pemerintahan;

- c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Peningkatan Integritas Pemerintah Daerah; dan
 - e. Peningkatan kapabilitas APIP dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.
2. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Desa, dengan arah kebijakan berikut:
- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pemberdayaan masyarakat;
 - b. Meningkatkan kualitas SDM perangkat kampung khususnya terkait bidang tata kelola desa, keuangan dan aset desa dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam); dan
 - c. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat dalam pembangunan kampung.

4. Nilai LPPD

a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi LPPD, LKPJ, dan RLPPD. LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dari hasil LPPD tersebut, Pemerintah Pusat melakukan EPPD dalam rangka penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala daerah wajib

menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Selain menyampaikan LPPD dan LKPJ, kepala daerah juga wajib menyampaikan dan mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas kepala daerah. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai ruang lingkup, penyusunan, dan penyampaian LPPD, LKPJ, dan RLPPD, pelaksanaan EPPD, dan sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD.

Untuk tahun 2022 sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi LPPD tahun 2022 belum diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri, oleh karena itu rekomendasi dan tindaklanjut hasil evaluasi LPPD menggunakan data hasil evaluasi tahun 2019.

Hasil Evaluasi LPPD tahun 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperoleh nilai **3,0733**. Nilai tersebut mengalami kenaikan.

Tabel 3.48

TABEL NILAI EVALUASI LPPD (EKPPD) 2017 - 2020

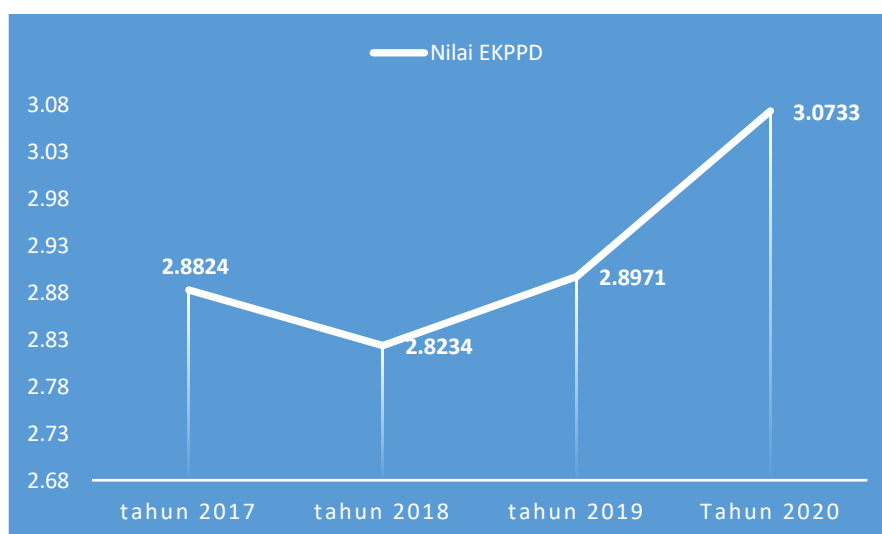
No	Tahun	Nilai Evaluasi LPPD	Ket
1	2017	2.8824	Skor Nilai Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 100-53 Tahun 2018 Tanggal 10 Januari 2018
2	2018	2.8234	Skor Nilai Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 118-8840 Tahun 2018 Tanggal 31 Desember 2018

3	2019	2.8971	Skor Nilai Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 710/K.489/2018 Tanggal 10 September 2018
4	2020	3,0733	Skor Nilai Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 700/K.630/2020 Tanggal 2 Desember 2020

Tabel 3.49
NILAI LPPD KABUPATEN KUTAI BARAT DARI 2017 - 2020

No	Tahun	Realisasi Nilai LPPD
1	2017	2.8824
2	2018	2.8234
3	2019	2.8971
4	2020	3,0733

Grafik 3.17
NILAI EVALUASI KINERJA PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD) TAHUN 2017 - 2020



Berdasarkan Data diatas dapat diketahui secara akumulasi pencapaian sasaran **“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”** sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sudah mencapai **87,80** Telah melebihi capaian target 100% target akhir RPJMD tahun 2021.

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Pada saat pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 ada beberapa kendala yang dihadapi, kendala-kendala tersebut yaitu :

A. Kendala-Kendala tersebut antara lain :

1. Ada beberapa Penambahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Manual Penyusunannya sehingga pada saat penyusunan perlu Komunikasi yang Intens dan Penjelasan terkait dengan Data/Dokumen Pendukung yang digunakan untuk mengisi Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut kepada OPD-OPD;
2. Keterlambatan pengumpulan Data/Dokumen dari masing-masing OPD sehingga menyebabkan proses penginputan Data di dalam IKK menjadi terlambat dan kadang-kadang agar tidak terlambat mengumpulkan LPPD, Tim Penyusun menggunakan Data/Dokumen Tahun sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan terdapat perbedaan Data/Dokumen yang ada di dalam IKK LPPD saat diserahkan kepada Pemprov. Kaltim dan Pemerintah Pusat dengan Data/Dokumen yang ada saat Evaluasi seringkali berbeda;
3. Adanya Pandemi Covid-19 yang mempersulit proses Permintaan Data/Dokumen kepada OPD-OPD di Kabupaten Kutai Barat sehingga hanya bisa dikirim melalui WA;
4. Perbedaan persepsi Penilaian Data/Dokumen Pendukung oleh Tim Evaluasi Daerah (Inspektorat Wilayah Provinsi Kaltim/BPKP Kaltim) dengan Tim Penyusun sehingga menyulitkan dalam Proses Penyusunan LPPD dan Evaluasi Penyusunan LPPD setiap Tahun Anggaran. ;

5. Belum tersedianya Anggaran untuk Bimbingan Teknis kepada seluruh OPD-OPD terkait dengan Tata Cara dan Mekanisme serta Data/Dokumen yang diperlukan untuk Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
6. Belum dilaksanakannya *Self Assesment* Data/Dokumen Pendukung dalam Penyusunan LPPD sehingga Data yang diinput masih belum melalui Proses Validasi dan Verifikasi Tim Inspektorat Kabupaten Kutai Barat.

B. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut antara lain :

1. Perlu untuk dianggarkan Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Seluruh OPD terkait dengan Tata Cara dan Mekanisme serta Data/Dokumen yang diperlukan untuk Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
2. Perlu adanya Pemberian *Reward and Punishment* kepada OPD-OPD yang terlambat maupun tepat waktu dalam mengumpulkan Data/Dokumen Pendukung serta perlu dilakukan *Self Assesment* Data/Dokumen oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Barat agar tidak terdapat Perbedaan Data/Dokumen Pendukung yang terlalu Ekstrim dari saat Penyusunan maupun saat Evaluasi LPPD;
3. Bahwa terkait dengan Tim Evaluasi Daerah, telah disampaikan saran melalui Bagian Pemerintahan Setda.Kab.Kutai Barat agar kedepannya dilaksanakan bimtek terkait dengan Penyusunan LPPD bersama-sama dengan Tim Daerah untuk menyatukan Persepsi tentang Data/Dokumen Pendukung Penyusunan LPPD;
4. Untuk kedepannya perlu dibentuk Tim Penyusun yang melibatkan Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan dan BKAD, serta Inspektorat Kabupaten Kutai Barat agar Data/Dokumen yang digunakan dalam Penyusunan Laporan semuanya memiliki angka yang sama sehingga tidak menimbulkan kerancuan bagi Subyek yang membaca maupun mengevaluasi Laporan-Laporan tersebut.

Upaya-Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Bagian Pemerintahan, antara Lain :

1. Mengadakan Rapat Koordinasi dengan OPD Teknis untuk Proses Pengumpulan Data/Dokumen serta Penyusunan LPPD Kabupaten Kutai Barat;
2. Mengadakan Koordinasi dan Konsultasi kepada Inspektorat Kabupaten Kutai Barat terkait dengan kesiapan Tim *Self Assesment* dari Inspektorat untuk membantu mendampingi Tim Penyusun LPPD dalam Penyusunan LPPD Kabupaten Kutai Barat;
3. Membuat Surat Edaran Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah untuk Proses Pengumpulan Data/Dokumen Pendukung dari seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kutai Barat;
4. Menugaskan 3 Orang Tim Penyusun LPPD untuk mengikuti Bimtek terkait dengan Mekanisme Penyusunan LPPD sesuai dengan Anggaran yang ada;
5. Menyusun RKA-SKPD Bagian Pemerintahan Kegiatan Penyusunan LPPD dan RLPPD Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kliping yang dikeluarkan oleh Bapelitbangda Kabupaten Kutai Barat, belum sesuai dengan Kebutuhan dalam Penyusunan LPPD Kabupaten Kutai Barat;
6. Melakukan Kegiatan Jemput Bola ke OPD-OPD Teknis untuk mempercepat proses Pengumpulan Data/Dokumen Penyusunan LPPD Kabupaten Kutai Barat baik bertemu secara langsung ke OPD-OPD ataupun Via Telpon, WA dan E-Mail..

5. Persentase Desa Mandiri

a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang

mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Berikut merupakan progres perkembangan Kampung di Kabupaten Kutai Barat

Tabel 3.50
**PROGRES PERKEMBANGAN KAMPUNG
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 - 2022**

IDM	2019		2020		2021		2022	
MANDIRI	1	1%	9	4,74%	19	10,00%	32	16,84%
MAJU	10	5%	48	25,26%	65	34,21%	75	39,47%
BERKEMBANG	75	39%	91	47,89%	87	45,79%	77	40,53%
TERTINGGAL	98	52%	40	21,05%	18	9,47%	6	3,16%
SANGAT TERTINGGAL	6	3%	2	1,05%	1	0,53%	0	0,00%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2022

Tabel 3.51
PROGRES PERKEMBANGAN KAMPUNG PER KECAMATAN

No	Kecamatan	Status				
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	Long Iram	2	7	2	0	0
2	Melak	3	1	0	0	0
3	Barong Tongkok	8	11	0	0	0
4	Damai	4	4	9	0	0
5	Muara Lawa	4	4	0	0	0
6	Muara Pahu	0	4	8	0	0
7	Jempang	0	7	5	0	0
8	Bongan	3	2	7	3	0
9	Penyinggahan	0	4	2	0	0

10	Bentian Besar	0	1	6	2	0
11	Linggang Bigung	6	3	2	0	0
12	Nyuatan	0	5	5	0	0
13	Siluaq Ngurai	0	7	9	0	0
14	Mook Manaar Bulatn	0	5	10	0	0
15	Tering	0	3	12	0	0
16	Sekolaq Darat	2	6	0	0	0

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah Desa Mandiri di kabupaten Kutai Barat dari tahun 2020 ke tahun 2022 dimana pada tahun 2020 ada 9 Desa Mandiri dan pada Tahun 2021 naik menjadi 19 Desa Mandiri, tahun 2022 terdapat 32 Desa Mandiri di Kutai Barat.

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan serta solusi yang akan dilakukan terkait pencapaian indeks Desa Membangun :

- Analisa Keberhasilan :
 1. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan yang digunakan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani Pengentasan Desa Tertinggal an Peningkatan Desa Mandiri dengan tujuan untuk menetapkan status dan kemandirian kampung serta untuk menyediakan data dan informasi bagi pembangunan kampung.
 2. Kegiatan Evaluasi Penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) yang dilakuka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampungpaa tahun 2022 bersama Tenaga Ahli Kabupaten, Pendamping Desa dan Pendamping Lokas Desa dan Pihak Kecamatan ke Kecamatan dan Kampung-kampung sangat membantu Pemerintah Kampung di dalam melakukan Analisa an Penilaian Idikator Penilaian Indeks Desa Secara benar dan sesuai kondisi di kampungnya.
 3. Pemerintah Kampung telah dapat memprioritaskan kegiatan-

kegiatan didalam Rencana Kerja Pemerintahan ampung dan APBKam melalui Sumber Daya da ana yang tersedia dengan lebih tepat sasaran guna meningkatkan status kampungnya.

4. Adanya Tim Terpadu antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Daerah Kabuapten Kutai Barat yang pada Desember tahun 2022 turun ke lapangan khususnya ke daerah kampung yang tertinggal yang ada di Kabupaten Kutai Barat yaitu Kampung Gerungung, Tanjung oke, Deraya, diKecamatan Bongan serta Kampung Ann Jaya dan Jelmu Sibak di kecamatan Bentian Besar diharapkan mampu untuk segera mengentaskan berbagai keterbatasan sehingga bisa masuk dalam program/kegiatan Prioritas.
5. Adanya emberian Reward (Penghargaan) Kinerja dalam bentuk piagam/plakat penghargaan Kampung Mandiri oleh kementrian Desa yang diserahkan oleh Bupati Kutai Barat di harapkan mampu memotivasi perangkat kampung unyuk lebih mengembangkan badan usaha yang ada di kampung sehingga dapat meingkatkan Status Desa.

- **Analisa Kegagalan :**

- a. Prasarana Pelayanan Sosial Dasar rata-rata Kampung masih belum tersedia/masih dianggap kurang dan perlu mendapat perhatian serius dari Organisasi Perangkat Daerah yang terkait, antara lain :
 1. Akses Jalan Desa/Kampung yang menghubungkan antara Kecamatan ke Kampung yang masih terhubung dengan aspal/beton atau jalan mengalami rusak parah sehingga terkendala dalam segala bidang.
 2. Tenaga Dokter dan tenaga Kesehatan lainnya belum semua tersedia di Kampung.
 3. Akses/ Jarak tempuh menuju SMP dan SMU masih terlalu jauh dan jalannya sulit dilalui.
 4. Taman Bacaan Masyarakat Desa atau Perpustakaan Desa masih tidak tersedia di kampung.

5. Penanganan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kejar Paket A,B,C.
6. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih belum semua desa/kampung yang memiliki PAUD.
7. Jumlah Kelompok kegiatan olahraga dan jumlah kegiatan olahraga masih belum tersedia secara optimal di kampung.
8. Jumlah Keluarga yang memakai Listrik + Non Listrik/Jumlah Keluarga memakai listrik di Desa Kampung masih belum terpenuhi secara optimal.
9. Fasilitas/Akses Internet warga kampung yang belum ada/masih lemah.
10. Masyarakat Kampung masih membuang sampah secara Tradisional dengan digali lubang atau dibakar dan masih belum memiliki TPS/TPA Kampung.
11. Fasilitas Mitigasi Bencana yang belum sesuai karakteristik wilayah kampung sesuai hasil identifikasi kebencanaan masih belum menjadi perhatian dari pihak kampung.
12. Masih belum tersedianya pasar desa/kampung secara permanen.
13. Jumlah Koperasi Aktif dan BUMK yang masih belum Optimal, BUMK belum menghasilkan Pendapatan Asli Kampung.
14. Belum tersedianya Profil masing Kampung.

• **Solusi**

1. Perlu adanya kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana Dimensi Sosial, Ekonomi dan Ekologi/Lingkungan menjadi kekuatan yang saling mengisi.
2. Agar Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan Indikator Penilaian Indeks Desa Membangun dapat memprioritaskan program kegiatan sehingga segala keterbatasan pada prasarana sosial dasar yang selama ini menjadi persoalan di tingkat kampung dapat teratasi dengan baik.

3. Mendukung Pemerintahan Kampung untuk membuat Profil Desa/Kampung dan mengupdate data-data Kampungnyasecara berkala.
4. Melakukan Fasilitas dan Pembinaan kepada adan Usaha Milik Kampung (BUMK) agar dapat aktif dan mampu menghasilkan Pendapatan Asli Kampung (PAK) dengan menggali potensi-potensi yang ada di Kampungnya.
5. Melakukan Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Kampung untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor pendukung tercapainya indikator ini yaitu, sesuai hasil pengukuran Evaluasi Penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) Di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 dengan perkembangan dari tahun sebelumnya :

1. Adanya peningkatan status Kampung dari Tahun sebelumnya (2021) yaitu terdapat 19 Kampung Maju ke Mandiri dan 13 Kampung Berkembang ke Mandiri. Pada tahun 2022 terdapat peningkatan 32 kampung mandiri;
2. Pemerintah Kampung telah dapat melihat apa saja yang menjadi kelemahan didalam penyelenggaraan kampungnya dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan didalam rencana kerja Pemerintahan Kampung dan APBKam melalui sumber daya dan dana yang tersedia yang telah dianggarkan pada tahun sebelumnya;
3. Adanya Evaluasi Penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung bersama tenaga ahli Kabupaten, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa ke Kecamatan dan Kampung-Kampung sangat membantu Pemerintah Kampung di dalam memenuhi Indikator Penilaian Indeks Desa.
4. Meningkatnya persentase BUMK yang aktif sebesar 46,48%.

6. Indeks Pembangunan Gender

a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya

Indikator	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Konsep	IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.
Rumusan	$IPG = IPM \text{ perempuan} / IPM \text{ laki-laki}$
Kegunaan	Untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan.
Keterangan	Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), (ii) Pengetahuan (knowledge), dan (iii) Standar hidup layak (decent standard of living)
Interpretasi	Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan

	angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.
--	------------------------------------------------------------------------------

Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pengarusutamaan Gender pada semua aspek Pembangunan dengan Indikator Kejadiannya adalah IPG Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Kutai Barat berdasarkan data BPS pada tahun 2019 berkisar 83,84% dan tahun 2020 meningkat 3% menjadi 83,87% dan data tahun 2021 meningkat lagi menjadi 84,28. Dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 84,62.

IPG =	IPM PEREMPUAN
	IPM LAKI - LAKI

Tabel 3.52
**IPG MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 – 2022**

KABUPATEN/ KOTA	Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Kabupaten/Kota (Tahun)			
	2019	2020	2021	2022
	Samarinda	89,41	89,27	89,27
Penajam Paser Utara	86,22	86,39	86,57	86,83
Paser	71,41	71,15	71,19	71,98
Mahakam Ulu	80,89	80,98	81,65	82,32
Kutai Timur	76,51	76,26	76,40	77,11
Kutai Kartanegara	79,14	78,90	79,12	79,80
Kutai Barat	83,84	83,87	84,28	84,62
Kalimantan Timur	85,98	85,70	85,95	86,61
Bontang	86,72	86,87	87,12	87,52
Berau	87,93	87,61	87,76	87,76
Balikpapan	89,71	89,65	89,83	89,96

IPG Kabupaten Kutai Barat selama 5 tahun terakhir antara 83 - 84. Akan tetapi dari tahun ke tahun nilai IPG di Kabupaten Kutai Barat terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini menandakan bahwa semakin menurunnya ketimpangan antara pembangunan manusia

perempuan dan laki-laki di Kabupaten Kutai Barat selama lima tahun terakhir.

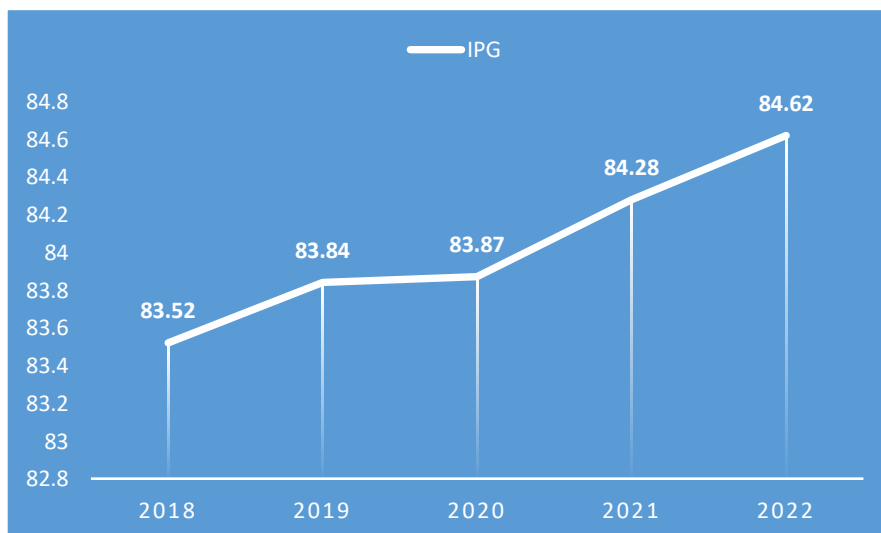
Hasil Evaluasi IPG tahun 2022 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperoleh nilai 84,62, Nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.53
**REALISASI INDIKATOR IPG
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 - 2022**

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Gender	83,52	83,84	83,87	84,28	84,62

Sumber: Badan Pusat Statistik, Catatan/Note : *Data Tahun 2021

Grafik 3.18
**REALISASI INDIKATOR IPG
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 - 2022**



Berdasarkan Tabel diatas IPG di Kabupaten Kutai Barat meningkat setiap tahunnya, dimana capaian pada tahun 2018 dengan nilai 83.52, pada tahun 2019 meningkat sebesar 0,32 dengan capaian nilai 83.84. Pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,03 dengan nilai 83.87, pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan nilai 84,28 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 84,62.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengemban amanah mengkoordinir Indeks Pembangunan Gender. Secara umum seluruh program dan kegiatan yang selama tahun 2020 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program /kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2020 sesuai dengan target.

Meskipun demikian Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, rencana strategis perangkat daerah, dan rencana kerja perangkat daerah.

Secara teknis perlu dilakukan integrasi isu gender sebagai '*cross cutting issue*' dalam dokumen RPJMD, di antaranya menuangkan data pilah, dasar hukum, bahkan IPG dan IDG telah dijadikan indikator keberhasilan pembangunan daerah.

b. Analisa Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Faktor yang mendukung Pencapaian Indikator IPG adalah :

1. Dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam upaya meminimalisir ketimpangan antara pembangunan manusia perempuan dan laki-laki di Kabupaten Kutai Barat.
2. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan telah melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan pada bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan

PUG, Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG, Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG serta Terlaksananya kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG).

Adapun salah satu data pendukung IPG (Indeks Pembangunan Gender) adalah IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) yaitu :

1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah lebih besar 0,51% dari laki – laki (*berdasarkan sumber data BKPSD per 31 Desember 2022*)
2. Tingkat Keterwakilan Perempuan di DPRD Tahun 2022 sebesar 16%
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2022 sebesar 53,72% (*sumberdata Sakernas Agustus 2022*)
4. Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2022 sebesar 29,183 (*sumberdata Sakernas Agustus 2022*)

Solusi kedepan Untuk meningkatkan IPG diperlukan upaya, kerjasama serta komitmen pemerintah dan masyarakat dengan dimensi umur panjang/sehat indikator angka harapan hidup pada saat lahir laki-laki dan perempuan, dimensi pengetahuan indikator harapan lama sekolah laki-laki dan perempuan serta rata-rata lama sekolah, dimensi kehidupan yang layak indikator perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota harus terus dilanjutkan sebagaimana yang ditargetkan pada capaian program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Upaya dan komitmen kuat dari pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan yang berkeadilan gender dengan terus mendorong tercapainya kuota 30% keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Untuk itu kesadaran dan pemahaman perempuan terhadap sumber daya serta potensi yang dimiliki harus terus ditingkatkan, oleh karena itu kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota harus terus dilanjutkan

sebagaimana yang ditargetkan pada Capaian Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

B. CAPAIAN KINERJA SASARAN DIBANDINGKAN DENGAN RPJMD

Tabel 3.54
**REALISASI KINERJA SASARAN 7 DIBANDINGKAN
DENGAN TARGET AKHIR RPJMD**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI S/D TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD 2026	PRESENTASE CAPAIAN KINERJA
Indeks Kepuasan Masyarakat	82,46	84	98,16
Nilai SAKIP	62,07 (B)	74	83,87
Opini BPK	WTP*	WTP	100
Nilai LPPD	3,0733**	4	76,83
Persentase Desa Mandiri (Jumlah)	0,1684 (32)	0,16	105,25
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	84,62	84,47	100,18

SASARAN 8

MENINGKATNYA DAN MERATANYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR

A. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Sasaran Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja yakni Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak, Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Berkurangnya Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas terkait tiga indikator tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bagian Sumber Daya Alam Setdakab Kutai Barat dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Untuk menilai capaian Kinerja sasaran Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar melalui 3 indikator adalah **75,47 %** dengan predikat **BAIK** dapat dilihat pada rincian sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 3.55

CAPAIAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA DAN MERATANYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR DARI 3 INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Nilai Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	76,45%	77,79%	101,75	80,60%	86,84%	107,74	Melebihi Target
2	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	99,25%	85,60%	86,24	99,5%	86,26%	86,69	Tidak Tercapai
3	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	29%	15,26%	52,62	28%	8,96%	32%	Tidak Tercapai
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		80,20			75,47			Baik

Berikut Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar dari 3 (tiga) Indikator yaitu :

1. **Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak.**
 - a. **Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya**

Urusan pekerjaan umum merupakan urusan yang berkaitan dengan pembangunan secara fisik. Selama beberapa tahun terakhir pembangunan fisik di Kutai Barat menunjukkan peningkatan yang cukup tajam, dan pemerintah memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur yang mampu mendukung aktivitas masyarakat, sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi.

Perkuatan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Infrastruktur Pelayanan Dasar berupa penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau, penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, keselamatan dan keamanan transportasi, dan pembangunan jaringan irigasi. Sedangkan infrastruktur ekonomi dengan prioritas pada konektivitas jalan untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Selain itu, infrastruktur ketenagalistrikan dan transformasi digital juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan serta penuntasan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Infrastruktur pelayanan dasar untuk cakupan layanan air minum layak dan aman menjadi prioritas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi kabupaten/ kota sesuai Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud.

Berdasarkan Permen PUPR nomor 29/PRT/M/2018 indikator capaian layanan air minum merupakan persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi. Pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari minimal 60 liter/org/hari dari sisi kuantitas air.

Capaian Kinerja dari Indikator “Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak” pada tahun 2022 adalah 107,74%, capaian ini dikategorikan melebihi target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2022 sebesar 80,60% dengan realisasinya sebesar 86,84%. Capaian tersebut didapat dari target 139.439 penduduk berakses air minum layak dari jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Barat sebanyak 173.001 penduduk, dengan realisasi sebanyak 150.235 penduduk berakses air minum layak.

Sementara bila dibandingkan dengan Capaian Kinerja pada tahun 2021 yakni 101.75% dari realisasi 77.45% dengan target 76.45% mengalami kenaikan sebesar 9,05%.

Berikut Rincian Data Cakupan Layanan Air Minum Sistem Perpipaan Perunit Pengolahan (WTP, IKK) di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 :

Tabel 3.56

CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM SISTEM PERPIPAAN PERUNIT PENGOLAHAN (WTP, IKK) KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA UNIT INFRASTRUKTUR	WILAYAH CAKUPAN LAYANAN	JUMLAH PENDUDUK TERFASILITASI
1	WTP 1 (Kota Sendawar)	Kecamatan Barong Tongkok	7.071
		Kecamatan Sekolaq Darat	2.601
		Kecamatan Melak	2.210
2	WTP 2	Kecamatan Tering	2.136
		Kecamatan Linggang Bigung	1.219
3	WTP Damai	Kecamatan Damai	2.660
4	WTP Muara Pahu	Kecamatan Muara Pahu	2.937
5	WTP Penyinggahan	Kecamatan Penyinggahan	1.231
6	WTP Tanjung Isuy	Kampung Tanjung Isuy	845

7	WTP Muara Nayan	Kampung Muara Nayan	1.269
8	WTP Muara Kedang	Kampung Muara Kedang	400
9	WTP Jambuk	Kampung Jambuk	725
10	WTP Muara Jawaq	Kampung Muara Jawaq	354
11	WTP Muara Lawa	Kecamatan Muara Lawa	649
12	WTP Siluq Ngurai	Kecamatan Siluq Ngurai	1.797
13	SPAM	Penambahan 2022	253
JUMLAH			29.676

Sumber : DPUPR Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022

Rincian Data yang terfasilitasi SAB :

Tabel 3.57
DATA YANG TERFASILITASI SAB

NO	NAMA UNIT INFRASTRUKTUR	WILAYAH CAKUPAN LAYANAN	JUMLAH PENDUDUK TERFASILITASI
1	SAB Intu Lingau	Kampung Intu Lingau	511
2	SAB Merayaq	Kampung Merayaq	503
3	SAB Pepas Asa	Kampung Pepas Asa	262
JUMLAH PENDUDUK YANG TERFASILITASI			1.276

Sumber : DPUPR Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022

Berdasarkan Data pada kedua tabel diatas ada beberapa sistem yang mencakup layanan air minum yang ada di Kabupaten Kutai Barat yakni WTP, SPAM dan SAB yang mencakup 29.676 penduduk yang menggunakan sistem perpipaan perunit pengelolaan (WTP) dan juga SPAM serta 1.276 yang menggunakan layanan SAB, untuk itu bila di jumlah keseluruhan jumlah penduduk yang terealisasi cakupan layanan air minum sebanyak 30.952 dari jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Barat yakni 173.001 di tahun 2022 ini.

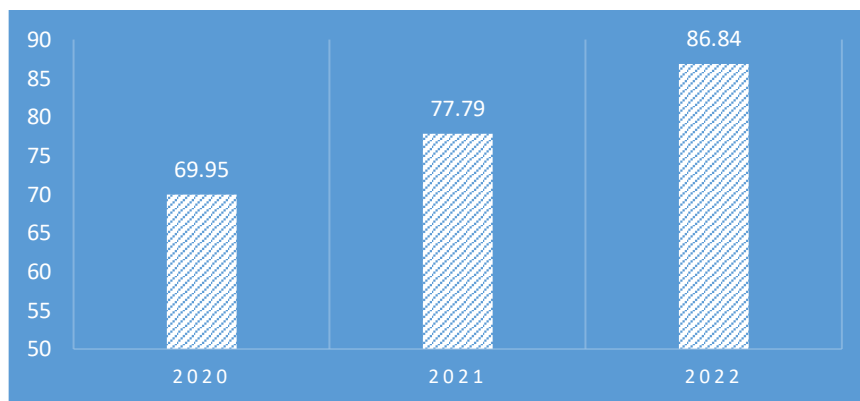
Berikut daftar tabel dan grafik perkembangan realisasi dari Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak dari tahun 2019 sampai dengan 2022:

Tabel 3.58
**PERKEMBANGAN REALISASI DARI INDIKATOR
PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM LAYAK
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 – 2022**

Indikator Kinerja	2020	2021	2022
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	69,95%	77,79%	86,84%

Sumber : DPUPR Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022

Grafik 3.19
**PERKEMBANGAN REALISASI INDIKATOR PERSENTASE PENDUDUK
BERAKSES AIR MINUM LAYAK KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2019 – 2022**



Berdasarkan tabel dan grafik diatas perkembangan realisasi dari indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak di Kabupaten Kutai Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berikut Rinciannya :

- ✓ Ditahun 2022 realisasi Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak sebesar 86,84% naik 9,05% dari tahun 2021 sebesar 77,79%,
- ✓ Ditahun 2021 realisasi Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak sebesar 77,79% naik 7,84% dari tahun 2020 sebesar 69,95%,
- ✓ Ditahun 2020 realisasi Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak sebesar 69,95% naik 1,15% dari tahun 2019 sebesar

68,8%.

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Faktor yang menjadi penghambat dan serta strategi yang dilakukan dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar dengan Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak adalah sebagai berikut :

- a. Faktor yang menghambat Capaian Indikator adalah sebagai berikut :
 - 1. Dikarenakan Pandemi Covid tahun 2019-2020 yang menyebabkan adanya kebijakan relokasi anggaran sehingga perhatian pemerintah lebih diutamakan pada aspek kesehatan dan ekonomi.
- b. Strategi yang dilakukan dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut:
 - 1. Peningkatan cakupan layanan infrastruktur dasar untuk air minum dalam upaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM),
 - 2. Penyediaan layanan air minum layak sesuai target SPM.

2. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik.

a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya

Realisasi Kinerja dari Indikator “Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik” pada tahun 2022 adalah 86,26% dari target yakni 99,50% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kabupaten Kutai Barat dengan capaian kinerjanya adalah 86,69%, capaian ini belum mencapai target yang diperjanjikan. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 sebesar 99,75% maka capaian kinerja ditahun 2022 ini mencapai 86,48%.

Berikut ini Data yang diambil dari Rasio Elektrifikasi UP3 Samarinda per Desember 2022 untuk wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah :

Jumlah Rumah Tangga yang terdata	: 52.761
Jumlah Pelanggan PLN	: 45.512
Persentase	: 86,26 %

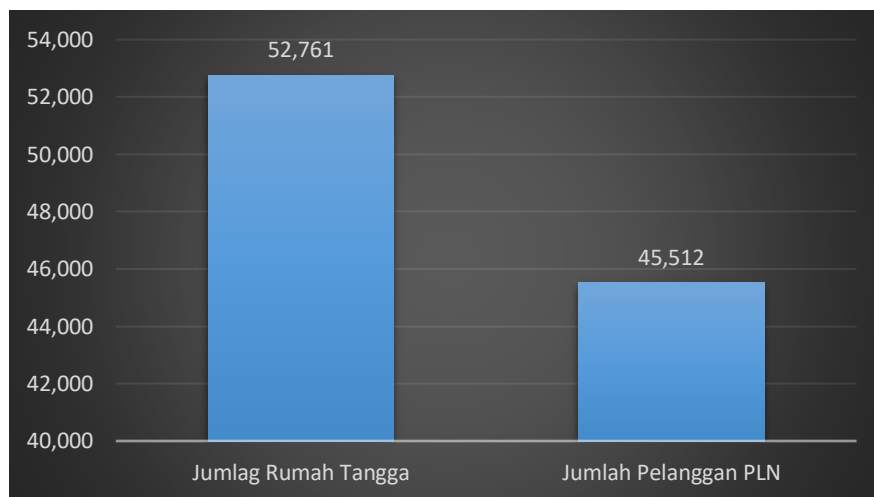
Berikut tabel dan grafik Data Rasio Elektrifikasi Kabupaten Kutai Barat :

Tabel 3.59
**RASIO ELEKTRIFIKASI
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Pelanggan PLN	Rasio (%)
1	Kabupaten Kutai Barat	52.761	45.512	86,26

Sumber : Bagian SDA Sekretariat Daerah tahun 2022

Grafik 3.20
**RASIO ELEKTRIFIKASI
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022**



Berdasarkan tabel dan grafik diatas Rasio Elektrifikasi untuk wilayah Kabupaten Kutai Barat yakni 86,26% dari jumlah rumah tangga sebanyak 52.761 terdapat jumlah pelanggan PLN sebanyak 45.512.

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Faktor yang menjadi pendukung dan faktor penghambat serta strategi yang dilakukan dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar dengan Indikator Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Pendukung Capaian Indikator adalah sebagai berikut :

1. Pendukung Data dari Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Timur Melalui UP3 Samarinda sampai dengan Desember 2022 dan Rasio Desa Berlistrik Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Januari 2023.
- b. Faktor yang menghambat Capaian Indikator adalah sebagai berikut:
 1. Tidak adanya kewenangan Kabupaten/Kota terkait indikator persentase rumah tangga pengguna listrik sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 2. Untuk memenuhi data dari indikator persentase rumah tangga pengguna listrik diambil data yang ada di Faktor Pendukung di poin (a).
- c. Strategi yang dilakukan dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut:
 1. Meningkatkan akses ketenagalistrikan berbasis energi baru terbarukan.
 2. Peningkatan upaya konservasi energi.

3. Berkurangnya Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).

a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya

Urusan Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Kutai Barat yang menjadi salah satu perhatian utama pemerintah terkait permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni (RTLH). Tercatat masih terdapat kawasan permukiman kumuh yang tersebar di Kecamatan Barong, Sekolaq Melak, Damai, dan Muara Lawa. Untuk rumah tidak layak huni tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Barat. Berikut merupakan data luasan Kawasan permukiman kumuh dan jumlah RTLH di Kabupaten Kutai Barat.

Realisasi Kinerja dari Indikator “Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)” pada tahun 2022 adalah 8,96 % dari target yakni 28% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kabupaten Kutai Barat dengan capaian kerjanya adalah 32%, capaian

ini dikategorikan tidak tercapai dari target yang diperjanjikan meski sudah mendapat bantuan dana dari provinsi dan juga dana DAK serta capaian tersebut didapat dari realisasi bantuan yang hanya bisa membangun 470 bangunan dari jumlah 5242 RTLH yang ada di Kabupaten Kutai Barat.

Berikut tabel perkembangan realisasi dari Indikator Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari tahun 2019 sampai dengan 2022:

Tabel 3.60
**PERKEMBANGAN REALISASI DARI INDIKATOR
BERKURANGNYA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 – 2022**

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022
Berkurangnya RTLH	n.a	n.a	2,16	8,96

Dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 sebesar 24% maka capaian kinerja ditahun 2022 ini mencapai 63,58%.

Berikut data luas kawasan permukiman kumuh dan jumlah RTLH di Kabupaten Kutai Barat:

Tabel 3.61
**DATA LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DAN JUMLAH RTLH
DI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022**

No	Jenis Data	Volume	Satuan	Keterangan
1	Luas Kawasan Permukiman	8.024,17	Ha	16 Kecamatan
2	Luas Kawasan Permukiman Perkotaan	3.459,45	Ha	Barong Tongkok, Sekolaq Darat, Melak
3	Luas Kawasan Permukiman Kumuh sesuai SK. Bupati No. 592/K.425/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh	1.045,63	Ha	Barong Tongkok, Sekolaq Darat, Melak, Damai, Muara Lawa.
4	Kumuh Perkotaan sesuai SK. No. 592/K.425/2021 tentang Penetapan	662,15	Ha	Barong Tongkok, Sekolaq Darat,

	Lokasi Kawasan Kumuh			Melak
5	Kumuh Pedesaan sesuai SK. No. 592/K.425/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh	423,48	Ha	Muara Lawa, Damai
6	Jumlah Rumah Se- Kabupaten Kutai Barat	33.326	Unit	16 Kecamatan
7	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Se- Kabupaten Kutai Barat	5.242	Unit	16 Kecamatan
8	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan	841	Unit	Barong, Sekolaq Darat, Melak

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tahun 2022

Berikut tabel Data Rumah Se-Kabupaten Kutai Barat dan Data Rumah Tidak Layak Huni Se-Kabupaten Kutai Barat:

Tabel 3.62
**DATA JUMLAH RUMAH
DI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Barong Tongkok	5767
2	Bentian Besar	802
3	Bongan	1622
4	Damai	2002
5	Jempang	1410
6	Linggang Bigung	3888
7	Long Iram	963
8	Melak	3626
9	Mook Manaar Bulatn	2337
10	Muara Lawa	1305
11	Muara Pahu	1526
12	Nyuatan	1497
13	Penyinggahan	524
14	Sekolaq Darat	2070
15	Siluaq Ngurai	705
16	Tering	3273
Total		33.326

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tabel 3.63
**DATA JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Barong Tongkok	388
2	Bentian Besar	64
3	Bongan	362
4	Damai	369
5	Jempang	572
6	Linggang Bigung	326
7	Long Iram	541
8	Melak	279
9	Mook Manaar Bulatn	355
10	Muara Lawa	174
11	Muara Pahu	339
12	Nyuatan	336
13	Penyinggahan	335
14	Sekolaq Darat	174
15	Siluq Ngurai	135
16	Tering	493
Total		5242

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung serta strategi yang dilakukan dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar dengan Indikator Berkurangnya RTLH adalah sebagai berikut :

c. Faktor Pendukung Capaian Indikator adalah sebagai berikut :

1. Adanya bantuan dari dana provinsi dan juga dana DAK.

d. Faktor yang menghambat Capaian Indikator adalah sebagai berikut:

1. Dikarenakan terbatasnya anggaran terkait pengurangan RTLH.

e. Strategi yang dilakukan dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

1. Bantuan stimulan rumah layak huni Bantuan Stimulan Perumahan

- Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dan bantuan pembiayaan perumahan Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP),
2. Optimalisasi upaya pembenahan pemukiman dan rumah tidak layak huni.

B. CAPAIAN KINERJA SASARAN DIBANDINGKAN DENGAN RPJMD

Tabel 3.64

REALISASI KINERJA SASARAN 8 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

INDIKATOR KINERJA	REALISASI S/D TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD 2026	PRESENTASE CAPAIAN KINERJA
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	86,84%	100%	86,84
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	86,26%	99,75%	86,47
Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8,96%	24%	37,33

SASARAN 9

TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PENOPANG KEGIATAN EKONOMI KERAKYATAN

A. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Sasaran Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja yakni Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap dan Cakupan Layanan Telekomunikasi. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas terkait indikator-indikator tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk menilai Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan melalui 2 Indikator adalah **111,09%** dengan predikat **MELAMPAUI TARGET** dapat dilihat pada rincian sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 3.65

CAPAIAN KINERJA SASARAN TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PENOPANG KEGIATAN EKONOMI KERAKYATAN DARI 2 INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021-2022

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Nilai Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	56%	68,77%	122,8%	61,20%	65,00%	106,20%	Melebihi Target
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	43%	38%	89%	48%	55,67%	115,98%	Melebihi Target
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		105.9%			111,09%			Melampaui Target

Berikut Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan dari 2 (dua) Indikator yaitu :

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap.

a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya

Urusan pekerjaan umum merupakan urusan yang berkaitan dengan pembangunan secara fisik. Selama beberapa tahun terakhir pembangunan fisik di Kutai Barat menunjukkan peningkatan yang cukup tajam, dan pemerintah memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur yang mampu mendukung aktivitas masyarakat, sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi. Perkuatan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Infrastruktur Pelayanan Dasar berupa penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau, penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, keselamatan dan keamanan transportasi, dan pembangunan jaringan irigasi. Sedangkan infrastruktur ekonomi dengan prioritas pada konektivitas jalan untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

Selain itu, infrastruktur ketenagalistrikan dan transformasi digital juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan serta penuntasan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Infrastruktur jalan menjadi prioritas utama yang terus dibangun di Kutai Barat. Kondisi jalan yang baik akan sangat mendukung kelancaran mobilitas barang dan jasa sehingga akan berpengaruh pada berjalannya roda perekonomian daerah dengan lancar.

Pembangunan infrastruktur jalan di Kutai Barat, sesuai target RPJMD untuk mewujudkan jaringan jalan dalam kondisi mantap. Menurut kriteria Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, jalan dalam kondisi mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan kondisi sedang.

Prioritas pembangunan jalan adalah jalan yang mampu meningkatkan akses masyarakat antar wilayah, sehingga mampu mendukung aktivitas ekonomi dan distribusi barang dan jasa di Kutai Barat. Selain itu, pembangunan jalan diharapkan mampu mengatasi

keterisoliran beberapa kampung atau daerah yang terjadi selama ini. Kelancaran akses antar wilayah akan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga tingkat ketimpangan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi yang ada di antara wilayah dapat direduksi.

Realisasi Kinerja dari Indikator “Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap” pada tahun 2022 adalah 65,00% (855,93 Km) dari target yakni 61,20% (785,81 Km) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kabupaten Kutai Barat dengan capaian kinerjanya adalah 106,20%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Dan juga capaian tersebut diraih dari kondisi jalan di Kabupaten Kutai Barat dalam kondisi baik/mantap adalah 855,93 Km dan yang sedang 99,89 Km jadi jumlah keseluruhan jalan di Kabupaten Kutai Barat dalam kondisi baik/mantap dan kondisi sedang adalah 955,82 Km dari panjang jalan di Kabupaten Kutai Barat 1.283,99 Km.

Berikut Rincian Data Panjang Jalan di Kabupaten Kutai Barat Menurut Status Tahun 2022 :

Tabel 3.66
**PANJANG JALAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT
MENURUT STATUS TAHUN 2022**

NO	STATUS JALAN	PANJANG JALAN (KM)
1	Jalan Nasional	269,75
2	Jalan Provinsi	-
3	Jalan Kabupaten	1.283,99
4	Jalan Desa/Kampung	892,2
5	Jalan Non Status	1.812 (Jalan Tambang/Sawit)

Sumber : DPUPR Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022

Berdasarkan pada tabel diatas yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang panjang jalan Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 adalah 1.283,99 Km, Jalan Nasional 269,75 Km, jalan Desa/Kampung 892,2 Km dan jalan Non Status (jalan tambang/sawit) 1.812 Km. Sedangkan untuk jalan Provinsi 0 Km.

Berikut Rincian Data Rekapitulasi Kondisi Jalan di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 :

Tabel 3.67
**REKAPITULASI KONDISI JALAN
DI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022**

NO	KONDISI JALAN	PANJANG JALAN (KM)
1	Baik/Mantap	855,93
2	Sedang	99,89
3	Rusak Ringan	34,09
4	Rusak Sedang	22,66
5	Rusak Berat	24,11
6	Tanah	247,31

Sumber : DPUPR Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022

Untuk Rekapitulasi Kondisi Jalan di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 yakni kondisi jalan baik/mantap 855,93 Km, sedang 99,89 Km, rusak ringan 34,09 Km, rusak sedang 22,66 Km, rusak berat 24,11 dan jalan masih tanah 247,31 Km.

Berikut tabel perkembangan realisasi dari Indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap dari tahun 2020 sampai dengan 2022 :

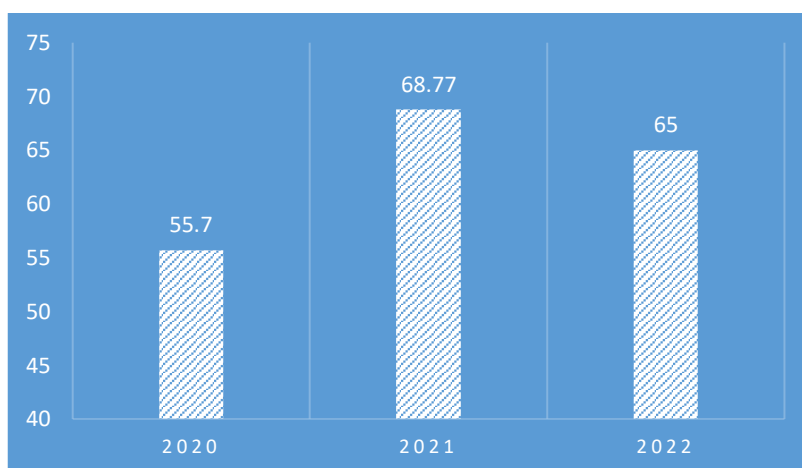
Tabel 3.68
**PERKEMBANGAN REALISASI DARI INDIKATOR
PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN KABUPATEN KUTAI BARAT DALAM
KONDISI MANTAP TAHUN 2020 – 2022**

Indikator Kinerja	2020	2021	2022
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	55,7	68,77	65,00

Sumber : DPUPR Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022

Berikut Grafik perkembangan realisasi dari Indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap dari tahun 2020 sampai dengan 2022 :

Grafik 3.21
PERKEMBANGAN REALISASI INDIKATOR PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN KABUPATEN KUTAI BARAT DALAM KONDISI MANTAP TAHUN 2020 – 2022



Berdasarkan tabel dan grafik diatas perkembangan realisasi dari indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Kutai Barat Dalam Kondisi Mantab dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berikut Rinciannya :

- ✓ Ditahun 2022 realisasi Indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Kutai Barat Dalam Kondisi Mantab sebesar 74,43% naik 5,66% dari tahun 2021 sebesar 68,77%,
- ✓ Ditahun 2021 realisasi Indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Kutai Barat Dalam Kondisi Mantab sebesar 68,77% naik 13,7% dari tahun 2020 sebesar 55,7%,
- ✓ Ditahun 2020 realisasi Indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Kutai Barat Dalam Kondisi Mantab sebesar 55,7% naik 3,7% dari tahun 2019 sebesar 52%,

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Faktor yang menjadi penghambat dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar dengan Indikator Proporsi Jaringan Jalan Kabupaten Kutai Barat Dalam Kondisi Mantap adalah sebagai berikut :

- a. Faktor penghambat capaian indikator adalah sebagai berikut :
 1. Pandemi Covid tahun 2019-2020 lalu menyebabkan adanya kebijakan realokasi anggaran sehingga perhatian pemerintah lebih diutamakan pada aspek kesehatan dan ekonomi,
 2. Selain itu kondisi geografis Kutai Barat serta jarak antar kecamatan merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengerasan jalan.
- b. Strategi yang dilakukan dalam pencapaian indikator adalah :
 1. Mengembangkan konektivitas di daerah tertinggal dan antar kawasan yang masih terbatas,
 2. Peningkatan cakupan layanan infrastruktur dasar dalam upaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2. Cakupan Layanan Telekomunikasi.

a. Perbandingan Capaian Kinerja Setiap Tahunnya

Realisasi Kinerja dari Indikator “Cakupan Layanan Telekomunikasi” pada tahun 2022 adalah 40% dari target yakni 48% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kabupaten Kutai Barat dengan capaian kinerjanya adalah 84%, capaian ini kurang dari target yang diperjanjikan. Hal ini dicapai dari Desa/Kampung yang bisa mengakses internet dan jumlah Desa/Kampung yang tercoverage layanan telekomunikasi pada tahun 2022 yang ditargetkan sebanyak 94 Desa/Kampung (48%) terealisasi sebanyak 108 Desa/Kampung (55,67%).

Jumlah Realisasi 108 Desa/Kampung yang bisa mengakses internet pada tahun 2022 ini menurut Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat adalah :

- Sebanyak 30 Desa/Kampung yang bisa mengakses internet oleh Badan Aksibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI)
- Sebanyak 3 Desa/Kampung yang bisa mengakses internet oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.

- Sebanyak 108 Desa/Kampung yang tercoverage layanan telekomunikasi.

Sementara bila dibandingkan dengan Capaian Kinerja pada tahun 2021 yakni 89% dari Target 43% dengan Realisasi 38%.

Berikut ini Jumlah Desa/Kampung yang bisa mengakses internet Oleh Badan Aksibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) serta oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kutai Barat tahun 2022:

Tabel 3.69
**REKAP DATA KEKUATAN SIGNAL TAHUN 2019-2022
DI KECAMATAN SE KABUPATEN KUTAI BARAT**

No	Kecamatan	Blankspot				Lemah				Coverage			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Barong Tongkok	9	1	1	1	5	12	12	11	7	8	8	9
2	Bentian Besar	1	3	3	3	6	5	5	1	2	1	1	8
3	Jempang	1	0	0	0	6	3	3	3	5	9	9	9
4	Melak	1	0	0	0	3	4	4	4	2	2	2	2
5	Manor Bulatn	3	4	4	2	10	10	10	8	2	2	2	6
6	Linggang Bigung	4	4	4	0	3	3	3	4	4	4	4	7
7	Sekolaq Darat	1	0	0	0	2	2	1	1	4	6	7	7
8	Tering	6	3	2	2	4	7	8	6	3	5	5	7
9	Bongan	3	7	7	2	8	3	3	4	5	6	6	10
10	Damai	7	6	3	3	3	6	7	7	6	5	7	7
11	Long Iram	4	6	6	4	5	2	2	2	2	3	3	5
12	Muara Lawa	3	0	0	0	2	5	5	5	3	3	3	3
13	Muara Pahu	0	0	0	0	6	7	7	6	6	5	5	6
14	Nyuatan	7	3	3	1	1	3	3	4	2	4	4	5
15	Penyinggahan	3	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
16	Siluq Ngurai	3	8	5	1	8	3	6	1	5	5	5	15
Total		56	45	38	16	72	78	82	70	61	71	74	108

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika

Berikut data rincian luas wilayah yang tercoverage layanan komunikasi di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 :

- ✓ Luas Wilayah Kabupaten Kutai Barat : 20.385 Km²
- ✓ Jumlah Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat : 16 Kecamatan

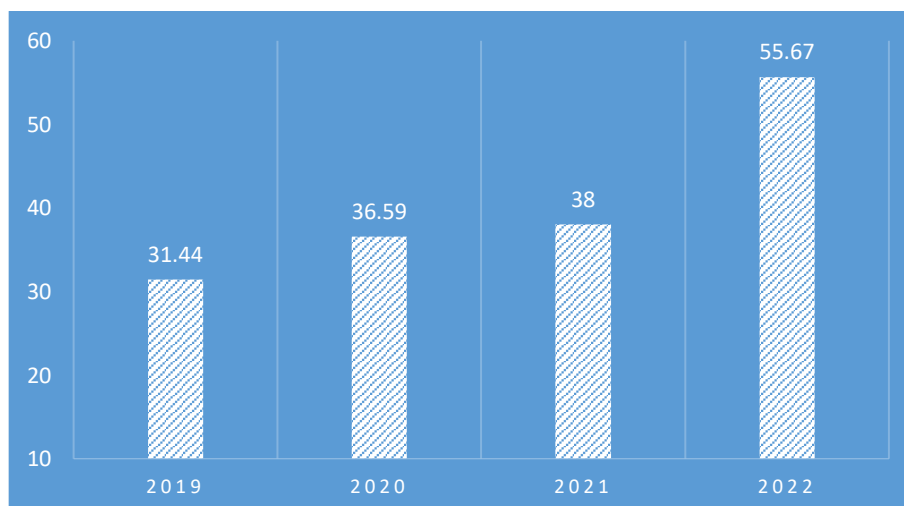
- ✓ Jumlah Kampung di Kabupaten Kutai Barat : 194 Kampung
- ✓ Jumlah Kampung yang Tercoverage : 108 Kampung
- ✓ Jumlah Kampung yang kekuatan sinyalnya (lemah) : 70 Kampung
- ✓ Jumlah Kampung Blankspot : 16 Kampung

Berikut tabel dan grafik perkembangan realisasi dari Indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Kutai Barat dari tahun 2019 sampai dengan 2022 :

Tabel 3.70
**PERKEMBANGAN REALISASI DARI INDIKATOR
CAKUPAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 – 2022**

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022
Cakupan Layanan Telekomunikasi	31,44%	36,59%	38,14%	55,67%

Grafik 3.22
**PERKEMBANGAN REALISASI INDIKATOR CAKUPAN LAYANAN
TELEKOMUNIKASI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 – 2022**



Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas realisasi dari Indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 ini sangat meningkat dari tahun sebelumnya karena adanya penambahan

Desa/Kampung yang tercoverage layanan internet yakni 78 Desa/Kampung diantaranya 30 Desa/Kampung oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) sedangkan 3 Desa/Kampung yang bisa mengakses internet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.

b. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung serta strategi yang dilakukan dalam pencapaian Sasaran Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan dengan Indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

1. Faktor Keberhasilan capaian indikator adalah sebagai berikut :
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 melakukan update ulang data Blankspot menggunakan telepon selular ke setiap Kepala Kampung se Kabupaten Kutai Barat.
Alokasi Anggaran pada Tahun 2022 yang tersedia dapat mengakomodir:
 - ✓ Pemasangan VSAT di 5 (Lima) Kampung
 - ✓ Biaya sewa layanan VSAT untuk kampung yang sudah terpasang VSAT di 3 (Tiga) Kampung
2. Kendala yang mempengaruhi dalam capaian indikator adalah:
 - a. Operator Selular tidak melaporkan dalam pembangunan menara telekomunikasi
3. Solusi yang dilakukan dalam pencapaian indikator adalah :

Mengusulkan ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) untuk pembangunan menara telekomunikasi dan Internet VSAY pada tahun 2022 Kabupaten Kutai Barat mendapat 4 (Empat) titik pembangunan menara telekomunikasi diantaranya : Kampung Kandesiq, Pereng Taliq, Lemper, dan Deraya.

 1. Mengalokasikan anggaran untuk melakukan update data blankspot secara langsung ke lapangan
 2. Mengalokasikan/menambah anggaran untuk penambahan layanan internet bagi kampung-kampung Blankspot.

B. CAPAIAN KINERJA SASARAN DIBANDINGKAN DENGAN RPJMD

Tabel 3.71
**REALISASI KINERJA SASARAN 9 DIBANDINGKAN
DENGAN TARGET AKHIR RPJMD**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI S/D TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD 2026	PRESENTASE CAPAIAN KINERJA
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	65,00%	75,20	86,43
Cakupan Layanan Telekomunikasi	40%	68	58,82

3.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam rangka mengukur tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*), Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui 47 (Empat Puluh Delapan) Perangkat Daerah yang ada, telah berusaha memaksimalkan Sumber Daya Manusia dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa target yang telah ditetapkan tersebut ada pencapaian kinerjanya yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Ini adalah salah satu bentuk efisiensi penggunaan anggaran yang patut dibanggakan karena target yang telah ditetapkan dapat dilampaui dengan menggunakan Sumber Daya yang ada. Dari 9 (Sembilan) Sasaran Strategis yang ada sebanyak 7 (Tujuh) sasaran yang pencapaian kinerjanya diatas 100% dengan Rata-rata Tingkat Efisiensi sebesar **32,74 %** dengan nilai **Rp 662.085.293.824,00**. Untuk lebih jelasnya terkait penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.72
ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Efisiensi (Rp)	Realisasi %	Efisiensi %
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3-7)
1	1.Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap perekonomian daerah	139,05	72.464.679.086,00	54.553.862.584,00	17.910.816.502,00	75,28	63,77
2	2.Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru	100,11	13.822.372.909,00	9.252.835.063,00	4.569.537.846,00	66,94	33,17
3	3. Meningkatkan standar hidup layak masyarakat Kutai Barat	127,56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	5. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	102,20	160.818.802.053,00	119.265.101.146,50	41.553.700.906,50	74,16	28,04
5	6. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	100,06	189.488.801.895,00	86.573.644.626,14,00	102.915.157.268,8	45,69	54,37
6	7. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	102,99	859.848.448.572,00	410.042.645.980,00	449.805.802.592,00	74,69	28,3
7	9. Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	111,09	433.414.652.951,00	388.019.819.184,00	45.394.833.767,00	89,53	21,56
	Jumlah		1.729.857.757.466,00	1.067.772.463.643,00	662.085.293.824,00	Rata-rata	32,74

3.6 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam menjabarkan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja serta Target yang harus dicapai dalam setiap tahunnya. Untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan tersebut telah dibentuk Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

Pada RPJMD 2021-2026 terdapat Program dan Kegiatan yang disiapkan untuk melaksanakan Visi dan Misi Bupati Kutai Barat 2021-2026. Pada Tahun 2022 berdasarkan RKPD tahun 2022 terdapat **199** Program dan **589** Kegiatan yang diselenggarakan ke seluruh Perangkat Daerah untuk mencapai target-target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022.

Dari **199** Program dan **589** Kegiatan pada tahun 2022 sebanyak **158** Program dan **293** Kegiatan yang dialokasikan untuk merealisasikan target dalam 23 Indikator Kinerja Utama dari 9 Sasaran strategis yang terdapat dalam RPJMD 2021-2026. Untuk lebih jelasnya terkait program dan kegiatan yang dianggarkan dengan mengacu pada tercapainya target dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.73

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	Nilai Efisien (Rp)	%	Total Program / Kegiatan yang dianggarkan		Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan untuk Mencapai Sasaran		Keterangan
					Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	20.292.330.678,00	13.528.054.115,00	6.764.276.563,00	66,67	2	18	11	8	Sekretariat DPRD
2	3.629.350.698,00	3.517.349.816,00	112.00.882,00	96,91	3	19	2	8	Sekretariat Daerah
3	3.258.725.596,00	2.620.596.210,00	638.129.386,00	80,42	6	10	5	5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
4	4.001.951.214,00	3.427.978.387,00	573.972.827,00	85,66	2	9	1	4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	13.996.296.890,00	1.313.560.029,00	12.682.736.861,00	9,39	3	13	2	5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	784.482.176.799,00	395.708.234.222,00	388.773.942.577,00	50,44	3	13	2	6	Badan Keuangan dan Aset Daerah
7	6.197.877.878,00	5.992.476.366,00	205.401.512,00	96,69	5	15	3	8	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
8	2.798.079.762,00	2.719.465.533,00	78.614.229,00	97,19	2	9	1	1	Badan Pendapatan Daerah
9	8.065.471.214,00	5.884.783.690,00	2.180.687.524,00	72,96	3	12	4	6	Dinas Perikanan
10	5.980.330.081,00	5.950.034.620,00	30.295.461,00	99,49	3	11	2	6	Dinas Pemuda dan Olahraga
11	20.331.697.775,00	5.536.840.400,00	14.794.857.375,00	27,23	10	21	10	15	Dinas Lingkungan Hidup
12	1.240.479.259,00	1.234.335.920,00	6.143.339,00	99,50	5	14	4	7	Dinas Ketahanan Pangan
13	160.818.802.053,00	119.265.101.146,50	41.553.700.906,50	74,16	10	23	9	16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	381.575.310,00	375.912.322,00	5.662.988,00	98,52	5	11	4	5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15	7.581.365.247,00	3.474.030.640,00	4.107.334.607,00	45,82	3	13	2	7	Dinas Perhubungan
16	2.246.976.330,00	2.234.474.640,00	12.501.690,00	99,44	3	10	2	3	Inspektorat Daerah
17	14.062.495.821,00	8.175.242.406,00	5.887.253.415,00	58,14	4	13	3	6	Dinas Pariwisata
18	1.682.475.000,00	1.500.517.664,00	181.957.336,00	89,19	7	17	6	9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19	3.046.567.346,00	2.562.146.752,00	484.420.594,00	84,10	6	13	5	6	Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	189.488.801.895,00	86.638.199.685,00	102.850.602.210,00	45,72	5	24	4	15	Dinas Kesehatan
21	413.056.100,00	366.222.270,00	46.833.830,00	88,66	3	9	5	8	Dinas Arsip & Perpustakaan
22	6.721.533.294,00	6.023.727.447,00	697.805.847,00	89,62	9	23	8	18	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak
23	2.695.219.782,00	2.390.910.168,00	304.309.614,00	88,71	5	14	4	6	Dinas Komunikasi dan Informatika
24	1.487.550.000,00	1.485.225.293,00	2.324.707,00	99,84	3	11	2	4	Satuan Polisi Pamong Praja
25	12.139.897.909,00	7.752.317.399,00	4.387.580.510,00	63,86	13	25	12	18	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
26	50.336.712.051,00	40.493.836.488,00	9.842.875.563,00	80,45	6	20	5	12	Dinas Pertanian
27	6.053.959.081,00	5.819.801.219,00	234.157.862,00	96,13	5	10	4	4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
28	446.452.544.884,00	339.561.122.260,00	106.891.422.624,00	76,06	12	25	11	18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
29	2.339.158.177,00	1.843.149.320,00	496.008.857,00	78,80	5	14	4	8	Dinas Sosial
30	13.353.919.500,00	12.626.243.239,00	727.676.261,00	94,55	10	21	9	15	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
31	8.387.153.727,00	7.995.601.424,00	391.552.303,00	95,33	38	129	22	36	16 Kecamatan
	1.930.525.531.351,00	1.098.017.491.090,50	705.947.040.260,50	60,87	199	589	158	293	

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan LKjIP Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 ini merupakan bentuk perekaman kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan membandingkan antara rencana dan realisasi serta melakukan penajaman sasaran strategis lewat indikator-indikator sasaran yang ditetapkan. Sudah menjadi konsekuensi bagi daerah hasil pemekaran yang terbentuk tahun 1999 ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan terhadap masyarakat sebagai agenda pembangunan selain usaha pengentasan kemiskinan sebagai prioritas. Hal ini dimaklumi mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kutai Barat dengan kampung-kampung yang terpencar dan sulitnya mengakses daerah-daerah tertentu. Meski secara umum pengukuran kinerja program dan kegiatan yang dijalankan masing-masing Perangkat Daerah dianggap berhasil, namun pembangunan dirasakan masih menyisakan kekurangan dan kelemahan terutama pada sisi perencanaan dan usaha pencapaian dari target yang dikehendaki.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Seiring dengan terjadinya musibah global dan nasional yaitu pandemi covid-19 memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi, dimana pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha berada pada angka **4,18%**. Berkat upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan dukungan dari masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19, perlahan-lahan sektor ekonomi di Kutai Barat berangsur membaik, dimana berdasarkan data dari BPS Laju Pertumbuhan Ekonomi Kutai Barat tahun 2022 meningkat menjadi **4.77%**. Tentunya ini berdampak pada rasa optimis masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kutai Barat akibat badai pandemi covid-19 untuk bangkit dan terus berbenah untuk membangun daerah ini.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang memuaskan atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari

dukungan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kutai Barat yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun dibalik keberhasilan yang dicapai Pemerintah Kutai Barat, masih dijumpai berbagai hambatan baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mempersiapkan strategi-strategi yang diupayakan untuk pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu, indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada tahun Pertama RPJMD 2021 – 2026, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana, kompetensi SDM dan waktu pelaksanaan, sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Adapun program kegiatan dan sub kegiatan yang dijalankan selama tahun 2022, senantiasa memperhatikan urusan yang menjadi prioritas baik karena tuntutan peraturan perundangan maupun karena kebutuhan sejatinya masyarakat seperti urusan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum (infrastruktur) dan lain sebagainya yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik terus dibenahi dan ditingkatkan. Dan upaya ini dinilai berhasil oleh pemerintah, sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2022 berhasil meraih penghargaan antara lain :

1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** selama 7 tahun berturut-turut dari BPK dan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. **Predikat B** (baik) dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi untuk Bidang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. **Predikat Kepatuhan Sedang** Tahun 2022 dengan Nilai 69,90 Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang – Undang no. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dari OMBUDSMAN Republik Indonesia;
4. **Peringkat Pratama Kabupaten Layak Anak** Tahun 2022 dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;

5. **Anugrah Desa Wisata** Desa Wisata Linggang Melapeh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
6. **Panji Keberhasilan Bidang Dekranasda** dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
7. **Terbaik VI Penjaringan Peserta dan Kreativitas Pelayanan Perangkat Daerah (PEPES IKAN)** Se-Kalimantan Timur Tahun 2022.

Penghargaan tersebut membuktikan bahwa dalam kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat, Bapak FX. Yapan, SH dan H. Edyanto Arkan, SE telah berhasil melakukan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang merupakan salah satu cita-cita otonomi daerah.

Terlepas dari keberhasilan tersebut diatas, tidak sedikit pula program dan kegiatan yang ditetapkan seringkali tidak mencapai target karena banyaknya kendala atau permasalahan yang dihadapi. Hal inilah yang kemudian memberi ruang yang seluas-luasnya kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembinaan dan pengawasan dalam perbaikan penyelenggaraan otonomi daerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran pembangunan melalui LKJIP ini, masih terdapat ada beberapa indikator kinerja sasaran yang belum tercapai secara maksimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain :

1. Belum adanya sinkronisasi antara target yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD yang selanjutnya dituangkan dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Target yang ditetapkan dalam RKPD belum diaktualisasikan sesuai anggaran APBD sehingga target capaian kinerja sasaran belum selaras.
2. RPJMD belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam mengevaluasi capaian indikator kinerja karena ada beberapa indikator yang ditetapkan bukan merupakan indikator *outcome*, target yang tidak realistis, satuan indikator dan indikator yang seharusnya penting belum dimasukkan dalam RPJMD.
3. Ada beberapa indikator kinerja sasaran tidak didukung ketersediaan data. Indikator Kinerja Utama sebagai instrument untuk mengukur pencapaian sasaran belum sepenuhnya dipahami oleh masing-masing Perangkat Daerah, dan belum adanya petunjuk teknis dari beberapa penerapan SPM sehingga

Perangkat Daerah belum dapat menggali data profil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya.

4. Pemahaman oleh masing-masing Perangkat Daerah terhadap ketentuan pedoman Penyusunan LKjIP masih kurang sehingga penyusunan LKjIP belum memberikan hasil optimal.
5. Rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk SAKIP Kabupaten dan oleh Inspektorat Daerah untuk SAKIP Perangkat Daerah belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan baik, sehingga belum terlihat kemajuan yang berarti dalam penerapan SAKIP terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yang diharapkan serta kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja.

Dalam upaya mengatasi masalah dan hambatan tersebut, maka strategi yang dapat ditempuh yaitu :

1. Mengadakan evaluasi pada target-target yang telah ditetapkan di RPJMD sehingga ada sinkronisasi antara RKPD dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.
2. Memacu penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara penuh, yaitu SKPD selain menyusun Renstra, Perjanjian Kinerja dan LKjIP juga harus menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Aksi atas pelaksanaan kinerja yang akan diwujudkan.
3. Menyelenggarakan pendampingan (*coaching clinic*) Penguatan Akuntabilitas dengan mengundang Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk peningkatan SDM Aparatur sehingga pengetahuan dan pemahaman terkait implementasi SAKIP agar kedepan akan memberikan dampak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
4. Peningkatan kapasitas SDM para evaluator LKjIP dengan mengikuti Bimtek Evaluasi LKjIP di luar daerah atau mengundang Narasumber dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

5. Memberikan *reward* kepada Perangkat Daerah yang meraih poin tertinggi pada implementasi SAKIP sehingga akan memacu Perangkat Daerah yang lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk meningkatkan kualitas penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented goverment*).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Sendawa, 27 Maret 2023
BUPATI KUTAI BARAT

FX YAPAN, SH, MH.